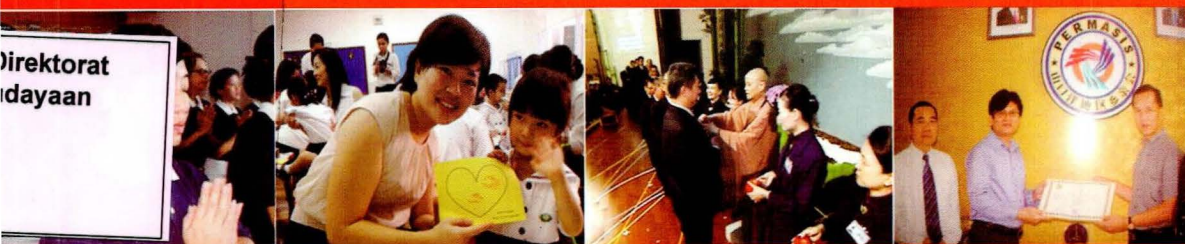




SAMSUL HIDAYAT, M.A, NUR ISKANDAR, SP,  
FITRI KUSUMAYANTI, M.SI, MERY LESTARI, M.SI, BAHARUDDIN, M.SI

# PERAN ORGANISASI SOSIAL TIONGHOA

## PADA MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG



Balai Pelestarian  
Nilai Budaya Pontianak



300 . G PER P

Samsul Hidayat, M.A  
Nur Iskandar, SP  
Fitri Kusumayanti, M.Si  
Mery Lestari, M.Si  
Baharuddin, M.Si

PERAN ORGANISASI SOSIAL  
**TIONGHOA**  
PADA MASYARAKAT  
KOTA SINGKAWANG



Balai Pelestarian  
Nilai Budaya Pontianak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PERAN ORGANISASI SOSIAL TIONGHOA PADA MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG

Penulis:

**Samsul Hidayat, M.A**

**Nur Iskandar, SP**

**Fitri Kusumayanti, M.Si**

**Mery Lestari, M.Si**

**Baharuddin, M.Si**

Layout & Desain Cover:

**Fahmi Ichwan**

Dietrbitkan oleh STAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)

Bekerjasama dengan

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PONTIANAK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

STAIN Pontianak Press

Jalan Letjend. Soeprapto No. 19 Telp./Fax. 0561-734170

Pontianak, Kalimantan Barat

ISBN: 978-602-7942-11-0

Cetakan Pertama, Desember 2012

xii + 151 : 160 mm x 240 mm

# Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi organisasi sosial Tionghoa pada masyarakat kota Singkawang. Penelitian ini dapat dikatakan sangat signifikan bagi persoalan keberagaman Indonesia, terutama dengan melihat lebih dekat bagaimana bentuk dan fungsi organisasi sosial Tionghoa di Kota Singkawang dan bagaimana implikasi peran organisasi sosial Tionghoa dalam membangun dan menjaga kekuatan multikulturalisme di Kota Singkawang?.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kota Singkawang. Fokus penelitian ini adalah peran dan fungsi organisasi sosial etnik Tionghoa di Singkawang. Data-data diambil dari pihak yang berhubungan langsung dengan maksud penelitian dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai fungsi organisasi sosial Tionghoa. Data dikumpulkan dengan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam (*indept-interview*).

Hasil penelitian membuktikan bahwa bentuk-bentuk

organisasi sosial etnik Tionghoa di Singkawang memiliki fungsi yang beragam berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat seperti pada kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan budaya. Beberapa organisasi sosial Tionghoa yang saat ini masih eksis di Kota Singkawang diantaranya: Majelis Tridharma, Majelis Tao Indonesia, Persatuan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya (Permasis), Forum Komunikasi Etnis Tionghoa (Foket), Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Yayasan Kematian, Yayasan Pemadam Kebakaran, Yayasan Tzu Chi, dan lain-lain.

Peran organisasi sosial etnik Tionghoa di Kota Singkawang bersifat luas dan multietnik. Artinya bantuan dan layanan yang mereka berikan tidak hanya berhubungan dengan kepentingan etnik Tionghoa semata, namun juga memberikan bantuan dan layanan bagi masyarakat luas, terlepas dari ikatan etnik dan agama. Peran dan fungsi sosial yang kosmopolit dan multikultural ini menjadikan eksistensi organisasi etnik Tionghoa begitu diharapkan oleh sebagian masyarakat Kota Singkawang. Sebut saja misalnya organisasi pemadam kebakaran yang selalu siaga selama dua puluh empat jam menjaga keamanan masyarakat dari bencana kebakaran, begitupun dengan Yayasan seperti Permasis dan Tzu Tci yang terus mengabdikan organisasinya kepada pelayanan sosial masyarakat yang membutuhkan terutama di bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Sementara organisasi sosial keagamaan Tionghoa senantiasa menjaga kekuatan multikulturalisme di Kota Singkawang dengan menghadirkan sebuah mozaik keragaman agama dan budaya melalui perayaan Cap Go Meh dan ritual tatung yang memadukan aspek ritual dan budaya dalam sebuah kemasan pariwisata yang mendatangkan banyak keuntungan sosial ekonomi tidak hanya bagi komunitas Tionghoa tapi pada masyarakat Kota Singkawang secara luas.

# KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillah peneliti haturkan pada Allah SWT, *Rabb* penguasa semesta alam, atas setiap untaian karunia dan nikmat-Nya, sehingga penelitian yang berjudul “Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang” ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penelitian ini dapat diselesaikan sesuai jadwal berkat bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada segenap pengurus dan anggota Majelis Tridharma Singkawang, Majelis Tao Indonesia resort Singkawang, Persatuan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya (Permasis), Forum Komunikasi Etnis Tionghoa (FOKET), Yayasan Pemadam Kebakaran, Yayasan Kematian, Yayasan Tzu Chi dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Singkawang serta masyarakat kota Singkawang yang memberikan informasi sesuai keperluan penelitian.

Terkhusus kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya

Pontianak Wilayah Kalimantan, Bapak Drs. Salmon Batuallo yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian yang diharapkan dapat berkesinambungan. Begitupun ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ikhsan, S.Sos selalu Kepala TU BPNB Pontianak dan Bapak Dr. Yusriadi yang telah mempercayakan penelitian ini kepada tim untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pontianak, 11 Desember 2012

**Samsul Hidayat dan Tim**

## KATA PENGANTAR

# KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PONTIANAK

**D**engan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik penerbitan buku "*Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang*" sebagai pelaksanaan kegiatan Penelitian Perlindungan Ekspresi keragaman Budaya yang dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBNP tahun 2012 pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.

Hasil penelitian tentang *Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang* merupakan bagian dari upaya pemertahanan kebudayaan Kalimantan Selatan yang karena adanya pengaruh globalisasi dan berbagai kontak budaya telah mengalami perubahan dan pergeseran, sehingga perlu dilakukan upaya dokumentasi dan publikasi *Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang*.

Dengan selesainya penelitian dan terbitnya buku ini maka upaya dokumentasi Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang, telah kita wujudkan, sehingga diharapkan nantinya dapat dipublikasikan dan



disebarluaskan sebagai bahan bacaan, penambah referensi bagi berbagai kalangan yang memerlukan.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Kepala Balai Pelestarian  
Nilai Budaya Pontianak,



Drs. Salmon Batuallo  
NIP. 19620614 199303 1 001

# SAMBUTAN DIREKTUR

## PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**D**engan senang hati saya menyambut baik terbitnya buku “ PERAN ORGANISASI SOSIAL TIONGHOA PADA MASYARAKAT KOTA SINGKAWANG” sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Perlindungan Ekspresi keragaman Budaya yang dibiayai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBNP tahun 2012 yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.

Dengan terbitnya buku ini maka bukan saja upaya kita untuk mendokumentasikan Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang dapat terwujud. Selain itu, pada berbagai Peran Organisasi Sosial Tionghoa pada Masyarakat Kota Singkawang yang mencerminkan adanya interaksi atau dialektika antara agama dan budaya yang terjalin melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi merupakan bahan inspirasi bagi kita semua betapa pentingnya memahami keanekaragaman budaya serta mengedepankan semangat toleransi di tengah-tengah hubungan antar suku dan budaya di Nusantara yang serba bhinneka. Adanya pemahaman

dan saling pengertian di tengah keragaman itu merupakan landasan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penerbitan buku ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah – mudahan buku ini bermanfaat untuk pelestarian budaya lokal khususnya bagi masyarakat Kalimantan Barat, dan dapat membantu dalam usaha pengembangan budaya nasional pada umumnya.

Jakarta, Desember 2012

Direktur,



**Drs. GENDRO NURHADI, M.Pd**

NIP. 19540125 198503 1 001

# DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PENGANTAR KEPALA BPNSP.....	vii
SAMBUTAN DIREKTUR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Teori .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	12
BAB II: GAMBARAN UMUM KOTA SINGKAWANG ....	17
A. Kota Amoy, Kota Seribu Vihara .....	17
1. Letak Geografis.....	17
2. Kependudukan .....	21
3. Pendidikan .....	24
B. Peta Agama dan Etnik Masyarakat Singkawang.	26
C. Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Tionghoa Singkawang .....	35

**BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN:**

Peran dan Fungsi Organisasi Tionghoa Singkawang ..	41
1. Majelis Tri Dharma Singkawang.....	42
2. Forum Komunikasi Etnis Tionghoa.....	61
3. Yayasan Pemadam Kebakaran.....	66
4. Yayasan Kematian.....	71
5. Yayasan Tzu Chi.....	75
6. Yayasan Permais.....	82
7. Majelis Agama Khonghucu Indonesia.....	90

**BAB IV BERSEMINYA EMBRIO MULTIKULTURALISME  
DI SINGKAWANG .....** 99

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	121
A. Simpulan... ..	121
B. Saran .....	124

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	125
<b>LAMPIRAN .....</b>	133
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	145

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Eksistensi organisasi sosial Tionghoa di Indonesia termasuk yang paling lama dibandingkan dengan organisasi-organisasi sosial lainnya. Bahkan sejak kedatangan para imigran Tionghoa ke Kalimantan Barat sekitar tahun 1717, komunitas Tionghoa telah memiliki motivasi dan kesadaran di kalangan mereka akan perlunya pendidikan, persatuan dan adanya organisasi yang dapat mengangkat kehidupan mereka. Peranakan Tionghoa yang bernama *Tiong Hoa Hwe Koan* memprakasai pendirian sebuah perkumpulan Tionghoa pada tanggal 17 Maret 1900 di Batavia. Organisasi itu mendirikan sekolah-sekolah modern berbahasa Tionghoa (*Tiong Hoa Hak Tong*) di seluruh Hindia Belanda. Pada saat itu dimulailah masa yang disebut masa kebangkitan etnis Tionghoa di Hindia Belanda, yang kelak akan memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan nasional Indonesia.<sup>1</sup>

---

1 Benny G. Setiono, *Kehancuran dan Kebangkitan Martabat/ Jati Diri Etnis*

Posisi dan peran etnik Tionghoa di Indonesia semakin kuat sejak era reformasi berlangsung. Berbagai organisasi sosial politik, budaya, agama muncul dan berkembang dinamis sehingga memberikan corak dan warna khusus dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak terkecuali di kota Singkawang Kalimantan Barat. Pada saat ini organisasi Tionghoa yang ada di kota Singkawang hampir menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, kesehatan, politik, agama dan budaya.

Beberapa organisasi sosial Tionghoa yang saat ini masih eksis di Kota Singkawang diantaranya: Majelis Tridharma, Majelis Tao Indonesia, Persatuan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya (Permasis), Forum Komunikasi Etnis Tionghoa (Foket), Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Yayasan Kematian, Yayasan Pemadam Kebakaran, Yayasan Tzu Chi, dan lain-lain. Setiap organisasi memberikan peran dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dalam upaya memberikan kiprah dan kontribusinya bagi masyarakat kota Singkawang.

Peran organisasi sosial etnik Tionghoa di kota Singkawang bersifat luas dan multietnik. Artinya bantuan dan layanan yang mereka berikan tidak hanya berhubungan dengan kepentingan etnik Tionghoa semata, namun juga memberikan bantuan dan layanan bagi masyarakat luas, terlepas dari ikatan etnik dan agama. Peran dan fungsi sosial yang kosmopolit dan multikultural ini menjadikan eksistensi organisasi etnik Tionghoa begitu diharapkan oleh sebagian masyarakat kota Singkawang.

Sebagai contoh organisasi pemadam kebakaran yang selalu siaga 24 jam menjaga keamanan masyarakat dari bencana kebakaran. Begitu juga dengan yayasan Permasis dan Tzu Tci yang terus mengabdikan organisasinya kepada pelayanan sosial masyarakat yang membutuhkan terutama dibidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Sementara itu organisasi sosial keagamaan Tionghoa senantiasa menjaga kekuatan multikulturalisme di kota Singkawang dengan menghadirkan

---

*Tionghoa Di Indonesia (Bagian 3 dari 5)*, Indonesia Media Online, <http://www.indonesiamedia.com/lipsus/lipsus-2003-martabatTionghoa3.htm>.)

sebuah mozaik keragaman agama dan budaya melalui perayaan Cap Go Meh dan ritual Tatung. Perayaan tersebut memadukan aspek ritual dan budaya dalam sebuah kemasan pariwisata yang mendatangkan banyak keuntungan sosial dan ekonomi tidak hanya bagi komunitas Tionghoa tapi pada masyarakat kota Singkawang secara luas.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.<sup>2</sup> Sementara organisasi merupakan wadah untuk memberikan pencerahan, arahan dan motivasi baik dalam berusaha maupun melihat kedepan akan tantangan serta tujuan dari sebuah perjalanan hidup baik pengurus maupun pada anggotanya. Sehubungan hal tersebut, maka di dalam organisasi banyak hal yang didapatkan oleh komunitas organisasi karena program kerja yang dirancang merupakan tujuan bersama untuk menjaga eksistensi serta kemajuan menuju yang lebih kedepannya.

Masyarakat akan melihat fenomena kehidupan yang tensinya cukup tinggi dan pemicu konflik etnis yang sangat tinggi, mereka selalu melihat bahwa organisasi berperan untuk memberikan upaya dalam pembentukan kehidupan yang dinamis dan memiliki kemampuan yang sangat besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adapun peran organisasi Tionghoa di Kota Singkawang dapat dilihat dari beberapa aspek dan bidang diantaranya:

#### 1. Bidang Ekonomi

Peran organisasi Tionghoa di kota Singkawang memberikan apresiasi dan perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan bantuan baik bersifat jangka pendek seperti bantuan sembako maupun jangka panjang seperti pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang ekonomi melalui pelatihan usaha

---

2 Fadli dalam Kozier Barbara, *Praktek Keperawatan Profesional*. (Jakarta: EGC, 2008), Hlm. 20.



maupun penempatan kerja.

2. Bakti Sosial

Kegiatan bakti sosial dilakukan baik pada saat normal maupun genting seperti dalam sebuah musibah atau bencana. Pada saat normal aktivitas sosial dapat berbentuk kerja bakti seperti kebersihan lingkungan, program penghijauan, memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu, dan lain-lain.

3. Bidang Pendidikan

Memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan dan perlengkapan alat-alat sekolah.

4. Bidang Kesehatan dan Kematian

Memberikan pelayanan kesehatan ringan sampai berat seperti operasi bagi masyarakat yang membutuhkan baik di rumah sakit yang ada di Kalimantan Barat maupun di Jakarta. Begitupun dalam hal kematian, organisasi Tionghoa di Singkawang memberikan layanan dan bantuan untuk segala urusan kematian mulai dari rumah duka, pengantaran sampai pada penguburan jenazah.

5. Bidang Keagamaan dan Kebudayaan

Organisasi etnik Tionghoa di Singkawang juga berkiprah di dalam bidang ritual keagamaan dan kebudayaan seperti memberikan pengayoman kepada komunitas tatung dan membantu pemerintah di dalam menciptakan kondisi kerukunan di masyarakat dalam sebuah festival budaya dan agama yang eksotik dan mengagumkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menjadi sebuah studi yang menarik jika dikaitkan dengan bagaimana peran dan fungsi organisasi sosial Tionghoa yang ada di kota Singkawang untuk mengaplikasikan makna entitas dan identitas etnis Tionghoa sebagai sebuah komunitas yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dengan organisasi-organisasi etnik dan agama lainnya yang ada di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah peran organisasi Tionghoa di kota Singkawang. Masalah umum tersebut dirumuskan dalam bentuk sub masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan fungsi organisasi sosial Tionghoa di kota Singkawang?
2. Bagaimana implikasi peran organisasi sosial Tionghoa dalam membangun sumber daya manusia dan menjaga kekuatan multikulturalisme di kota Singkawang?.

## **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritik**

Memberikan informasi tentang peran dan fungsi organisasi Tionghoa di kota Singkawang, bentuk kehidupan sosial dan budaya etnik Tionghoa, serta implikasi makna entitas dan identitas etnis Tionghoa sebagai sebuah komunitas yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dengan organisasi-organisasi etnik dan agama lainnya yang ada di Indonesia.

### **2. Manfaat Aplikatif**

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat Tionghoa tentang permasalahan sosial kemasyarakatan dalam melihat peran organisasi Tionghoa yang ada sehingga dapat memberikan kekuatan serta persatuan yang mengedepankan solidaritas tinggi terhadap sesamanya.
- b. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang peran organisasi Tionghoa yang ada di kota Singkawang dalam menciptakan kerukunan serta kemampuan bertahan baik dalam kehidupan ekonomi, budaya dan politik.
- c. Memberikan kajian terhadap masyarakat Tionghoa akan peran organisasi yang ada terhadap keberadaan kehidupan bermasyarakat yang baik dalam masyarakat plural yang mengedepankan sikap multikulturalisme.

## D. Kerangka Teori

### 1. Memahami Konsep Struktur dan Fungsi

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsionalisme struktural (*structural-functionalism*). Objek analisa sosiologisnya seperti peranan sosial dan proses sosial. Perspektif ini ingin melihat pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain, dan beranggapan bahwa semua peristiwa atau struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Sementara masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai struktur, dan bagian dari masyarakat itu diinterrelasikan dalam suatu cara yang tidak serampangan, tetapi di dalam pola dan relasi yang ada keteraturannya. Dengan kata lain masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaiknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.

Struktur menekankan pada hal yang tetap, baku dan relatif tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama pula. Sementara fungsionalisme sangat menekankan sistem, keseimbangan, adaptasi, *maintance*, dan *latency*.<sup>33</sup> Struktur harus dibedakan dengan ciri suatu sistem. Artinya walaupun struktur memiliki pengertian keseimbangan yang stabil dalam arti kata statis (*static*) tetapi bergerak (*moving*). Ketika hubungan antarstruktur dan berbagai proses di dalamnya terjadi, pada dasarnya sistem berada dalam keadaan yang relatif stabil. Sistem akan cenderung menjaga sifat-sifat yang seimbang, ketika terjadi hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Dan keadaan yang secara relatif tidak berubah inilah yang biasa disebut dengan struktur. Faktanya, sistem akan selalu berubah, tergantung pada sumber daya yang mampu berkesinambungan dalam sebuah proses, dan stuktur bisa saja akan berubah karena proses stabilitas atau

---

3 Talcolt Parsons, "A Functional Theory of Change" dalam Amitai Etzoini and Eva Etzoini Haley (eds.), *Social Change: Sources, Patterns and Consequence* (New York: Basic Book Inc, 1973), hlm. 72-86.

proses penyeimbangan berlawanan arti dengan istilah *processes* yang digunakan dalam konteks perubahan struktural.<sup>44</sup> Gagasan mengenai “fungsi” berguna agar dapat terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis. Cara bekerjanya adalah terlebih dahulu menganalisis sistem struktur yang bersangkutan sehingga jelas unsur-unsur pembentukannya dan kemudian diikuti oleh penjelasan fungsi di dalam keseluruhan sistem sebagai satu kesatuan tujuan-tujuan dan kemungkinan perubahan yang terjadi.

Teori fungsionalisme struktural merupakan salah satu karya terbesar Talcott Parson, teori ini mengangkat empat fungsi bagi semua sistem “tindakan”, yang sering dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*). Menurut Parson, suatu sistem baru akan dapat bertahan jika telah memiliki empat fungsi tersebut. *Pertama*, fungsi adaptasi merupakan suatu kondisi pada sebuah sistem harus dapat menyesuaikan diri dari lingkungan sekitar dan harus dapat menanggulangi situasi luar yang rumit. *Kedua*, fungsi pencapaian tujuan, sistem harus menetapkan tujuannya dan mengerahkan sumber dayanya guna mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*, fungsi integrasi, sistem harus mampu mengendalikan dan mengelola antarhubungan bagian yang menjadi komponennya. Dan *keempat*, *fungsi pemeliharaan pola*, sistem melakukan pemeliharaan dan perbaikan pola dengan tujuan memotivasi suatu tindakan.<sup>55</sup>

Dalam hubungan dengan struktur sistem sosial, bagi Talcott Parson,<sup>66</sup> struktur merupakan salah satu dari beberapa sistem empirik yang memiliki unit-unit, dan hubungan-hubungan terpola diantara unit-unit tersebut. Sebagai contoh peranan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu partisipasi merupakan suatu contoh unit kecil dalam suatu sistem sosial. Hubungan

---

4 Hari Poerwanto, *Orang Tionghoa Khek dari Singkawang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 26.

5 George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Mulia, 2004), hlm. 121-122.

6 Talcott Parsons, *A Functional*, hlm.74.

yang terjadi dapat berbentuk interaksi resiprositas yang berpola, masing-masing orang dapat berperan sebagai pelaku bagi yang lainnya. Jika dirunut sebagai pelaku, mereka bisa disebut sebagai unit orientasi, namun jika dirunut sebagai obyek maka mereka dapat dianggap sebagai unit *modality*.

Radcliffe Brown<sup>77</sup> menjelaskan bahwa struktur sosial mencakup dua hal. *Pertama*, hubungan-hubungan sosial antarindividu, (dalam hal ini antara *tatung* dan klien atau masyarakat pengguna jasa). *Kedua*, perbedaan-perbedaan individu-individu dan kelas-kelas masyarakat yang muncul dari perbedaan peran sosial mereka. Misalnya perbedaan kedudukan dan peran sosial dalam sebuah organisasi Tionghoa di kota Singkawang. Yang pertama menyangkut rangkaian hubungan-hubungan nyata antarsatu organisasi dengan organisasi lainnya, dan yang kedua menyangkut hubungan peran masing-masing organisasi. Selanjutnya dari hubungan-hubungan yang beragam ini diabstraksikan dalam suatu bentuk yang umum atau menyusun pola-pola umum dari berbagai hubungan yang terjadi. Abstraksi inilah yang disebut Brown sebagai bentuk struktural (*structural form*).

Salah satu bagian dalam teori adalah fungsionalisme struktural adalah teori stratifikasi struktural fungsional, yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki stratifikasi fungsi yang mengacu pada kedudukan atau sistem posisi seseorang dan pengaruhnya pada orang lain.<sup>88</sup> Posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Kedudukan yang lebih tinggi biasanya akan dihargai dalam bentuk hadiah atau *reward* dengan harapan agar pemilik posisi tinggi tadi mampu bekerja maksimal dan memenuhi tuntutan orang yang dibawahnya. Jika ada kritik yang mengatakan bahwa teori ini hanya akan melanggengkan orang yang memiliki posisi

---

7 A. R. Radcliffe Brown, *Structure and Function in Primitive Culture, Essays and Addresses* (London and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 191-192.

8 George Ritzer, *Teori Sosiologi*, hlm.118.

istimewa,<sup>9</sup> maka dalam penelitian tentang *tatung* ini, kedudukan tinggi justru diberikan tanpa ada tekanan, karena masyarakat telah terikat dan membutuhkan peran-peran komunitas tinggi tersebut.

## 2. Peranan Organisasi

### a. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah suatu badan yang terbentuk karena adanya usaha sadar dalam memberikan persatuan dan kesatuan dari kelompok yang memiliki paradigma sama serta tujuan hidup.

### b. Peran Sebuah Organisasi

Peran sebuah organisasi dalam masyarakat dapat memberikan suatu pencerahan dalam menjalankan kehidupan serta mengarahkan manusia untuk komunikasi serta berinteraksi dengan baik. Menurut Soejono Soekanto (2002:73) menyatakan bahwa bentuk interaksi sosial dalam hal kerja sama (*cooperation*) adalah menggambarkan bahwa munculnya kerja sama itu didasarkan karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (yaitu *in-group*-nya) dan kelompok lain (yang merupakan *out-group*-nya). Kerja sama akan bertambah kuat ketika ada gangguan dari luar yang menyinggung kesetiaan secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolongan orang. Kerja sama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu yang lama mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas, karena keinginan-keinginan pokoknya tidak dapat terpenuhi oleh karena adanya rintangan-rintangan yang bersumber dari luar kelompok itu.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.<sup>10</sup>

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi

---

9 *Ibid.*, hlm.120.

10 J. Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 9.

masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Semua organisasi sosial bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan di Indonesia bersama dengan pemerintah dalam rangka melaksanakan usaha kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Semua organisasi sosial yang berdiri memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. sebagai patner pemerintah yang menangani masalah kesejahteraan sosial secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip “swadaya, swadana, dan sebuah usaha,
- b. sebagai motivator dan transistor serta dinamis partisipasi sosial masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Menurut Summer lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga sosial mempunyai fungsi bagi kehidupan sosial.

Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok,
- b. menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan,
- c. memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku para anggotanya.

Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal/ resmi dan informal.

### **1. Organisasi Formal/ Resmi**

Organisasi formal/resmi adalah organisasi yang dibentuk

oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya, serta memiliki kekuatan hukum. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal adalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas.

## 2. Organisasi Informal

Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan.

Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder menurut Hicks:

- a. organisasi primer, organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu.
- b. organisasi sekunder, organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-



alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gajinya.

Menurut Soejono Soekanto (2002:74-75) ada lima bentuk sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, yaitu:

1. kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong,
2. *bargaining* yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
3. kooptasi (*co-optation*), yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegonjangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
4. koalisi (*coalition*), yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif.
5. *joint-ventrue*, yaitu kerja sama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya, pemboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, dan seterusnya.

#### E. Metodologi Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang suatu masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang harus dirumuskan.

Menurut Bogdan dan Taylor;<sup>11</sup>

“Pendekatan kualitatif adalah adalah prosedur penelitian

---

11 Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 120.

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data data tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dari orang orang yang yang menjadi objek penelitian”.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini karena beberapa pertimbangan; a) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ganda, b) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, dan c) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>12</sup> Oleh karena analisa kualitatif lebih menekankan kepada data,<sup>13</sup> maka untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul sehingga dapat disajikan dalam suatu susunan yang sistematis. Proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang masuk akan dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub pokok bahasan dalam rumusan masalah untuk kemudian diolah dan dimaknai.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nawawi (1991: 63) menyatakan bahwa, metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2005: 234) menjelaskan bahwa: Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Jadi segala kejadian yang ada pada saat itu dipaparkan di dalam penelitian tanpa ada rekayasa sedikitpun.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa deskriptif adalah pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan yang menggambarkan subjek penelitian sebagaimana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>13</sup> Bambang Suparyogo dkk, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: Grafi-ka, 2001), hlm. 75.

adanya.

Alasan peneliti mengambil metode ini, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki suatu keadaan sebagaimana adanya berdasarkan data-data yang dikumpulkan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan. Mengingat data yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah merupakan informasi yang terjadi saat sekarang.

Penelitian ini menggunakan *paradigma fakta sosial*, yaitu paradigma yang berangkat dari realitas (segala sesuatu) yang menjadi obyek penelitian, realitas dipahami melalui fakta yang terjadi tanpa adanya spekulasi. Salah satu tipe dari fakta sosial adalah struktur sosial (*social structure*). Penelitian lapangan ini dilakukan di kota Singkawang Kalimantan Barat. Fokus penelitian ini adalah organisasi sosial Tionghoa yang ada di kota Singkawang. Data-data diambil dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini seperti, beberapa pengurus organisasi sosial yang ada berdasarkan jenis organisasi dan perannya masing-masing.

Arikunto,<sup>14</sup> sumber data adalah “Subjek dari mana data diperoleh”. Apabila peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa orang, benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, apabila menggunakan dokumentasi maka sumber datanya bisa berupa arsip, buku dan teori-teori.

Di dalam memilih informan, peneliti akan melakukan penyeleksian berdasarkan beberapa pertimbangan; seorang informan merupakan bagian dari komunitas yang diteliti; saat penelitian dilakukan, informan sedang terlibat dalam kegiatan yang diteliti; informan memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan peneliti; memiliki waktu yang cukup untuk proses wawancara; dan tidak memilih informan yang cenderung akan memberikan informasi analitis di luar kerangka berfikir

---

14 Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 105.

kebudayaannya.<sup>15</sup>

Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth-interview*). Pengamatan dilakukan secara murni, dalam arti peneliti hanya mengamati tanpa melibatkan diri dalam aktivitas ritual yang berlangsung.<sup>16</sup> Namun demikian, peneliti tetap dapat menafsirkan fenomena budaya yang ditemukan, tanpa berusaha memanipulasi dan mengontrolnya, dan lebih menekankan *logic in action*.<sup>17</sup> Selain dari informan yang disebutkan di atas, karena penelitian ini berhubungan dengan organisasi sosial, maka peneliti juga akan mewawancarai pihak-pihak yang menggunakan pelayanan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis sebagai model telaah budaya.<sup>18</sup> Dengan studi lapangan, peneliti akan mengerjakan semua proses penelitian dan terlibat langsung dalam proses tersebut. Di lapangan, rumusan penelitian bisa saja akan berubah jika ditemukan perbedaan dari data yang diharapkan, atau sebaliknya justru akan menemukan masalah-masalah lain yang lebih menarik untuk dikaji.<sup>19</sup> Tahapan analisis data dimulai dengan mengulas catatan lapangan untuk menemukan kemungkinan adanya simbol-simbol tertentu dari masyarakat yang diteliti. Dari data lapangan dibuat hipotesa-hipotesa yang terus diuji melalui data-data baru yang diperoleh,

---

15 Bambang Hidayana, "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Etnografi", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 2 September-Desember 1992, hlm. 76.

16 Irwan Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hand out (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM, 2002), hlm. 25.

17 Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 32.

18 James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 90.

19 James Fox, "Dimensi Waktu dalam Penelitian Sosial: Suatu Studi Kasus di Pulau Roti" dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson (eds.) *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 54.

untuk selanjutnya dianalisis kembali sampai pada akhir penelitian.<sup>20</sup> Beberapa jenis analisis sosiologis akan diterapkan sesuai dengan kepentingan penelitian.

---

<sup>20</sup> Bambang Hidayana, *Pengumpulan*, hlm. 21.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana peran organisasi sosial Tionghoa pada masyarakat di Kota Singkawang, pertama-tama perlu diketahui gambaran secara umum Kota Singkawang sebagai lapangan penelitian. Uraian difokuskan pada sejarah berdirinya Kota Singkawang yang meliputi letak geografis, kependudukan dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, pada topik ini dideskripsikan peta agama dan etnik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa Singkawang.

### A. Kota Amoy, Kota Seribu Vihara

#### 1. Letak Geografis

Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kabupaten Sambas (UU. Nomor : 27 Tahun 1959) dengan status kecamatan Singkawang. Tahun 1981, kota ini menjadi kota administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Kota ini juga pernah diusulkan menjadi kotamadya daerah tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran kabupaten

Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom. Namun, kotamadya daerah tingkat II Singkawang belum disetujui oleh pemerintah pusat, waktu itu hanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang disetujui sehingga wilayah kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (UU Nomor: 10 Tahun 1999), sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

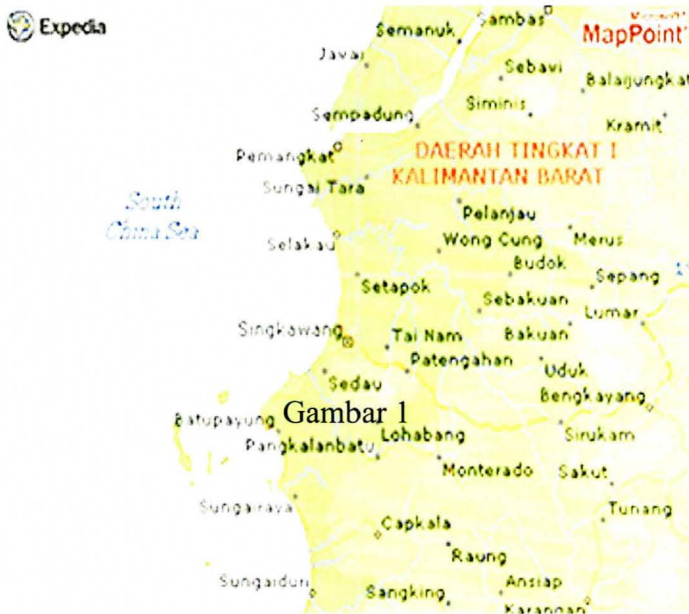
Perjuangan panjang masyarakat Singkawang untuk menjadikan kota Singkawang menjadi daerah otonom, dilakukan oleh semua elemen masyarakat seperti : Kelompok Peduli Singkawang (KPS), Gerakan Pendukung Pemerintahan Kota Singkawang (GPPKS), Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Singkawang (Gemmas), DPD KNPI Kota Singkawang dan Bengkayang, Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM), Tim Sukses, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Para RT, PKK dan organisasi lainnya memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Sambas. Setelah melalui penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh gubernur Kalimantan Barat maupun Tim Pemekaran Kabupaten Sambas yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama antara bupati Sambas dan bupati Bengkayang No. 257 Tahun 1999 dan No. 1a Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, serta pengkajian dari Tim CRAIS, Badan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya Singkawang terwujud menjadi Daerah Otonom. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Singkawang, diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kota Singkawang merupakan salah satu bentuk pemerintahan kota di Kalimantan Barat setelah pemerintahan Kota Pontianak. Kota tersebut terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, dengan luas wilayah 504 km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah Kota Pontianak. Letak geografis Kota

Singkawang pada 0°44'55,85"-01°01'21,51" Lintang Utara dan 108°51'47,6"-109°10'19" bujur Timur.

Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah :

- Utara : Kabupaten Sambas.
- Selatan : Kabupaten Bengkayang.
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna.



**Distrik Kota Singkawang** (sumber Expedia)

Kota Singkawang terdiri dari lima kecamatan, dengan luas wilayah 50.400

(ha) atau sekitar 0,34 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan (22.448 ha atau 44,54 persen) dan terkecil adalah kecamatan Singkawang Barat (1.504 ha atau 2,98 persen) dari wilayah kota.

Jika dilihat dari segi geografis, Kota Singkawang merupakan kota yang cukup strategis untuk pengembangan sektor



ekonomi, khususnya di bidang perdagangan. Pada abad 17, Kota Singkawang menjadi tempat persinggahan para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Dengan penduduk mayoritas Tionghoa, yang umumnya bergerak di bidang perdagangan, kota ini bisa menjadi daya tarik bagi para pedagang besar dan pedagang kecil dari wilayah lain.

Selain itu, dengan menitikberatkan pada sektor perdagangan, Kota Singkawang di masa lalu pernah menjadi koloni Cina, dalam hal ini kongsi-kongsi penambang emas berkuasa, dengan Monterado sebagai pusat kekuasaan yang seakan-akan Singkawang menjadi *hinterland*-nya. Monterado menjadi pusat sejarah bagi kedatangan orang Tionghoa di Kalimantan Barat yang dimulai sekitar tahun 1740, walaupun sumber-sumber Cina mengatakan bahwa pada masa Dinasti Tang (618-907) telah menyebut Borneo dalam ekspansinya.

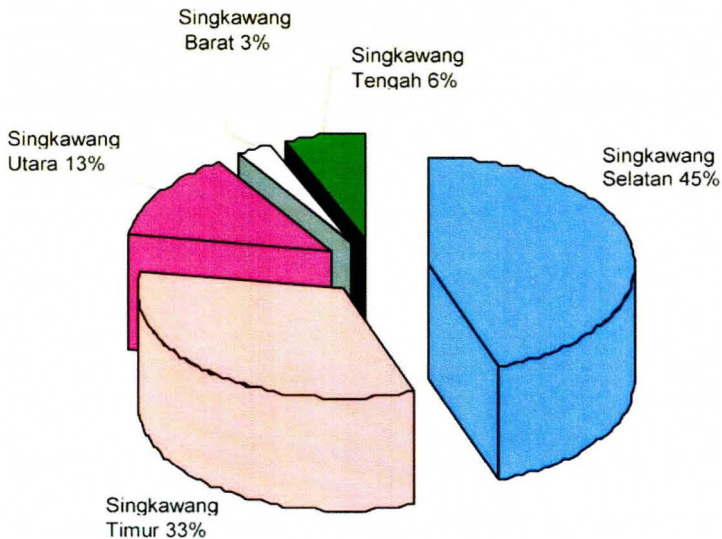
Migrasi orang Tionghoa ke Kalimantan Barat sebagian besar adalah dari suku Hakka yang berasal dari daerah Fujian dan Guangdong yang bekerja sebagai penambang emas. Sekitar akhir abad 18, orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat telah mencapai 40.000 lebih yang melebihi populasi orang Melayu itu sendiri. Mereka yang bekerja sebagai penambang membayar pajak kepada Sultan Sambas, sampai pada akhirnya mereka mendirikan kongsi-kongsi sebagai sebuah konfederasi atau persyarikatan. Beberapa kongsi yang tercatat seperti Heshun Zongting (Harmonious Submission) pada tahun 1776 di Monterado, Lanfang Kongsi Zongting (Virtuous Orchid) pada tahun 1777 yang didirikan di daerah Mandor.

Menurut Bingling, setiap Kongsi memiliki pemerintahan dan undang-undang sendiri, memiliki wilayah teritori dan pemimpinnya masing-masing, termasuk penegakan hukum dan tentara reguler.

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah daratan dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah daratan mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sementara bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sementara di Singkawang Utara terdapat wilayah pegunungan

dan perbukitan.

Gambar di bawah ini menunjukkan prosentase luas wilayah kecamatan di Kota Singkawang, yakni Singkawang Timur 33 %, Singkawang Selatan 45 %, Singkawang Utara 13 %, Singkawang Barat 3 % dan Singkawang Tengah 6 %.



**Gambar 2**

**Persentase Luas Kota Singkawang Menurut Kecamatan Tahun 2007** (Sumber BPS Kota Singkawang 2008)

**2. Kependudukan**

Berdasarkan data sensus penduduk 2009, jumlah penduduk kota Singkawang sebanyak 182.694 jiwa, terdiri dari 96.706 laki-laki dan 85.989 perempuan, dengan kata lain perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) sebesar 1,12 persen. Pada Tahun 2007 penduduk Kota Singkawang sebanyak 176.895 jiwa, terdiri dari 91.835 laki-laki dan

85.060 perempuan. Data Badan Pusat Statistik terakhir tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Singkawang adalah 223.412 jiwa.

Penyebaran penduduk di Kota Singkawang terlihat tidak merata, dalam hal ini penduduk yang berada di dua kecamatan yakni Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Kecamatan lainnya berpenduduk jarang. Perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah kota Singkawang adalah 351 orang per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Singkawang Barat yakni 2.703 orang per km<sup>2</sup>, disusul Singkawang Tengah 1.886 orang per km<sup>2</sup>, kemudian Singkawang Utara 362 orang per km<sup>2</sup>, Singkawang Selatan 178 orang per km<sup>2</sup> dan Singkawang Timur 115 orang per km<sup>2</sup>. Dilihat dari kepadatan penduduk perdesa, kepadatan tertinggi juga terjadi di Kecamatan Singkawang Barat dengan kepadatan 12.202 orang per desa/kelurahan. Namun, jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Roban (27.103 jiwa) Kecamatan Singkawang Tengah dan Desa Sedau (25.848 jiwa) Kecamatan Singkawang Selatan.

Kecamatan	Desa	Luas (KM)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk per desa	Kepadatan penduduk per km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Singkawang Selatan	4	224,48	39.917	9.979	178
2.Singkawang Timur	5	166,26	19.100	3.820	115
3.Singkawang Utara	7	66,65	21,016	3.002	315
4.Singkawang Barat	4	18,06	48,809	12.202	2.703
5.Singkawang Tengah	6	28,55	53.852	8.975	1.886
Jumlah					
2009	26	504	182.694	7.027	362
2008	26	504	178.939	6.882	355
2007	26	504	175.263	6.741	351

Tabel 1

**Banyaknya Desa, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk**  
(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Singkawang 2010)

Tabel di atas menunjukkan terjadinya prosentase kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di kota Singkawang. Jika pada pada tahun 2007 jumlah penduduk mencapai 175.263 jiwa, maka tahun 2008 mengalami peningkatan jumlah hingga 178.939 jiwa. Pada tahun 2009 jumlah penduduk kota Singkawang adalah 182.694 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk kota singkawang mencapai sekitar 223.412 jiwa.<sup>1</sup>

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
0-4	9.418	9.397	18.815
5-9	10.177	8.199	18.376
10-14	11.320	8.307	19.627
15-19	10.357	9.386	19.743
20-24	8.937	9.620	18.557
25-29	7.204	8.030	15.234
30-34	6.520	6.472	12.992
35-39	5.283	5.026	10.309
40-44	5.927	4.788	10.715
45-49	4.354	4.333	8.687
50-54	3.724	2.860	6.584
55-59	2.763	2.478	5.241
60-64	2.365	2.233	4.598
65-69	1.561	1.424	2.985
70-74	854	1.289	2.143
75 +	1.071	1.218	2.289
Jumlah 2009	96.706	85.988	182.694
2008	94.374	84.565	178.939
2007	92.098	83.165	175.263

Tabel 2  
**Banyaknya penduduk menurut kelompok umur di kota Singkawang**  
 (Sumber : BPS Kota Singkawang Dalam Angka 2009)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk dalam kategori usia produktif (16-50 tahun) pada tahun 2009 berjumlah

1 Badan Pusat Statistik, *Kota Singkawang dalam Angka 2008* (BPS: Singkawang, 2009), hlm. 43.

182.694 jiwa atau 68,04 % dari jumlah penduduk, sementara sisanya adalah usia non produktif yang terdiri dari anak-anak usia sekolah dan usia lanjut. Dengan demikian, penduduk Kota Singkawang merupakan salah satu potensi yang mendukung pembangunan, karena berdasarkan struktur penduduknya sebagian besar adalah penduduk yang berusia produktif.

### 3. Pendidikan

Jumlah usia produktif yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur pembangunan di Kota Singkawang bersinergi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Tujuan pendidikan antara lain, adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat kota Singkawang, jumlah lembaga pendidikan dan animo masyarakat untuk memasuki dunia pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang memasuki dunia pendidikan, sejak SD hingga perguruan tinggi tergambar dalam tabel berikut ini.

Tingkat Pendidikan					
TK	SD	SLTP	SLTA/SMK	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.953	28.095	10.053	7.979	1.052	49.133

Tabel 3  
**Banyaknya Penduduk 5 Tahun Keatas  
 Menurut Tingkat Pendidikan  
 Di Kota Singkawang 2009/2010**  
 (Sumber: Kota Singkawang Dalam Angka 2010)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk kota Singkawang, yang terbesar adalah berpendidikan setingkat sekolah dasar sebanyak 28.095 jiwa. Jumlah usia sekolah pada tingkat SLTP di lima kecamatan di kota Singkawang sebanyak 10.053 jiwa. Sedangkan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan SMK yakni sebanyak 7.979 orang dan berikutnya adalah perguruan tinggi sebesar

1.052. Relevansi pengumpulan data mengenai penduduk menurut usia dan tingkat pendidikan dengan penelitian ini adalah untuk menghubungkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi di Kota Singkawang.

Menurut data Dinas Pendidikan Kota Singkawang tahun 2009/2010, jumlah siswa usia sekolah berdasarkan tabel di atas bersinergi dengan jumlah sarana dan prasarana pendukung pendidikan. Jumlah taman kanak-kanak sebanyak 36 unit, guru 192 orang dan murid berjumlah 1.953 orang. Jadi, rasio murid dibanding sekolah adalah 1:55. Artinya 1 unit sekolah berisi 55 murid, sedangkan rasio guru 1:10 artinya 1 orang guru mengurus 10 orang siswa TK. Sedangkan jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 98 unit, guru 1.537 orang dan murid 28.095 orang. Rasio murid dibanding sekolah 287:1 dan rasio murid terhadap guru adalah 19:1.

Selanjutnya, data dinas pendidikan menunjukkan bahwa jumlah unit SLTP sebanyak 45, guru 725 orang, murid 10.053 orang, rasio murid dibanding sekolah 224:1, rasio guru dan murid adalah 1:14. Jumlah sekolah SLTA sebanyak 22 unit dengan jumlah guru sebanyak 442 orang, murid 4.659 orang. Jumlah SMK sebanyak 9 unit dengan jumlah guru sebanyak 227, murid 3.320. Selain itu, jumlah perguruan tinggi di Kota Singkawang pada tahun 2009 tercatat 5 unit, empat di antaranya merupakan sekolah tinggi dan 1 akademi. Dari jumlah tersebut tiga perguruan tinggi berada di Kecamatan Singkawang Barat, satu sekolah tinggi di Singkawang Utara, dan satu akademi di Kecamatan Singkawang Barat. Jumlah tenaga pengajar/dosen 117 orang dan rasio mahasiswa terhadap perguruan tinggi 347, dan rasio mahasiswa terhadap dosen 1:16.

Berdasarkan data tersebut, animo masyarakat untuk memasuki dunia pendidikan cukup tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor pendukung tingkat pencapaian jumlah siswa dan mahasiswa. Animo masyarakat untuk memasuki dunia pendidikan tidak saja dilakukan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Singkawang, tetapi sebagian masyarakat menempuh pendidikan di luar kota Singkawang, misalnya di kota Pontianak, Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Kondisi ini berpengaruh cukup signifikan dalam pencapaian tingkat

kehidupan yang lebih baik di kota Singkawang, selain menjadi faktor pendukung pembangunan di Kota Singkawang.

## B. Peta Agama dan Etnik Masyarakat Singkawang

Pemerintah Kota Singkawang memberi perhatian yang serius kepada keberlangsungan kerukunan antarumat beragama. Hal ini ditunjukkan berupa apresiasi terhadap masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pemberian kebebasan menjalankan ibadah tercermin dari banyaknya tempat ibadah yang didirikan di Kota Singkawang. Jumlah tempat ibadah yang didirikan tergambar dalam tabel berikut ini:

Kecamatan	Islam		Kristen Protestan		Kristen Katolik		Hindu	Buddha	
	Mesjid	Surau	Gereja	Pos Peng-Injil	Gereja	Kapel	Pura	Vihara	Cetya
Singk. Selatan	28	11	27	0	5	0	-	7	75
Singk. Timur	12	3	16	0	12	3	-	1	21
Singk. Utara	22	15	-	0	-	0	-	1	34
Singk. Barat	14	18	20	0	5	4	-	8	114
Singk. Tengah	39	20	9	0	4	0	-	2	46
Jumlah	115	67	72	0	26	7	-	19	290

Tabel 4

### Jumlah Rumah Ibadah menurut Jenisnya di Kota Singkawang tahun 2009

(Sumber: Kota Singkawang dalam Angka Tahun 2010)

Berdasarkan tabel tersebut, rumah ibadah untuk umat Islam di Kota Singkawang sebanyak 115 mesjid dan 67 surau yang terdapat di lima kecamatan. Pemeluk agama Kristen Protestan memiliki 72 Gereja dan 10 pos penginjil. Pemeluk agama Kristen Katholik memiliki 26 Gereja dan 7 kapel. Pemeluk agama Buddha memiliki 19 Vihara dan 290 Cetya.<sup>2</sup>

2 Anonim, *Kota Singkawang dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2010. Jika dilihat dari jumlah tempat ibadah yang ada di kota Singkawang, jumlah Vihara dan Cetya cukup besar. Hal ini menunjukkan

Menurut data Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan agama pada tahun 2010, penduduk yang beragama Islam berjumlah 48,48%, sementara pemeluk Kristen 4,94%, umat Katolik berjumlah 7,62%, pemeluk agama Hindu 0,04%, pemeluk agama Buddha 38,62%, dan yang masuk kategori agama selain 5 agama sebelumnya berjumlah 0,26%. Data dari Departemen Agama tidak menyebutkan agama apa saja yang termasuk dalam kategori "lainnya", namun dari informasi salah seorang pegawai Depag bahwa salah satu kategori "lainnya" adalah agama Khonghucu.

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lain	Jumlah
Singkawang Tengah	47992	1886	1564	14	12582	92	64130
Singkawang Barat	18552	3595	4362	20	37874	276	64679
Singkawang Timur	5614	2599	7212	9	5927	74	21435
Singkawang Utara	19888	170	92	3	4101	77	24331
Singkawang Selatan	16271	2803	3811	54	25820	78	48837
Jumlah	108317	11053	17041	100	86304	597	223412

Table 5  
**Data Penduduk Berdasarkan Agama tahun 2010**  
 (Sumber Kementerian Departemen Agama Kota Singkawang)

bahwa jumlah penduduk masyarakat Tionghoa yang beragama Budha di kota ini sangat besar dan memiliki perhatian yang cukup besar untuk mendirikan rumah-rumah ibadah mereka. Beberapa waktu lalu, sebagian besar masyarakat Tionghoa ingin menjadikan Kota Singkawang sebagai kota seribu vihara. Keinginan tersebut bisa dimaklumi, mengingat prosentase masyarakat Tionghoa lebih besar dibandingkan dengan Melayu, Bugis dan lain-lain. Sayangnya, data tentang rumah ibadah khusus untuk umat Khonghucu (Lithang) tidak dimuat dalam *Kota Singkawang dalam Angka 2010*. Kelenteng yang ada di Kota Singkawang, yaitu kelenteng Tridharma merupakan tempat ibadah untuk pemeluk Khonghucu, Budha dan Tao.



Jumlah penduduk kota Singkawang berdasarkan pendataan (registrasi penduduk) tahun 2010 adalah sebanyak 223.412 jiwa, dengan karakteristik yang cukup unik. Kota Singkawang memiliki struktur penduduk/ masyarakat yang heterogen yaitu didominasi oleh 3 etnis besar yang hidup secara berdampingan dengan damai.<sup>3</sup> Sementara, jumlah penduduk Kota Singkawang berdasarkan jenis kelamin menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 01 Februari 2011, Kecamatan Singkawang Tengah memiliki 32.686 lelaki dan 31.444 perempuan. Di Kecamatan Singkawang Barat jumlah lelaki 32.680 dan perempuan 31.999 orang, sementara di Singkawang Timur terdapat 11.202 lelaki dan 10.233 perempuan. Di Singkawang Utara lelaki berjumlah 12.470 dan 11.861 perempuan, sedangkan Singkawang Selatan 25.389 lelaki dan 23.448 perempuan, dengan total jumlah penduduk Kota Singkawang berjumlah 223.412 jiwa.

Pada Tabel berikut ini dapat dilihat Penggolongan Penduduk menurut Suku Bangsa (tahun 2003).

- 
- 3 Hubungan antar-etnis di kota Singkawang selama ini terjalin dengan baik, khususnya di era reformasi. Friksi atau konflik yang melibatkan masyarakat Dayak dan Tionghoa pernah terjadi pada tahun 1967. Saat itu, pihak militer memobilisasi masyarakat Dayak untuk menghancurkan masyarakat Tionghoa. Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat, Jamie S. Davidson, "Ethnic Violence and Electoral Politics on the Periphery: The Case of West Kalimantan" paper presented at the PERCIK International Conference, Yogyakarta, 3-7 July 2000; Riwanto Tirtosudarmo, "Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah" dalam *Analisis CSIS, Tahun XXXI/2002, No.3, hlm. 340-350*. Bandingkan dengan catatan Parsudi Suparlan, "Kerusuhan Sambas", *Jurnal Polisi Indonesia* (2): 71-85. Sampai ketika dilakukan penelitian ini, belum ada laporan eksplisit mengenai friksi, ketegangan dan konflik etnik dalam skala massif yang terjadi di Kota Singkawang kecuali pada kasus pendirian Patung Naga yang melibatkan Front Pembela Islam dan Pemuda Melayu setempat, namun tidak menimbulkan dampak sosial yang serius. Berbeda dengan di beberapa daerah kabupaten di Kalimantan Barat, seperti Sambas dan sebagainya, konflik etnik melibatkan penduduk lokal (Dayak) dengan masyarakat Pendatang (Madura dan lain-lain). Hal ini mengindikasikan bahwa multikulturalisme di Kota Singkawang berkembang dengan baik. Hal itu terbukti, antara lain, dalam perayaan Cap Goh Meh dengan menampilkan Tatung, masyarakat Singkawang dari berbagai etnis turut memeriahkan perayaan tersebut. Perayaan-perayaan keagamaan lainnya juga melibatkan etnis lain.

No	Suku Bangsa	Jumlah	Prosentase ( % )
1	Tionghoa	70.470	40,38
2	Melayu	64.992	36,72
3	Dayak	12.849	7,26
4	Lainnya	27.682	15,64
<b>Jumlah</b>		<b>176.993</b>	<b>100,00</b>

Tabel 6

**Penggolongan Penduduk menurut Suku Bangsa**

(Sumber: BPS Kota Singkawang Tahun 2003)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk atau etnis Tionghoa sebesar 70.470 (40,38 %). Etnis Melayu sebesar 64.992 jiwa (36,72 %), etnis Dayak 12.489 jiwa (7,26 %), dan etnis lain sebesar 27.682 jiwa (15,64 %). Prosentase jumlah penduduk etnis Tionghoa yang cukup banyak di Kota Singkawang dapat dimaklumi, sebab di masa lalu Singkawang menjadi salah satu tujuan imigrasi besar-besaran etnis Tionghoa.<sup>4</sup> Menurut Heidues,<sup>5</sup> suku bangsa etnis Tionghoa di Kalimantan Barat pada tahun 1930 didominasi oleh suku Hakka (38.313), Teochiu (21.699), Cantonese (2.961), Hokkien (2.570) dan lain-lain (1.257). demikian juga di Kota Singkawang didominasi oleh orang Tionghoa suku Hakka. Data penduduk berdasarkan suku bangsa diterbitkan Badan Pusat

4 Data mengenai jumlah penduduk berdasarkan etnis tahun 2003 menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki prosentase yang cukup besar. Emigrasi besar-besaran orang Tionghoa terjadi sejak abad ke-18 ketika Singkawang menjadi tempat persinggahan pedagang dan penggali emas di Monterado. Pada tahun 1967, emigrasi besar-besaran terjadi ketika meletus peristiwa konflik antara komunitas Dayak dengan komunitas Tionghoa. Karena itu, polarisasi masyarakat berdasarkan etnis di Kota Singkawang memposisikan masyarakat Tionghoa menjadi etnis mayoritas di kota ini. Mary Somers Heidhues dalam catatannya menyebut Singkawang sebagai 'distrik Tionghoa'. Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat, Mary Somers Heidhues, *Golddiggers, Farmers, and Traders in the "Chinese" Districts of West Kalimantan* (Ithaca, New York: SEAP, Cornell University, 2003), hlm. 18.

5 Mary Somers Heidhues, *Golddigger*; hlm. 31.

Statistik Kota Singkawang terakhir kalinya pada laporan tahun 2003. Setelah itu dengan alasan yang tidak jelas, data penduduk berdasarkan suku bangsa tidak pernah dipublikasikan lagi sampai sekarang.

Tiga kelompok etnis utama atau biasa disebut sebagai "tiga pilar" di kota Singkawang, yakni Dayak, Melayu dan Tionghoa telah mendominasi sejarah Singkawang secara khusus dan Kalimantan Barat Secara umum. Pengelompokan etnis berdasarkan bahasa, budaya, agama, pakaian dan sebagainya tidaklah menjadi persoalan besar bagi masyarakat Singkawang. Etnisitas seringkali dipandang sebagai konstruksi masyarakat tertentu atau *socially constructed*. Dalam konteks ini, seseorang bisa saja diklaim memiliki identitas etnis berdasarkan penampakan fisik atau warisan genetika, atau bahkan berdasarkan proses sosial dan lingkungan sekitar.<sup>6</sup>

Menurut Suparlan, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keanekaragaman suku bangsa telah menghasilkan potensi konflik antarsuku bangsa dan antara pemerintah dengan masyarakat suku bangsa. Potensi-potensi konflik tersebut merupakan sebuah permasalahan yang ada bersamaan dengan keberadaan corak suku bangsa yang majemuk. Sumber permasalahan ini terletak pada siapa atau golongan mana yang lebih berhak atas sumber-sumber daya yang ada di wilayah-wilayah kedaulatan dan kekuasaan sistem nasional atau pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Suku bangsa atau etnisitas (*ethnicity*) adalah sebuah pengorganisasian sosial mengenai jatidiri yang askriptif ketika

6 Pandangan bahwa etnisitas atau pengelompokan masyarakat atau pribadi berdasarkan etnis hanya sekedar pengaruh sosial dan lingkungan, bahkan situasional dan ambigu, dapat dilacak melalui karya Benedict R.O.G Anderson, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983); Fredrik Barth, "Introduction" dalam *Ethnic Groups and Boundaries*, disunting oleh Fredrik Barth (London: Allen and Unwin, 1969), hlm. 9-38; Charles F. Keyes, *Ethnic Change* (Seattle: University of Washington Press, 1982); Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford: Blackwell, 1986).

7 Parsudi Suparlan, "Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", *Antropologi Indonesia*, Th. XXVII, No. 71, Mei-Agustus 2003, hlm. 23-33.

anggota suku bangsa mengaku sebagai anggota suatu sukubangsa karena dilahirkan oleh orang tua dari suku bangsa tertentu atau dilahirkan di dan berasal dari sesuatu daerah tertentu. Jatidiri suku bangsa atau kesukubangsaan tidak dapat dibuang atau diganti. Hal ini berbeda dengan jati diri lain yang diperoleh seseorang dalam berbagai struktur sosial. Kesukubangsaan tetap melekat dalam diri seseorang sejak kelahirannya. Meskipun jati diri suku bangsa dapat disimpan atau tidak digunakan dalam interaksi, tetapi identitas kesukuan tidak dapat dibuang atau dihilangkan.<sup>8</sup>

Dalam setiap interaksi, jati diri akan nampak karena adanya atribut-atribut yang digunakan oleh pelaku dalam pengekspresian jatidirinya sesuai dengan hubungan status atau posisi masing-masing.<sup>9</sup> Dalam hubungan antarsuku bangsa, atribut kesukubangsaan adalah ciri-ciri fisik atau rasial, gerakan-gerakan tubuh atau muka, dan ungkapan-ungkapan kebudayaan, nilai-nilai budaya serta keyakinan keagamaan. Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga suatu suku bangsa mau tidak mau harus hidup dengan berpedoman pada kebudayaan suku bangsanya sebagaimana yang digunakan orangtua dan keluarga dalam merawat dan mendidiknya. Pada gilirannya, seseorang menjadi manusia sesuai dengan konsepsi kebudayaan tersebut.<sup>10</sup>

Pandangan Suparlan dan Barth tersebut nampaknya dapat diidentifikasi dalam konteks Singkawang, yaitu relasi-relasi kesukubangsaan yang terbangun seringkali masih terjebak ke dalam friksi dan pengkotak-kotakkan kesukubangsaan. Nampaknya, kesukubangsaan ini menguat dalam masyarakat Singkawang ketika menghadapi momen-momen politik, perdagangan, dan hubungan-hubungan sosial tertentu.

Dalam konteks Singkawang dan Kalimantan Barat kontemporer, etnisitas biasanya dicirikan dengan hubungan-hubunganekonomitertentu(spesialisasi tertentu), yang memperkuat

---

8 Parsudi Suparlan, *ibid.*, hlm. 33.

9 Parsudi Supalan, "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar-Sukubangsa", dalam I. Wibowo (peny.), *Retrospeksi dan Rekontekstyalisasi Masalah Cina* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 149-173.

10 Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 90.

identitas dan membuat perbedaan di antara kelompok-kelompok etnis menjadi lebih kuat. Pada saat-saat tertentu, pengelompokan etnis menjadi berkurang meskipun pengelompokan tersebut tidaklah hilang. Etnisitas terkadang hanyalah sebuah soal pilihan, namun nilai-nilai "primordial" tertentu yang berlaku dalam waktu yang lama juga menegaskan soal etnisitas ini, termasuk identitas sub-etnis.<sup>11</sup> Heterogenitas etnis dan agama di Kota Singkawang menjadi peluang bagi berkembangnya sebuah ruang baru, dimana tidak ada kultur yang dominan dan mendominasi. Meski komunitas Tionghoa mengklaim atau diklaim sebagai etnik mayoritas di Kota Singkawang, tidak membuka kemungkinan untuk mengklaim bahwa kultur masyarakat Tionghoa lebih dominan atas kelompok etnik lain, seperti Dayak dan Melayu.

Ketika membicarakan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang, mungkin berbeda dengan etnis Tionghoa lainnya di beberapa daerah di Indonesia.<sup>12</sup> Suparlan

11 Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford: Blackwell, 1986), hlm 87; Victor T. King, *Ethnic Classification and Ethnic Relations: A Borneo Case Study* (Hull: University of Hull Center for South-East Asian Studies, 1979), hlm. 23; *ibidem*, "Ethnicity in Borneo: An anthropological Problem" *Southeast Asian Journal of Social Sciences* 10,7 (1982), hlm. 45; *ibidem*, *Peoples of Borneo*. (Oxford: Blackwell, 1993), hlm. 76-79.

12 Diskursus ke-Tionghoa-an di Indonesia tidak serta merta digeneralisir sedemikian rupa, bahwa ada kemiripan pola, perilaku dan profesi orang Cina dari satu daerah dengan daerah lain. Apalagi mengeneralisir bahwa orang Cina di Indonesia memiliki status sosial-ekonomi yang lebih mapan ketimbang etnis lain. Di Singkawang, etnis Tionghoa tidak saja berprofesi sebagai pedagang, bahkan banyak komunitas Tionghoa yang berprofesi sebagai petani, bahkan ada juga yang tergolong masih berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa literatur tentang ke-Tionghoa-an di Indonesia dapat disebutkan di sini, antara lain, A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009); Abdullah Idi, *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*. (Yogyakarta: Tiara wacana, 2009); Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2010); Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. (Yogyakarta: Ombak dan Yayasan Nabil, 2007); Abdul wahid, *Bertahan di tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. (Yogyakarta: Ombak, 2009); Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh, pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. (Yogyakarta: LKiS, 2004); Stefanus Rahoyo, *Dilema Tionghoa Miskin*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010).

mencatat, bahwa diantara orang Tionghoa yang hidup relatif bebas dari posisinya sebagai tamu adalah komunitas Tionghoa di Singkawang. Nenek moyang mereka telah datang ke tempat tersebut dan sekitarnya karena tertarik adanya emas di Monterado dan Mandor. Mereka datang dan menetap di Singkawang sebelum orang Melayu atau Dayak menetap di daerah tersebut. Mereka merupakan komunitas yang berdiri sendiri berdasarkan atas kesukubangsaan dan asal daerah mereka di Cina. Mereka menjalin hubungan baik diantara sesama komunitas tersebut, di samping dengan kesultanan Sambas dan masyarakat Dayak disekitar Singkawang. tetapi kondisi ini kemudian berubah saat ini, mereka oleh pemerintah Indonesia diperlakukan sebagai warga negara Indonesia keturunan Asing. Bila dahulu posisi mereka di Singkawang seperti pribumi, tetapi sekarang mereka seperti tamu di wilayah orang Melayu dan Dayak.<sup>13</sup>

Usaha memperbaiki 'cermin retak' hubungan komunitas Tionghoa dengan beragam etnis di Singkawang terus menerus dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang, antara lain dalam bentuk perayaan-perayaan budaya dan keagamaan. Pada

---

13 Parsudi Suparlan, *Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina*, hlm. 23-33. Peran orang Cina di negeri ini sangat signifikan. Beberapa ahli mencatat bahwa orang-orang Cina menjadi salah satu faktor penentu kemunculan kerajaan-kerajaan besar zaman dahulu, bahkan kerajaan-kerajaan Islam pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Tetapi di era Orde Baru, orang-orang Cina mengalami diskriminasi dalam skala massif. Beberapa literature dapat disebutkan disini yang merekam jejak-jejak peran signifikan orang-orang cina serta marginalisasinya di Indonesia, antara lain, H.J. De Graaf, *Cina Muslim, Di Jawa Abad XV dan XVI antara Historis dan Mitos* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997); Junus Jahja (ed.), *Masalah Tionghoa di Indonesia* (Jakarta, Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999). Junus Jahja, 'Masalah Orang Tionghoa di Indonesia', dalam *Kapok Jadi Nonpri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Alfian Hamzah (ed.,) (Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998). Junus Jahja, 'Warga Keturunan: Asimilasi dan Integrasi,' dalam *Suara Pembaruan*, 04 Juli 1999. Samsul Hidayat, 'Diskriminasi Khonghucu dalam RUU Kerukunan,' dalam *Koran Tempo*, 31 Oktober 2003. Ong Hok Ham, 'Tionghoa Rasisme di Indonesia', dalam *Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa di Indonesia* Babari J. dan Albertus Sugeng, (eds.) (Jakarta, Gandi, 1999). Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia* (Jakarta, LP3ES, 2002). Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta, LP3ES, 1999).

pelaksanaan imlek, semua elemen masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Hal ini memberi kesan, bahwa tidak ada persoalan serius yang berkaitan dengan sekat-sekat antaretnis di Kota Singkawang, sebagaimana biasa terjadi di daerah lain di Indonesia.

Peneliti memandang bahwa perpaduan atau sinkretisme berbagai komponen budaya dalam masyarakat Singkawang menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah kota Singkawang. Aneka warna kebudayaan pada masing-masing etnis merupakan modal utama dalam rangka memupuk kesadaran budaya, kesepahaman, dan saling menghormati eksistensi masing-masing etnis di dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Terkait dengan hal ini, Koentjaraningrat menyatakan bahwa,

”.....aneka warna kebudayaan itu masih merupakan suatu realitet yang tak dapat kita ingkari. Maka daripada menipu diri sendiri dan menutup-nutup realitet suku bangsa itu, sebaiknya kita terimanya dengan akal yang sehat dan memupuk kesatuan bangsa kita dengan lebih dahulu mengakui dan menghormati semua varisasi kebudayaan yang ada di negara kita itu, dan dengan demikian mencoba mencapai pengertian tentang sebanyak mungkin aneka warna manusia dan kebudayaan di Indonesia.”<sup>14</sup>

DitengahheterogenitasetnisdanbudayadikotaSingkawang dan menghindari ketegangan di masa mendatang, masyarakat kota Singkawang perlu mereproduksi kebudayaan lokal masing-masing dalam rangka memperkuat kembali identitas etnis tertentu dalam penghadapannya dengan etnis lain atau lingkungan sosial budaya yang baru.<sup>15</sup> Reproduksi dan reaktualisasi kebudayaan pada etnis tertentu dapat dipandang negatif ketika kebudayaan tersebut mendislokasi kebudayaan etnik lain yang ada didaerah tersebut, dengan tujuan mempersempit ruang-ruang komunikasi sosial antaretnis. Pada saat berlainan, kondisi ini dapat dipandang

---

14 Koentjaraningrat, "Pendahuluan" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 31.

15 lihat Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 41-53.

positif sejauh reproduksi dan reaktualisasi kebudayaan membuka ruang bagi reinterpretasi baru untuk tujuan-tujuan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Atas dasar tersebut, kebudayaan merupakan 'pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis' serta merupakan 'sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan'.<sup>16</sup> Dengan demikian kebudayaan seyogyanya diarahkan dalam konteks pembentukan mentalitas pembangunan yang positif untuk kemajuan daerah, bukan dalam konteks mempersempit ruang-ruang komunikasi terhadap etnis lain. Dengan demikian kebudayaan harus lebih terbuka terhadap kemungkinan adanya reinterpretasi baru untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

### **C. Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Tionghoa Singkawang**

Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan otonomi daerah memberi peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini tentu saja berdasarkan karakteristik dan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah otonom.

Pasca pemekaran atau pemisahan diri dari Kabupaten Bengkayang, aktivitas perekonomian masyarakat Kota Singkawang lebih diitikberatkan kepada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Lapangan pekerjaan utama dan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang dapat dilihat pada keterlibatan komponen masyarakat memanfaatkan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah Kota Singkawang.

Berbagai macam kondisi sosial di Kota Singkawang tidak dapat dilepaskan dari sistem budaya atau serangkaian pan-

---

16 Clifford Geertz, *Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 89.



dangan serta berbagai ide yang membentuknya. Sistem budaya masyarakat Singkawang yang mayoritas beretnik Tionghoa ini meliputi cara pandang mereka terhadap kepercayaan yang mereka anut, seperti yang menyangkut ketuhanan, alam semesta, roh dan jiwa serta kehidupan sesudah kematian. Selanjutnya, bagaimana mereka melihat kebudayaan di luar kebudayaan mereka sendiri, dan pandangan mereka terhadap proses pembauran yang terjadi di kalangan mereka. Sebagai salah satu penduduk “asli” Kalimantan, orang Tionghoa mengalami pembauran dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Kaplan,<sup>17</sup> proses adaptasi merupakan penghubung antara sistem budaya dan lingkungan tertentu. Di dalamnya terdapat ketimbalbalikan atau saling umpan, berinteraksi dalam suatu proses yang telah dan sedang terjadi dari waktu ke waktu.

Masyarakat Tionghoa di Singkawang bekerja di berbagai sektor: petani, buruh, nelayan, pedagang, pengusaha dan sebagian kecil di lembaga legislatif, guru dan pegawai pemerintahan. Mereka yang bekerja sebagai petani, buruh, nelayan, jasa dan karyawan biasa rata-rata tinggal dipinggir kota Singkawang, seperti di beberapa kelurahan bagian Utara, Selatan, dan Timur Singkawang. Pada umumnya, mereka para kelompok Tionghoa pinggiran ini tergolong sebagai masyarakat miskin. Sementara, para pedagang dan pengusaha menghuni hampir di setiap bagian wilayah Singkawang, baik di daerah pinggir atau pun pusat kota.

Sejak era reformasi, masyarakat Tionghoa di Singkawang juga menjadi bagian penting dalam peta politik kota, kontribusi dan peran serta mereka pada pemilu dan pemilihan anggota dewan. Walaupun dalam aspek pemerintahan mereka tergolong minoritas, namun dengan masuknya beberapa orang Tionghoa menjadi anggota dewan, sangat dimungkinkan menjadi pemicu bagi orang Tionghoa yang lain untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan, bahkan beberapa kalangan Tionghoa (politikus) telah melihat adanya peluang besar bagi orang

---

17 David Kaplan, *Teori Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 172.

Tionghoa untuk menjadi walikota Singkawang. Hal tersebut terbukti pada periode 2009-2012 kota Singkawang dipimpin oleh walikota dari etnis Tionghoa.

Hari Poerwanto dalam penelitiannya tentang orang Tionghoa Khek di Singkawang, membagi jenis mata pencaharian hidup di kalangan orang Tionghoa dengan kategori; pengusaha, pedagang, buruh, karyawan PT, petani, pertukangan, jasa perantara, pendeta (biarawan/ti), nelayan, pegawai negeri (pensiunan), guru, dokter, sopir atau jasa lainnya.<sup>18</sup> Data ini merupakan gambaran mata pencaharian orang Tionghoa pada tahun 1970. Melihat perkembangan kota Singkawang yang sangat pesat di bidang ekonomi, maka besar kemungkinan orang Tionghoa di Singkawang lebih banyak yang beralih profesi dari seorang buruh menjadi pedagang, atau seorang petani yang menjadi pedagang sekaligus, sementara pengusaha-pengusaha sukses Tionghoa di Singkawang dipastikan mengalami peningkatan berdasarkan banyaknya perusahaan-perusahaan, industri rumahan (*home industry*), dan toko-toko besar yang bermunculan di kota tersebut.

Secara umum, peluang usaha di sektor pertanian di Kota Singkawang masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS) kota Singkawang tahun 2010, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 31,26 %. Sektor lain adalah perdagangan dengan tenaga kerja sebesar 25,75 %. Sektor ketiga dengan jumlah tenaga kerja yang besar adalah sektor jasa, tenaga kerja yang bergerak di sektor ini sebanyak 20,74 %. Sektor terakhir ini cukup memegang peranan di kawasan Kota Singkawang antara lain dapat disebabkan oleh *share* sektor pemerintahan, disamping adanya sentra pendidikan, dan kawasan pariwisata di Kota Singkawang.<sup>19</sup>

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator

---

18 Hari Poerwanto, *Orang Tionghoa Khek dari Singkawang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 157.

19 Anonim, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Singkawang Tahun 2010*. BPS Kota Singkawang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Singkawang 2010, hlm. 65.

ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari data produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Untuk berbagai keperluan analisis, PDRB harga konstan sering dipakai karena pengaruh naik turunnya harga terhadap nilai PDRB telah ditiadakan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan kemunduran perekonomian. Untuk melihat fluktuasi perekonomian secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan perubahan-perubahan bagi kota Singkawang khususnya setelah definitif terbentuk pada tahun 2000. Dari segi ekonomi, secara makro dicerminkan oleh pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,72 persen yang diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita.

PDRB kota Singkawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 yaitu 1,793 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 12,95 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada periode yang sama sebesar 1.062 Triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan sebesar 4,72 persen.

Peningkatan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan produksi yang relatif lebih tinggi. Setelah mengalami keterpurukan ekonomi akibat krisis 1997 secara perlahan-lahan perekonomian kota Singkawang bangkit. Akibat krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Singkawang hanya 1,12 persen pada tahun 1998. Kemudian mengalami peningkatan sejak tahun 1999 menjadi 3,69 persen, tahun 2000 meningkat 3,8 persen, tahun 2001 mencapai 4,94 persen. Namun, pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan hanya 2,19 persen, dan pada

tahun 2003 meningkat kembali menjadi 4,22 persen dan pada tahun 2010 meningkat 4,72 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan usaha-usaha menggali potensi sumber daya alam yang ada dan mampu mengoptimalkannya menjadi produk unggulan yang bermutu tinggi. Dalam mewujudkannya harus didukung sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas. Peran serta pemerintah tidak kalah pentingnya dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan serta sektor swasta yang mampu mendorong gerak roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan.

Secara umum, masing-masing sub sektor mengalami peningkatan pertumbuhan. Adapun sub sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sub sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri pengolahan, bangunan, angkutan sungai dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dilihat dari struktur perekonomian Kota Singkawang, di sana terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor listrik, perdagangan, keuangan dan jasa. Dari sembilan sektor ekonomi di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor besar, yaitu sektor primer terdiri dari sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian, sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan. Sedangkan empat sektor lainnya tergolong ke dalam sektor tersier.

Pertumbuhan sektor sekunder ternyata lebih tinggi dari sektor primer dan tersier. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan sektor sekunder sangat berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi, kebijakan-kebijakan lebih diutamakan pada peningkatan produk sektor sekunder, yaitu pengolahan industri, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan mengingat besarnya kontribusi sektor tersebut.

Sektor	2008	2009	2010
Pertanian	3,53	7,22	3,97
Pertambangan dan Penggalian	5,47	7,60	4,07
Industri Pengolahan	2,84	1,92	3,61
Listrik dan Air Minum	5,63	2,63	4,61
Bangunan	9,42	1,03	5,82
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,74	6,92	4,79
Pengangkutan dan Komunikasi	9,40	8,82	5,92
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,01	6,15	4,00
Jasa-Jasa	6,24	9,22	5,18
Total	6,19	6,33	4,72

Tabel 7  
**Pertumbuhan Sektoral (%) Kota Singkawang**  
 2008-2010

PDRB Kota Singkawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2008, yaitu sebesar 2,027 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 13,06 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada periode yang sama, sebesar 5,02 persen menjadi sebesar 1,115 trilyun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang juga didapatkan melalui program pariwisata. Pada bagian berikutnya pembahasan akan menguraikan lebih dalam bagaimana aktivitas budaya masyarakat Tionghoa di Singkawang seperti perayaan Imlek dan Cap Go Meh, karena setiap tahun festival tahun baru orang Tionghoa ini dilaksanakan dengan meriah dan spektakuler. Ratusan ribu pengunjung festival baik lokal maupun mancanegara tumpah ruah di sepanjang jalan kota menyaksikan atraksi budaya Tionghoa yang menyedot perhatian masyarakat ini dan tentunya mendatangkan devisa bagi pemerintah setempat.

# BAB III

## PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI TIONGHOA SINGKAWANG

Kota Singkawang dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Jumlah penduduknya tercatat pada tahun 2008 sebanyak 198 ribu jiwa. Sebanyak 62 persen bersuku Haka atau Khek. Warga Haka, Khek atau populer disebut Tionghoa juga ingin berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana warga negara lainnya. Terlebih sejak masa Orde Baru—pasca G30S/PKI dan PGRS/Paraku—mereka mengalami diskriminasi. Padahal eksistensi Tionghoa di Indonesia—tak terkecuali di Singkawang atau Kalimantan Barat sudah terjalin berabad-abad lamanya.

Aktualisasi diri masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang tumbuh seiring dengan gerakan reformasi. Terlebih pada era Presiden Abdurrahman Wahid berkuasa agama Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia.

Interaksi individu maupun kelembangaan Tionghoa di Kota Singkawang bergerak selaras dengan perubahan politik di Indonesia. Gambaran interaksi organisasi tercermin dalam visi-misi serta program kerja dari setiap organisasi tersebut. Berikut

ini peran dan fungsi organisasi Tionghoa di Kota Singkawang seperti Majelis Tridharma, Foket, Yayasan Pemadam Kebakaran, Yayasan Kematian, dan Tzu Chi, Majelis Agama Khonghucu Indonesia, dan Permais.

## 1. MAJELIS TRI DHARMA SINGKAWANG

Sebelum membahas mengenai Majelis Tri Dharma di Kota Singkawang ada baiknya kita mengetahui sejarah singkat masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang, aktivitas serta keyakinannya. Bangsa Cina yang bermigrasi ke Indonesia disebut Tionghoa. Bangsa ini jumlahnya melebihi bangsa manapun di dunia, mereka juga merupakan suku bangsa yang terbesar di dunia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan suku bangsa ini tersebar di seluruh penjuru pelosok dunia termasuk di Kalimantan Barat. Suku bangsa Cina pertama kali datang di Kalimantan Barat, yaitu di Kerajaan Sambas pada abat ke-7. Kolonia-kolonis Cina yang sekarang disebut Tionghoa masuk ke Sambas tersebar di Selatan Tanjung Batu – Belat sampai ke Sungai Duri. Pada waktu itu jumlahnya tercatat 34.000 orang tidak termasuk wanita dan anak-anak.<sup>1</sup>

Singkawang waktu itu menjadi tempat pemukiman atau kampung imigran Cina. Di kampung ini orang-orang melakukan aktivitas berdagang, menjual kebutuhan pokok sehari-hari, bertani dan bekerja di pertambangan. Aktivitas perdagangan imigran Cina di Singkawang terkait erat dengan usaha pertambangan emas di Monterado, sehingga Singkawang berfungsi sebagai pelabuhan untuk perdagangan dengan Monterado.

### A. Perkumpulan-perkumpulan Cina

Sebagai upaya untuk melanggengkan usahanya, para imigran Cina tersebut membuat perkumpulan-perkumpulan sosial dan usaha dagang. Perkumpulan-perkumpulan itu berkaitan dengan usaha untuk pembukaan lahan pertambangan emas di

---

1 V.J.Veth, *Borneo Bagian Barat, Geografis, Statistis, Historis*, Jilid 2, (Institut Dayakologi, Pontianak, 2012), hlm. 85.

berbagai tempat di Kalimantan Barat. Melalui perkumpulan itu setiap orang memberikan sejumlah uang dalam bentuk saham.

Tiap orang dapat menyumbang sesuai kemampuannya. Sesuai dengan jumlah saham, mereka ambil bagian dalam untung dan rugi. Anggota yang memiliki lebih dari 1 (satu) saham wajib mengupah 1 (satu) orang pekerja. Setiap pemegang saham mempunyai suara dalam urusan kepentingan perkumpulan atau perusahaan. Setiap empat bulan sekali dipilih juru tulis diantara pemegang saham. Juru tulis dianggap sebagai kepala sementara di perkumpulan tetapi setelah penggantian melalui pemilihan yang bersangkutan kembali menjadi pekerja biasa.<sup>2</sup> Perkumpulan-perkumpulan orang-orang Cina menurut P.J. Veth, selain bergerak di bidang usaha perdagangan juga politik. Jenis-jenis perkumpulan itu dikenal dengan nama: (1) Lan-Fong; (2) Tai-Kong; (3) Sin-Ta-Kiu; (4) Lim-Tiang; (5) Man-Fo; (6) Syi-Fung-Fong; dan (7) Fo-Syon.

Perkumpulan-perkumpulan tersebut pada waktu jaman pemerintahan orde baru semua ditutup termasuk sekolah-sekolah Cina. Sedangkan perkumpulan-perkumpulan yang masih diizinkan adalah perkumpulan-perkumpulan mengurus kematian. Dalam perkembangannya, perkumpulan-perkumpulan yang mengurus kematian ini oleh Pemerintah Indonesia harus mempunyai ijin resmi. Karenanya perkumpulan-perkumpulan tersebut berubah menjadi yayasan yang lengkap dengan kepengurusan serta wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurut keterangan Bong Wui Khong, Ketua Pengurus Keluarga Besar Umat Budha Kota Singkawang saat ini di Kota Singkawang terdapat 25 (dua puluh lima) yayasan yang mengurus kematian. Yayasan-yayasan tersebut dikelola baik oleh umat Budha maupun Khonghucu.

Orang-orang Cina (Tionghoa) di Singkawang awalnya menganut agama Khonghucu dan Budha. Dalam perkembangannya karena pengaruh sosial dan lainnya, masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang ada juga yang memeluk agama Katolik, Protestan dan Islam. Orang Tionghoa secara umum baik penganut Khonghucu maupun Budha dan memandang kosmos penyebab

---

2 *Ibid.*, hlm. 269.



yang mendatangkan masalah dalam kehidupan karenanya persatuan dengan kosmos sangat dihormati.<sup>3</sup>

Orang-orang Tionghoa menganggap alam ini bukan suatu yang mati, tetapi sebagai suatu organisme yang hidup dan bernapas. Mereka melihat adanya rantai kehidupan spiritual yang menjalin setiap eksistensi menjadi satu kesatuan, tak ubahnya sebagai tubuh hidup, maka terkaitlah segala apa yang ada di surga di atas ataupun yang ada di dunia di bawah....<sup>4</sup> Apa yang ditegaskan oleh ajaran Budha menyangkut Tri Dharma.

#### B. **Yayasan Tri Dharma**

Yayasan Tri Dharma di Kota Singkawang, mulai eksis pada tahun 1989 yang beralamat di Jalan Diponegoro No 44 Singkawang, dan dari sejak berdiri hingga sekarang diketuai Bong Wui Khong. Yayasan ini tidak terpisahkan dengan keberadaan masyarakat Tionghoa yang menganut agama Budha di Kota Singkawang. Jika dicermati secara seksama yayasan ini tidak lebih hanya merupakan perpanjangan tangan umat Budha di Kota Singkawang. Kegiatan utama yayasan ini adalah membantu umat Budha mengurus kematian.

Jumlah umat Budha di Kota Singkawang 119.647 jiwa atau 47% dari jumlah penduduk Kota Singkawang dilihat dari status social, ekonomi dan pekerjaannya sangat bervariasi. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kemampuannya, ada kelas atas, menengah dan bawah. Bagi masyarakat Tionghoa, biaya untuk penguburan orang mati cukup mahal terutama biaya pengadaan peti mati. Harga peti mati paling murah sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Harga peti mati sebesar itu tentu tidak terjangkau bagi umat Budha yang miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan dan yayasan harus membantu mereka.

Sebagai upaya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan

---

3 Stephanus Ozias Fernandez, *Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*, (Nusa Indah, Flores NTT, 1990), hlm. 95.

4 Frena Bloomfield, *Di Balik Sukses Bisnis Orang-orang Cina*, (Sang Saka Gotra, Jakarta, 1986), hlm. 10.

bangsa, tahun 1989 yayasan ini mendirikan sebuah sekolah yaitu SMP Teratai. Hanya sayang dalam perjalanannya tidak berkembang dengan semestinya. Bong tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sebenarnya kondisi sekolah tersebut. Menurutnya, sekolah ini diibaratkan bagaikan teratai di atas kerakap hidup segan mati pun enggan. Untuk membantu masyarakat Kota Singkawang dalam hal keterampilan berbahasa asing, Yayasan Tri Dharma juga membuka kursus Bahasa Mandarin.



**Gambar 3. Pengurus Majelis Tridharma kota Singkawang**

Bong Wui Khong, Ketua Yayasan Tri Dharma Kota Singkawang juga sebagai Pengurus Keluarga Besar Umat Budha Tri Dharma Kota Singkawang. Karena itu kegiatan yang dilakukan yayasan tidak terpisahkan dengan Tri Dharma untuk menuju Budha. Tri Dharma menuju Budha itu meliputi:

1. Dharma Bhakti

Melakukan dharma bhakti berarti memberikan pengabdian demi kebenaran atau berperilaku benar di dalam keluarga, masyarakat, lingkungan dan tempat bekerja. Selain itu berbhakti

kepada orangtua, leluhur dan Tuhan.

## 2. Dharma Suci

Melakukan dharma suci berarti melakukan perbuatan yang benar dalam lingkungan yang lebih besar. Seperti membela negara, menjaga kerukunan bermasyarakat serta hubungan sosial lainnya. Perilaku dharma suci merupakan contoh kebenaran yang layak ditiru karena menunjukkan fungsi-guna keberadaan manusia terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 3. Dharma Agung

Melakukan dharma agung berarti melaksanakan kebenaran secara bijaksana. Tidak terbatas pada hubungan antarmanusia melainkan terhadap semua aspek yang melanggengkan kehidupan secara menyeluruh (alam semesta ciptaan Tuhan dan segala yang tidak dapat dilihat).

Menurut Bong Wui Khong, di Kota Singkawang jumlah umat Khonghucu cukup besar. Tempat ibadah umat Khonghucu disebut Lithang sedangkan untuk umat Budha adalah Vihara. Inti dari ajaran Khong Hu Cu meliputi: (1) Li-saling menghormati; (2) Nyi-tahu balas budi; (3) Liam-merendah diri; (4) Chi-berbuat salah tau malu; (5) Hau- berbakti pada orangtua; (6) Jin-kebajikan; (7) Oi-melakukan sesuatu dengan keikhlasan; dan (8) chung, setia pada negara dan taat pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan ajaran konfusius, yakni berkorban demi kepentingan orang lain, *altruism*, berdisiplin, sopan, setia pada hukum, dan akrab dalam bergaul.<sup>5</sup> Mencermati penjelasan Bong tentang ajaran Budha dan Konfusius pada hakikatnya merupakan hukum kodrat yang tidak terpisahkan tata dunia, bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari alam dunia. Karena itu manusia harus menyesuaikan diri dengan keseluruhan tata dunia.

Berdasarkan penuturan Bong, Vihara Budha, yaitu Vihara Tri Dharma Bumi Raya yang terletak di jantung Kota Singkawang, merupakan Vihara yang usianya sudah 200 tahun. Umat Budha meyakini Vihara Tri Dharma Bumi Raya Singkawang merupakan tempat berdiamnya Dewa Bumi Raya. Atas dasar keyakinan itu, maka masyarakat Tionghoa (umat Budha dan Khonghucu) Kota Singkawang dan sekitarnya setiap tanggal 6 Juni setiap tahun

---

<sup>5</sup> Stephanus Oazias Fernandes, *Citra Manusia* ., hlm.85.

mengadakan upacara ulang tahun bagi Dewa Bumi Raya. Di dalam Vihara tersebut terdapat patung Pek Kong.

Keyakinan masyarakat Tionghoa Kota Singkawang dan sekitarnya terhadap Vihara Tri Dharma Bumi Raya Singkawang sebagai tempat tinggal Dewa Bumi Raya menjadikan Vihara ini menjadi pusat kegiatan perayaan Cap Go Meh. Cap Go Meh oleh masyarakat Tionghoa dirayakan pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Perayaan ini bertujuan untuk membersihkan kampung. Pada waktu perayaan Cap Go Meh, sejumlah Tatung atau Louya berkumpul di Vihara Tri Dharma Bumi Raya melakukan upacara dan selanjutnya diarak berkeliling Kota Singkawang sambil melakukan bermacam atraksi.

Berkaitan dengan peran aktif beberapa yayasan terutama Yayasan Tri Dharma atau perkumpulan Tionghoa terhadap pembangunan, Bong tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat Kota Singkawang tidak terlepas dari peran serta semua pihak termasuk masyarakat Tionghoa.

### **C. Hubungan Yayasan Tri Dharma dengan Cap Go Meh dan Tatung di Kota Singkawang**

Cap Go Meh merupakan hari terakhir di masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Cap Go Meh dalam bahasa Hokkian secara harafiah berarti hari kelima belas dari bulan pertama (Cap= sepuluh, Go= lima dan Meh= malam) dan dalam bahasa Mandarin disebut Yuan Hsiao Cieh.

Menurut keyakinan masyarakat Tionghoa, Cap Go Meh dirayakan untuk menghormati Dewa Thai-Yi. Dewa ini dianggap sebagai dewa tertinggi di langit. Upacara ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 bulan pertama dalam penanggalan Cina. Perayaan selalu dirayakan pada malam hari karenanya harus dilengkapi lampu-lampu untuk penerangan. Inilah kemudian menjadi lampion-lampion dan lampu warna-warni yang melengkapi perayaan Cap Go Meh.

Sesuatu yang menarik dalam perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang adalah kehadiran para tatung atau louya.

Atraksi-atraksi para tatung yang diarak di atas tandu keliling Kota Singkawang membuat siapa saja yang melihatnya terkagum-kagum dan sekaligus mengerikan. Menurut akal sehat, bahwa yang mereka lakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil. Selama arak-arakan para tatung melakukan atraksi seperti menusuk diri dengan benda tajam, menusuk lidah dengan benda tajam atau memotongnya dengan pisau. Menusuk pipi kiri hingga tembus ke pipi kanan atau menusuk bibir dengan benda tajam serta memotong atau menyayat tubuhnya dengan parang. Para tatung tidak luka, bagian tubuh yang ditusuk dengan besi-besi yang ditajamkan walaupun tembus tetapi tidak mengeluarkan darah. Bahkan kalau tusukan itu ditarik tidak terdapat bekas luka sedikit pun.

Namun apa yang diperlihatkan para tatung melalui atraksi-atraksinya itu bukanlah tanpa persiapan yang matang. Sebelum mereka melakukan atraksi-atraksi pada perayaan Cap Go Meh, terlebih dahulu mereka menyucikan diri dengan melakukan puasa selama tiga hari dan bermeditasi sekaligus mohon kepada dewa kekuatan magis. Para tatung menjadikan tubuh mereka sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan roh leluhur dan para dewa. Dengan menggunakan mantra tertentu roh dewa dipanggil di muka altar sehingga merasuki raga para tatung.

Tatung dalam masyarakat Tionghoa diyakini dapat mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit dan mampu menyembuhkan penyakit. Sepertinya para tatung ini menganut ajaran taoisme. Di dalam kebudayaan Cina, taoisme sangat menekankan tempat manusia di dalam dunia, keharmonisan dengan alam. Karena itu taoisme dalam masyarakat cina mendapat tempat yang paling tinggi dan berfungsi sebagai sistem magis.

Umumnya dalam kelompok masyarakat, tak terkecuali masyarakat Tionghoa terdapat sejumlah orang memiliki kekuatan magis. Dengan menggunakan mantera-mantera dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mencegah datangnya bahaya, meramal nasib dan sebagainya seperti yang dilakukan para tatung. Mantera-mantera seperti ini begitu luas penggunaannya. Bahkan perlengkapan dari mantera-mantera itu dapat dibeli di toko-toko khusus, seperti cermin, kertas warna

kuning ditulis dengan warna merah, lilin warna merah, hio, dan kertas-kertas sembahyang.

Tatung atau louya memiliki mantera dan jimat yang memiliki kekuatan magis tak terhingga, hal ini diyakini masyarakat Tionghoa. Kenyataan ini agaknya ada hubungan dengan keyakinan, kata-kata itu bukan dianggap sebagai suara tanpa makna, sedangkan tulisan atau gambar bukan dianggap sebagai coretan tinta belaka melainkan semua itu sebagai satu kesatuan membentuk suatu realitas dari apa yang digambarkan atau dinyatakan. Sebagai contoh sederhanya di atas pintu rumah sebagian masyarakat Tionghoa dapat dijumpai cermin, tempelan kertas kuning ditulis dengan tinta merah atau hitam, kemudian ada tempat hio dan lilin berwarna merah.

Suatu realitas, bahwa hingga sekarang keyakinan itu tak pernah pudar walaupun memunculkan perdebatan seberapa jauh sebenarnya seseorang betul-betul menghayati dan meyakini khasiat mantera dan jimat tersebut. Namun dapat dipastikan khasiat mantera dan jimat itu memang sudah ada sejak jaman pra-sejarah dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Mungkin semua ini muncul sejak zaman animism dan roh-roh alam. Kemudian kebiasaan ini diambilalih oleh aliran Tao yang memang banyak terlibat dengan berbagai kebiasaan magis.

Kebanyakan masyarakat Tionghoa berpendapat bahwa memang ada sejenis kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Tetapi dimensi kehidupan yang akan datang dianggap hampir serupa dengan kehidupan di dunia sekarang ini. Orang Tionghoa umumnya tidak pernah membedakan secara nyata antara dongeng dan kenyataan. Karena itu mereka memberikan tempat terhormat dan khusus serta persembahan bagi para dewa. Berusaha membahagiakan nenek moyangnya agar roh-roh mereka tidak mengganggu. Roh-roh itu justru diharapkan dapat membantu untuk mendatangkan keberuntungan. Jika mengganggu, maka mereka akan mendatangi luoya sebagai media dan mencari solusi bagaimana cara supaya roh-roh itu tidak mengganggu atau menyakiti.

Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah orang Tionghoa berdasarkan keyakinan yang mereka miliki memang

percaya akan kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini? Karena faham ajaran Taoisme yang mistis ini juga tidak menerangkan dengan jelas tentang bentuk kehidupan sesudah kehidupan di dunia.

Dewa-dewa bagi masyarakat Tionghoa mendapat perhatian khusus dan istimewa. Dewa dapur misalnya pada Tahun Baru Imlek bibirnya akan diolesi madu. Karena pada malam tahun baru itu ia akan pergi ke surga dan memberikan laporan tentang keluarga yang bersangkutan. Makna pengolesan madu dibibirnya agar dewa melaporkan yang baik-baik tentang keluarga tersebut. Selain dewa dapur, dalam masyarakat Tionghoa dikenal juga dewa-dewa, antara lain dewa langit, dewa air, dewa bumi dan dewa angin. Namun jika dilihat dari faktor kepentingan, maka masyarakat Tionghoa akan menghubungkannya dengan segala makhluk sebagai bagian dari ajaran Tao, Budha dan Konfucius. Dewi Guan Im, Dewa Guan Gong dan dewi Tin Hau. Dewi Guan Im dianggap sebagai tokoh Budha, Dewa Guang Gong sebagai tokoh Konfucius, sedangkan dewi Tin Hau sebagai dewi Tao.

Roh-roh menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa ada yang bersifat jahat ada juga yang baik. Roh jahat diyakini dapat mendatangkan malapetaka sedangkan roh baik dapat memberikan pertolongan. Di kalangan masyarakat Tionghoa, roh yang paling ditakuti adalah roh yang kelaparan. Roh ini diyakini sebagai roh yang tak pernah puas, penuh rasa dendam terhadap manusia. Roh ini termasuk roh yang ada di atas muka bumi dan tidak termasuk yang sudah di alam baka. Mereka tidak termasuk di mana-mana, tidak memiliki siapapun di dunia ini yang biasa membantu mereka mencapai peristirahatan yang kekal dan juga tidak menemukan daur ulang inkarnasi dan karma.

Roh-roh yang demikian adalah roh-roh yang sudah tidak diurus oleh keluarga atau keturunannya, roh yang meninggal tiba-tiba, meninggal karena kekerasan, roh yang tidak dapat melepaskan diri dari tarikan duniawi, roh tubuh yang tidak pernah ditemukan dan tidak dapat diantarkan ke tempat peristirahatan sehingga tidak dapat dihormati oleh anak cucunya. Roh-roh ini sangat ditakuti oleh masyarakat Tionghoa karena dapat mendatangkan bencana atau malapetaka.

Umumnya orang Tionghoa memang percaya bahwa pada kasus kematian mendadak, roh dari orang yang meninggal seringkali tidak tahu arah dan berkeliaran di mana-mana. Roh tersebut tidak tahu kalau raganya sudah mati tetapi ia terus mencarinya. Jika ia tidak berhasil menemukan tubuhnya sendiri, maka ia akan mencari tubuh orang lain. Untuk mengusirnya diperlukan louya sebagai mediator. Dengan mantera-manteranya serta syarat-syarat tertentu mereka dibujuk menuju dunianya sendiri. Namun kebanyakan magis yang dijumpai i pada masyarakat Tionghoa bukanlah tergolong magis yang hitam dan biasanya bertujuan memperlancar hidup di dunia, mengatasi semua masalah hidup, membentengi pengaruh buruk atau pun penyakit.

Dalam masyarakat Tionghoa berbagai macam jenis perayaan atau ritual adalah merupakan bagian dari peradaban suatu bangsa sejak zaman dulu dan selalu mempunyai asal-usul keagamaan. Sifatnya merupakan acara ritual yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan akultis tertentu. Demikian halnya dengan segala jenis perayaan besar yang ditemukan pada masyarakat Tionghoa. Dilihat dari bentuk dan gaya yang khas perayaan itu, masyarakat Tionghoa masih mempertahankan nilai tradisinya meskipun kehilangan makna dan tujuan sesungguhnya.

Setidaknya terdapat empat belas jenis perayaan diantara kelompok masyarakat Tionghoa tetapi hanya sedikit yang masih tergolong okultis. Mulai dari perayaan yang sifatnya memuja roh-roh halus atau dewa-dewa sampai pada perayaan khusus seperti pemberkatan kuil dan kelenteng. Sekarang perayaan seperti ini sering dianggap sebagai waktu yang baik untuk libur atau beristirahat. Namun masih terdapat sejumlah kecil perayaan yang masih dipertahankan sifat okultisnya. Sifat okultis diantaranya : perayaan roh-roh halus yang lapar, hari ulang tahun Tin Hau, hari tahun baru Imlek, hari ulang tahun Budha dan hari ulang tahun Putera Dewa serta hari kunjungan ke makam keluarga (sembahyang kubur).

Sembahyang ke makam keluarga bertujuan menghormati keluarga dan tanda bakti kepada orangtua dan leluhur dengan membawa persembahan, membakar hio, kertas khusus sebagai



tanda balas budi. Menurut kultur masyarakat Tionghoa, mati bukan berarti selesai atau pergi. Mati tidak hanya dikaitkan dengan badan tetapi tetap masih merupakan bagian dunia ini dan merupakan bagian dari keluarga.

Salah satu perayaan yang paling populer adalah perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan ini berlangsung selama lima belas hari dan ditutup dengan perayaan Cap Go Meh. Perayaan ini biasanya ditetapkan antara pertengahan Januari dan pertengahan Februari, yaitu awal tahun baru menurut penanggalan bulan.

Penetapan tahun bagi masyarakat Tionghoa diberi nama sesuai dengan makhluk yang ada kaitannya sistem astrologi mereka. Urutannya adalah sebagai berikut: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi. Sedikit banyak variasi yang ditemukan sesungguhnya hanya masalah terjemahan dan tidak mempunyai perubahan penting dalam maknanya sendiri. Dengan demikian ditemukan suatu siklus dua belas bagian, tetapi setiap tahun diberi tingkatan sesuai dengan elemen yang dominan dari kelima elemen klasik. Oleh karena itu sering kita mendengar, tahun ini merupakan Kuda Air, Naga Mas, Naga Air dan sebagainya. Sesungguhnya ada enam puluh tahun sebelum tercapai duplikasi dari tahun terdahulu.

Menurut legenda Cina kuno mengisahkan bagaimana tahun-tahun itu diberi nama sama dengan nama hewan. Ketika Budha meminta kepada semua makhluk hidup untuk datang padanya, tetapi hanya keduabelas makhluk inilah yang hadir. Untuk penghargaan terhadap kesetiaan mereka, maka Budha mengabadikan nama mereka untuk dijadikan nama tahun. Sungguh kisah yang menarik, tetapi juga merupakan kisah yang kurang masuk akal.

Terlepas dari keyakinan masyarakat Tionghoa dengan dewa-dewa, kekuatan magis dan lainnya yang berkaitan dengan perayaan Cap Go Meh dan atraksi para tatung yang menegangkan serta hadiah Budha terhadap hewan-hewan yang memenuhi undangannya sehingga nama hewan-hewan tersebut dijadikan nama bulan dalam penanggalan Cina. Namun yang paling sibuk selain panitia Cap Go Meh dalam mempersiapkan acara dan mengkoordinir para tatung adalah Yayasan Tri Dharma dan

Majelis Tao Indonesia resort Singkawang.

Kesibukan itu terkait dengan Yayasan Tri Dharma sebagai pemilik Vihara Tri Dharma Bumi Raya Kota Singkawang. Vihara ini menjadi pusat berkumpulnya para tatung. Sebelum para tatung berkeliling Kota Singkawang, di Vihara ini dilakukan upacara terlebih dahulu. Tujuannya agar para tatung dilindung dan mendapat kekuatan dari para dewa. Yayasan Tri Dharma mengambil bagian secara aktif bagaimana supaya upacara berjalan lancar. Untuk itu pengurus yayasan dibantu oleh panitia pelaksana mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara. Satu hal yang sungguh membanggakan dan memberikan kontibusi positif bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang, bahwa melalui perayaan Cap Go Meh Yayasan Tri Dharma berpartisipasi aktif membantu pemerintah dalam promosi di bidang kepariwisataan.

Sebenarnya tidak hanya melalui perayaan Cap Go Meh Yayasan Tri Dharma berpartisipasi membantu pemerintah Kota Singkawang meningkatkan PADnya. Secara tidak langsung juga melalui kegiatan sembahyang kubur. Pada waktu sembahyang kubur, semua yayasan kematian sibuk mempersiapkan upacara sembahyang kubur. Ratusan orang setiap tahun datang ke Kota Singkawang untuk melakukan sembahyang kubur. Mereka tidak hanya datang untuk sembahyang kubur habis itu pulang, melainkan mereka menginap di hotel, makan di restoran, berbelanja dan mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Kota Singkawang dan sekitarnya. Ini berarti semua yayasan kematian tidak terkecuali Yayasan Tri Dharma sudah mengambil bagian aktif membantu pemerintah dalam pembangunan.

Bong Wui Khong (Huang Wei Kang), Tokoh Tionghoa Singkawang sekaligus Ketua Tri Dharma Singkawang dalam wawancara pribadi mengemukakan bahwa,

“Dalam Tri Dharma ada 3 unsur terdapat sejarah khususnya di Singkawang, . Saat itu orang Tionghoa datang ke Borneo, dipekerjakan oleh Sultan Mempawah. Ketika Sultan Sambas berkunjung ke Mempawah, sultan tertarik dengan kinerja beberapa orang Cina yang dipekerjakan oleh Sultan Mempawah dan Sultan Sambas

lalu meminta agar Sultan Mempawah mau mendatangkan juga beberapa orang lagi untuk dipekerjakan membuka tambang emas di Monterado. Karena keuletan dari orang Cina Quang Co (Hakka), oleh mereka diundang beramai-ramai datang ke Kalbar sebagai penambang emas. Umumnya kaum laki-laki, tidak membawa keluarga. Mereka kawin dengan masyarakat setempat membaaur jadi satu. Setiap bulannya utusan kerajaan Sambas datang mengambil upeti atas tambang tersebut. Dulu belum populer dengan ilmu kedokteran, masih terbawa tradisi. Setiap membuka lahan baru selalu mendapat gangguan jahat. Oleh masyarakat setempat mengadakan “gotong pekong” di seluruh perkampungan dengan melibatkan tatung, meminta izin pada dewa bumi, Dewa Bumi Raya atau Pekong (dewa yang dituakan). Jika ada persoalan, masyarakat meminta tolong kepada Dewa Bumi Raya (Pekong) sebagai perantara karena perkampungan sering mendapat gangguan musibah. Setiap tahun mengadakan upacara tolak bala (tui sia; usir gangguan gaib) untuk mengusir roh-roh jahat yang mengganggu.

Saat itu ada belasan Tatung yang bertugas membersihkan kampung. Belum ada festival. Mereka memasakkan paku di sebuah pohon (ta ciao) yang sudah ditentukan, sebagai tanda bahwa roh jahat yang ditangkap sudah diamankan dan dikunci pada pasakkan paku di kayu tersebut. Di depan pohon disiapkan tempat ibadah untuk menjaga agar roh tersebut tidak kabur. Dulu di Singkawang masih ada pohon yang dijadikan sebagai ta ciao (pohon di jalan Diponegoro samping BNI). Saat ini pohon tersebut sudah tidak dijadikan ta ciao lagi.

Tatung (khek) adalah orang yang kemasukan (bukan sebatas dukun). Ketika Cap Go Meh mereka membaaur, sudah tidak bisa dipilah mana yang benar-benar asal dari Cina, sudah jadi milik Kalimantan barat. Sebelum mereka ke Kalbar, di Cina sebenarnya juga sudah ada tatung. Menurut cerita orang tua zaman dulu, kebanyakan mereka belajar ilmu melalui ajaran Tao, bersemedi

untuk mendapat kontak dengan roh halus. Karena kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan tradisional. Dan merekalah yang diminta bantuan. Waktu itu belum ada tatung yang berfungsi sebagai tukang peruntungan. Setelah zaman Soeharto ketika ada *toto, nalo* (judi togel) baru tatung banyak yang berprofesi ganda sebagai tukang peruntungan. Sementara sebagai tukang ramal memang sudah menjadi bagian yang inheren dalam fungsinya sebagai tatung. Ramalan dengan melihat wajah, tangan, tanggal lahir dan lain lain. Jawaban akan diuraikan dalam kertas kuning. Kalaupun ada yang kurang beruntung, maka yang bersangkutan dikasi jimat penangkal.”<sup>6</sup>



Gambar 8

**Bong Wui Khong (Huang Wei Kang),  
Ketua Majelis Tri Dharma Singkawang (koleksi pribadi)**

Hal senada diungkapkan Bong Cin Nen, Anggota DPRD Kota Singkawang sekaligus Sekretaris Panitia Cap Go Meh 2563, “Cap Go Meh istilah dari dialek hokkian “hari ke 15 bulan pertama”. Dalam bahasa Khek disebut *nyian siaw cet*, perayaan penutupan tahun baru, dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Sebelum ada arak-arakan seperti ini, *nyian siaw cet* dirayakan dalam bentuk petasan kembang api, barongsai saja. Sejak kejadian penyakit epidemik di

---

6 Wawancara pribadi, 15 Nopember 2012.

perkongsian di Monterado tahun 1227, barulah diadakan arak-arakan tolak bala baik itu oleh kelompok Manggis, Sam Tiao Kong, (kelompok komunitas pertambangan) mereka memiliki usaha tambang yang cukup besar. Disitu sudah cukup ramai, meskipun ekonomi sudah berkembang, tapi dari kesehatan belum ada, (tabib, dokter). Pada kondisi tersebut muncul tatung, mereka mengatakan bahwa kejadian yang menimpa masyarakat bukanlah penyakit biasa, tapi ada ulah dari makhluk halus yang memberikan penyakit sehingga menular kepengungsian di Monterado tersebut. Pada saat imlek orang ramai sembahyang dan menggelar doa, lalu tatung mengatakan bahwa harus ada upacara khusus untuk mengusir para roh jahat ini sehingga penyakit ini bisa dihilangkan. Maka digelar arakan tatung. Altar dibuat di tengah perkampungan dalam perkumpulan tatung . untuk pemujaan Dewa Tan Thien. Ternyata para tatung tadi harus berperang dengan pengganggu perkampungan. Mereka berpesan agar membunyikan gendang, gong, semua alat yang ada mendukung spirit para tatung untuk melawan roh jahat tersebut. Jangan berhenti sebelum kami kembali. Lalu dikerjakanlah arak-arakan sepanjang jalan keliling kampung (*ta cio*, mengusir roh jahat dengan menggotong tatung).

Tatung bahasa Khek (Hokkian *gibeng*) “Roh baik yang masuk ke dalam tubuh seseorang”. Setelah pengusiran selesai selama 36 jam, mereka berhadapan dengan makhluk yang luar biasa. Mereka pulang dengan memuntahkan hama wereng, dan itulah penyakit yang ditularkan pada masyarakat,. Setelah pulang, para tatung mengingatkan masyarakat bahwa ada perintah dari Thian (dewa tertinggi) untuk menggelar pengusiran ini setiap tahun. Maka peristiwa pengusiran dan pengobatan ini jadi awal mula Cap Go Meh. Kejadian itu terus dilakukan tiap tahun, sehingga penyakit menular tersebut tidak pernah datang lagi. *Se kong mun* (mencuci perkampungan/membersihkan) dari roh jahat. Khusus 1 hari untuk arakan tatung dilakukan ritual. Dan ini akan terus terpelihara

dengan sendirinya oleh umat yang percaya.”<sup>7</sup>

Terkait dengan upaya mempertahankan sakralitas dan otentisitas tatung, Bong Wui Khong, Tokoh Tionghoa Singkawang, Ketua Majelis Tri Dharma Singkawang, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa tatung sebenarnya tidak merasa kehilangan sakralitas, justru mereka merasa bagian dari pembangunan. Masyarakat tatung bahkan tidak mempersoalkan jika mereka diundang oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan atraksi. Misalnya di obyek wisata Pasir Panjang setiap tahun mereka diundang pada hari raya Imlek untuk ikut meramaikan acara dan menghibur pengunjung di tempat tersebut. Beberapa group tatung (terdapat 10 group tatung) juga biasa diundang ke Jakarta dan Batam untuk melakukan atraksi pada acara-acara tertentu terutama perayaan Cap Go Meh. Mereka mengundang Tatung Singkawang, tanpa perlu harus pergi lagi ke Singkawang seperti yang biasa mereka lakukan. Bong sempat protes kepada para pengusaha travel yang mensponsori (dua atau tiga tahun lalu), dan meminta agar budaya tatung tidak dibawa keluar, karena dikhawatirkan tidak ada lagi wisatawan yang mau datang ke Singkawang. Menurut Bong saat ini para tatung sudah dikonsentrasikan ke Singkawang saja. Beberapa tatung yang berasal dari Singkawang dan sudah menetap dan bekerja di Jakarta, kami himbau agar setelah imlek mereka datang ke Singkawang meramaikan perayaan Cap Go Meh.<sup>8</sup>

Bong Wui Khong menyakini bahwa otentisitas tatung tidak akan terganggu, walaupun pemerintah “menjual” keunikan tatung sebagai komoditas. Namun, Bong meminta pemerintah melakukan perhatian terhadap tatung terutama dari segi kesejahteraan mereka yang masih rendah. Pembinaan diharapkan agar tatung dapat hidup mandiri, memiliki usaha dan tidak menggantungkan diri pada usaha tatung yang sangat minim. Menurutnya, selama ini peran Dinas Pariwisata Singkawang hanya sebatas memfasilitasi perayaan Cap Go Meh saja, sedangkan nasib tatung selama ini masih menggantung.

---

7 Wawancara pribadi, 15 Nopember 2012.

8 Wawancara pribadi, 15 Nopember 2012

“Komunitas Tatung Tridharma sekitar 200-an, Tatung dari Majelis Tao Indonesia sekitar 400 an dan sisanya Khonghucu yang membaur di kedua komunitas. Umat Khonghucu yang menjadi tatung tidak memiliki altar khusus (karena tidak ada Lithang) dan mereka membaur di Tri Dharma dan Tao. Tidak ada *clash* antartatung. Karena dalam ajaran mereka juga saling menguatkan satu sama lain. Khonghucu mengajarkan silaturahmi, persaudaraan. Kalau ada persaudaraan, maka agama akan berkembang. Untuk mempersiapkan diri menuju Nirwana, kita harus mengikuti ajaran Tao. Hidup kita harus mengenal baik buruk, hitam putih sesuatu. Hidup harus mencari kebenaran. Kalau ini sudah bisa dipilah, maka barulah bisa mencapai kebajikan menuju nirwana melalui Buddha.

Kami dari Tri Dharma memberikan pembinaan kepada tatung agar jangan jadi tatung yang jahat, yang suka mengganggu orang lain. tidak semua tatung baik, ada aliran hitam dan putih. Tatung jahat tidak difestivalkan. tatung yang “mengganggu” orang sangat sedikit di Singkawang.”<sup>9</sup>

Baik Tjai Ket Khiong selaku Ketua Majelis Tao Indonesia (MTI) Resort Singkawang maupun Bong Wui Khong selaku ketua Majelis Tri Dharma Singkawang keduanya berharap agar perayaan Cap Go Meh dikembalikan lagi pengelolaannya oleh majelis-majelis agama Tionghoa yang ada di Singkawang seperti beberapa tahun yang lalu, daripada dikelola oleh pemerintah dalam sebuah kepanitiaan yang menurut mereka sangat sarat kepentingan politik.

Harapan pada kembalinya otentisitas tatung, dalam hal ini fungsi ritual lebih diutamakan pada nilai-nilai sakral atau tujuan utama perayaan Cap Go Meh sebagai upacara tolak bala ketimbang semata-mata untuk tujuan pariwisata, (seperti pada saat dikelola oleh organisasi-organisasi agama seperti MTI dan Majelis Tri Dharma), mereka buktikan dengan penolakan

---

9 Wawancara pribadi. 15 Nopember 2012.

kedua ormas ini untuk bergabung dalam satu meja altar sembahyang yang dibuat oleh pemerintah. Akibatnya, dalam festival tersebut terjadi tiga konsentrasi besar massa baik tatung maupun pengunjung; altar pemerintah dipusatkan di Jalan Diponegoro, altar Tri Dharma di Jalan Budi Utomo dan altar MTI di Jalan Saman Bujang Singkawang.

Hampir disetiap tahunnya, persoalan pengelolaan ritual pada perayaan Cap Go Meh selalu menimbulkan polemik diantara beberapa kelompok terutama yang berhubungan dengan pendirian altar. Bagi kelompok Panitia yang di SK kan oleh pemkot Singkawang, mereka selalu ingin agar altar cukup 1 saja, yaitu altar yang didirikan oleh panitia yang di unjuk oleh pemerintah. Sementara, bagi kelompok Tri Dharma (diketuai oleh Bong Wui Khong) dan Majelis Tao Indonesia (diketuai oleh Tjai Ket Khiong) seperti tahun-tahun yang lalu mendirikan secara mandiri altar di tengah kota Singkawang dalam perayaan Cap Go Meh dan meminta pemerintah tidak ikut campur dalam hal peribadatan umat Tri Dharma (Khonghucu, Tao dan Buddha) karena sembahyang altar merupakan unsur ritual dan bukan sebuah festival. Mereka berpandangan bahwa altar adalah aktivitas sakral yang tidak bisa diatur oleh pemerintah, berbeda dengan pengaturan festival (pawai tatung) bagi dua kelompok terakhir ini tidak bermasalah.

Pihak Tri Dharma dan Majelis Tao Indonesia juga melakukan protes atas kepanitiaan yang selalu menunjuk orang Jakarta atau “orangnya walikota” sebagai panitia sementara Majelis Tri Dharma dan Majelis Tao tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan. Bahkan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) yang menjadi tempat perkumpulan tokoh-tokoh Tionghoa juga tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan. Hal inilah yang membuat kelompok Tri Dharma dan MTI menuding bahwa kelompok panitia yang ditunjuk pemerintah hanyalah boneka dan kaki tangan bagi kelompok-kelompok tertentu yang bermaksud memanfaatkan festival Cap Go Meh demi keuntungan politik dan ekonomi kelompok-kelompok tersebut.





*Gambar 4*  
**Tempat lelang dan altar Majelis Tao Indonesia Resort Singkawang**



*Gambar 5*  
**Tempat lelang dan altar Majelis Tri Dharma Indonesia Singkawang**

Bagi kelompok panitia yang dibentuk pemerintah, Kota Singkawang mereka merasa perlu menyatukan altar dalam satu lokasi dalam pengelolaannya agar selama perayaan Cap Go Meh peserta festival dapat diarahkan dan diatur dengan baik, mengingat banyaknya peserta festival dan membludaknya penonton yang menyaksikan festival tahunan kota Singkawang ini. Selain itu, mereka juga berharap diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan yang dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, menjawab sindiran atas penyalahgunaan pengelolaan hasil lelang, panitia mencoba meluruskan dengan menyatakan bahwa seluruh pemasukan dari hasil lelang dipergunakan untuk pembiayaan festival Cap Go Meh.

## **2. FORUM KOMUNIKASI ETNIS TIONGHOA (FOKET)**

Foket adalah akronim dari Forum Komunikasi Etnik Tionghoa. Berdiri pada 15 Januari 2000. Kini usianya—jika merujuk pertumbuhan anak manusia—sudah memasuki masa remaja, 13 tahun. Sejarah berdirinya Foket adalah rasialisme dan diskriminasi yang dirasakan warga Tionghoa selama masa rezim Orde Baru. Rasialisme dan diskriminasi ini masih terjadi walaupun di Indonesia telah menggelinding bagaikan bola salju gerakan reformasi.

Reformasi menegaskan gerakan antikorupsi, kolusi dan nepotisme yang berada di pemerintahan Orde Baru. Penegakan hukum dirasakan sangat lemah terutama kepada rakyat kecil serta moralitas kebangsaan semakin terkikis. Warga Tionghoa kerap menjadi “sapi perah”. Mulai dari hal-hal kecil seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), perizinan, pajak, dan lain-lain.

Foket mengamati bahwa sikap masyarakat secara umum terhadap praktik rasial harus dilawan. Terlebih masih sedikit organisasi atau kelembagaan yang tekun melawan tindakan diskriminatif. Padahal masyarakat Tionghoa juga adalah salah satu komponen bangsa merupakan masyarakat hukum dengan segala keanekaragaman budaya, adat-istiadat, serta bernaung di bawah panji-panji Bhinneka Tunggal Ika. Slogan Bhinneka Tunggal Ika

itu menekankan *adagium* bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Bangsa Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Soempah Pemoeda, pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi falsafah negara yang digenggam erat Burung Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bagi Foket adalah pemersatu anak bangsa. Khususnya dalam mewarisi nilai-nilai perjuangan dengan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Foket dibentuk dari sekumpulan orang yang tergerak hatinya untuk menjalin komunikasi berbasis etnis Tionghoa di Balai Pertemuan Kelurahan atau Kecamatan Pasiran Jalan Johana Godang, Minggu, 15 Januari 2000 pukul 21.00 WIB. Wilayah kerjanya mencakup tiga kabupaten. Dimulai dari Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dalam menjalankan roda organisasi, Foket berpedoman kepada semboyan: *tidak mengalah, tidak merasa kalah, tetapi mencapai tujuan*. Terpilih sebagai Ketua Foket pada waktu itu adalah A Kenny Kumala dan Sekretaris Ng Nam Jiu.

Falsafah tidak mengalah, tidak merasa kalah, tetapi mencapai tujuan mengandung maksud membela kepentingan masyarakat dengan jalur damai dalam koridor kekeluargaan, musyawarah-mufakat. Jika ditemui jalan buntu, maka jalur hukum sepenuhnya yang ditempuh. Dengan demikian berlaku *paradigma* demokrasi.

Usaha diskriminasi yang dilakukan pihak-pihak luar dinilai sebagai sesuatu yang telah usang. Untuk itulah Foket bersemboyan: *garis rasial garis usang*. Sebuah kesadaran berbasis sejarah disaat penjajahan Belanda melakukan politik pecah-belah (*divide et impera*).

Lima tonggak ditancapkan sebagai tujuan dari berdirinya Foket. Pertama, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Tionghoa di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, mendukung reformasi dan penegakan supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia. Ketiga, membina dan mengembangkan hubungan yang serasi antaretnis, agama dan golongan. Keempat, menumbuhkembangkan rasa

kesetiakawanan sosial antaranggota sehingga Foket benar-benar mampu menjadi wadah bagi masyarakat etnis Tionghoa. Kelima, memberikan perlindungan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat etnis Tionghoa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Foket antara lain membantu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Proaktif tampil dalam segala kegiatan kemasyarakatan dalam rangka menyejajarkan martabat etnis Tionghoa bersama etnis lainnya. Menggali kembali nilai-nilai sejarah, kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia yang selama ini hilang dikungkung oleh rezim Orde Baru, melestarikan kembali serta mempromosikan budaya Tionghoa ini agar menjadi bagian dari budaya Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dalam arti yang sesungguhnya.

Kenny Kumala yang memimpin Foket dikenal sebagai aktivis. Dia juga terjun ke panggung politik dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Suaranya cukup vokal memperjuangkan hak-hak masyarakat maupun agenda-agenda reformasi.

Menurut Kenny Kumala di awal Orde Reformasi dia diminta untuk membuat dialog antaretnis, namun di kalangan Tionghoa masih belum yakin keran keterbukaan benar-benar terjadi. Pada saat itu organisasi Tionghoa yang berjalan hanyalah Yayasan Kematian dan Pemadam Kebakaran. Kedua organisasi tersebut berada di wilayah kerja sangat taktis dan pragmatis. Pada kurun waktu tersebut atraksi tatung juga masih dilarang untuk tampil. Untuk itulah Foket didirikan demi menjembatani kebekuan yang melingkupi segenap warga Tionghoa pada waktu itu.



**Gambar 6. Kenny Kumala dan tim Peneliti**

Kendati Kenny Kumala terjun di panggung politik, namun dia mengatakan tidak semua organisasi Tionghoa menjalankan politik praktis. Selain itu Foket yang juga membantu warga yang kemalangan akibat musibah kebakaran. Foket menghimpun dana sosial untuk membangun kembali rumah-rumah yang terbakar dengan dinding batako serta beratapkan daun nipah atau sagu. Foket juga membangun sekolah taman kanak-kanak.

Kini gema aktivitas Foket tidak sekeras awal pembentukannya. Menurut Kenny Kumala hal ini disebabkan semakin mencairnya komunikasi politik dan pragmatisme hidup bermasyarakat karena agama Konghucu sudah diakui keberadaannya, UU Anti Diskriminasi telah disahkan negara, kebudayaan tatung, Imlek dan Cap Go Meh telah diperkenankan. Bahkan tahun baru Imlek telah menjadi hari libur nasional. Di Kota Singkawang, tradisi Cap Go Meh menjadi agenda pariwisata tahunan nasional. Menurutnya Foket menjadi tidak terlalu penting lagi. Pada sisi lainnya, bertumbuhan organisasi lain seperti Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) lebih fokus

mengurusi budaya. MABT bahkan terbentuk di seluruh wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Jakarta.

Tampilnya figur Hasan Karman—warga Tionghoa—sebagai Walikota Singkawang hasil Pilkada Langsung tahun 2007 menurut Kenny Kumala merupakan simbol berhasilnya putra daerah terbaik menjadi pemimpin di wilayahnya. Namun lima tahun kepemimpinan Hasan Karman berpasangan dengan Edy R Yakob tidak berlanjut akibat “pecah suara”. Pecah suara ini dihitung secara matematis, hasil pilkada 62 persen pemilih adalah warga Tionghoa. Namun kandidat Tionghoa yang maju menjadi kandidat lebih dari satu. Sementara kompetitor adalah mantan *incumbent* yang pernah dikalahkan Hasan Karman, yakni Awang Ishak. Awang Ishak adalah kandidat satu-satunya Melayu (Muslim) sehingga suara Melayu mengerucut kepada diri Awang-Abdul Muthalib, sedangkan suara warga Tionghoa terpecah-belah menjadi tiga. Pertama Hasan Karman, kedua Nusantio Setiadi dan ketiga Henoch Thomas.

Pada Selasa tanggal 25 September 2012 KPUD Kota Singkawang melalui rapat pleno menetapkan pasangan Awang Ishak-Abdul Muthalib menjadi Walikota Singkawang periode 2012-2017 dengan mengantongi suara sebanyak 41.252 (45,37 persen). Sedangkan Hasan Karman-Ahyadi sebanyak 41.252 (42,34 persen), Nusantio Setiadi-Tasman 9.602 suara (9,85 persen), dan Henoch Thomas-Rozanuddin meraih 2.381 suara (2,44 persen). Kenny Kumala melihat perpecahan elit politik itu mengakibatkan banyak pemilih Tionghoa yang abstain, atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Kenny Kumala berpandangan sama dengan kandidat Tionghoa yang kalah seperti Nusantio maupun Hasan Karman. Nusantio kepada media massa mengatakan proses pemilihan sudah demokratis. Menang-kalah seperti di ajang Pilwako juga terjadi di daerah lainnya sebab inilah sistem di negara demokrasi, oleh karena itu hasilnya harus diterima secara terbuka.

Di tempat terpisah, seusai menghadiri Hut Nabi Konghucu yang ke-2653 di Hotel Aston Kota Pontianak Hasan Karman menyatakan menerima hasil Pilkada dengan “legowo”. Dia juga menjamin bahwa Kota Singkawang aman dari tindakan anarkis,

apalagi konflik komunal, walaupun dia sempat menggugat pelaksanaan Pilwako kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Namun gugatan itu dinyatakan MK: ditolak. Kota Singkawang tetap aman. Pembangunan berlanjut. Suksesi berjalan dengan aman, tertib, lancar.

### 3. YAYASAN PEMADAM KEBAKARAN

Relasi dagang dan tambang yang terjadi di Kalimantan Barat menyebabkan secara periodik warga Cina berdatangan ke daerah ini. Dikarenakan jumlah penduduknya bertambah, mereka melakukan antisipasi, termasuk antisipasi kebakaranapi. Di wilayah pemukiman yang padat, kebakaran sering terjadi.

Untuk mengantisipasi kebakaran Kota Singkawang memiliki beberapa yayasan pemadam kebakaran. Sebagian besar pemadam kebakaran yang ada di Kota Singkawang adalah cabang dari yayasan pemadam kebakaran di Kota Pontianak seperti Budi Pekerti, Panca Bakti dan Bhakti Suci.

Pemadam Kebakaran Budi Pekerti berpusat di Jalan Gajahmada Pontianak. Kelahirannya diinspirasi dari Badan Pemadam Api Siantan yang berdiri sejak tahun 1949. BPAS ini pernah dipimpin oleh Ateng Tanjaya pada periode 1984-1996. Ateng Tanjaya turut membina dan membesarkan sejumlah organisasi pemadam kebakaran di Kota Singkawang.

Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) Dwi Tunggal adalah salah satu yang tertua di Kota Singkawang. Kini usianya sudah 18 tahun. Alamat di Jalan Dwi Tunggal No 32C, Kelurahan Layo, Kecamatan Singkawang Barat. BPKS Dwi Tunggal ini diketuai oleh Bong Cin Nen yang juga politisi serta pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang. Sementara Ateng Tanjaya turut hadir ketika perhelatan ulang tahun BPKS Dwi Tunggal di Kota Singkawang.

Sebagaimana arahan Ateng Tanjaya, setiap anggota BPKS Dwi Tunggal selalu *standby* siang dan malam di poskonya sesuai jadwal piket. Begitu satuan piket mendapatkan laporan, informasi akan adanya musibah kebakaran segera disebar melalui *handy talkie* (HT). Kini HT kalah populer dengan *handphone* (HP).



**Gambar 7. Sekretariat Yayasan Pemadam Kebakaran Dwi Tunggal**

Selaku Ketua BPKS Dwi Tunggal, Bong Cin Nen dibantu oleh seorang wakil bernama Lie Tjok Djan. Lie Tok Djan berperan mengelola secara teknis organisasi. Misalnya mengumpulkan anggota jika terjadi musibah kebakaran di suatu tempat. Baik untuk wilayah kerja di Kota Singkawang, Bengkayang, bahkan Tebas-Sambas.

Para anggota dalam waktu lima menit sudah berkumpul di posko. Mereka bergerak cepat untuk berkumpul karena berdomisili di satu wilayah yang sama. Adapun anggota yang jauh kediamannya bisa menyusul dengan kendaraan bermotor ke tempat kejadian perkara (TKP).

Yayasan kebakaran Dwi Tunggal terdiri dari 62 anggota, 22 relawan, dan 42 orang pengurus. Syarat menjadi anggotanya cukup berat, yakni pertama, memiliki pekerjaan tetap dan kedua, tidak tergantung kepada orang lain. Demikianlah misi Dwi Tunggal adalah kemanusiaan.

Dana yang dibutuhkan untuk peralatan, bahan, dan perawatan dikelola yayasan bersumber dari patungan anggota



maupun donatur. Dana dikelola untuk pengadaan alat dan pelatihan agar keahlian anggota meningkat seperti pada bagian penyemprotan air, mesin air, hingga sopir. Pelatihan tersebut dilengkapi dengan kemampuan penanggulangan bencana agar tidak hanya api yang berhasil dipadamkan, namun juga korban bisa diselamatkan.



**Gambar 8. Tim pemadam kebakaran yang siap melayani masyarakat**

Yayasan pemadam kebakaran Dwi Tunggal memiliki dua unit mobil terdiri dari truk dan kijang bak terbuka yang sudah dimodifikasi. Di dalam kendaraan dimuat 40 unit selang, 2 mesin besar, dan 4 mesin kecil semprot. Wilayah kerja Dwi Tunggal selama ini selain Kota Singkawang juga ke Bengkayang dan Sambas. Ketiga kota besar wilayah utara Kalbar ini kerap disebut Singbebas. Yakni akronim dari Singkawang, Bengkayang, Sambas.

Berdasarkan pengalaman selama ini penyebab kebakaran terbesar yang melanda pemukiman adalah akibat konsleting listrik dan kelalaian manusia. Faktor lainnya adalah lahan gambut yang mudah terbakar di kala musim kemarau.

Pekerjaan sosial pemadam kebakaran yang dilakukan organisasi-organisasi pemadam kebakaran Tionghoa adalah wujud panggilan jiwa. Mereka membuat pernyataan untuk sanggup menanggung segala resiko yang terjadi. Hal ini diibaratkan dengan kontrak mati atau harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu jika mendaftar sebagai relawan atau anggota, maka syaratnya adalah harus berani. Bekerja tanpa digaji.

Tidak mudah bagi warga Tionghoa menjalankan misi kemanusiaan ini. Hal itu disebabkan oleh psikologi setiap orang yang dilanda musibah pada umumnya panik. Mereka kerap mencaci keterlambatan tim pemadam untuk melumpuhkan api dalam tempo sesingkat-singkatnya sehingga aset berharga mereka tidak bisa terselamatkan. Bahkan tidak jarang nyawa pun melayang.

Untuk mengantisipasi kritik pedas itu, kepada para anggota diberikan pelatihan bagaimana menghadapi komentar masyarakat dengan lembut dan dingin. Biasanya mereka menerapkan rumus jitu bahwa pernyataan resmi akan disampaikan langsung oleh ketua. Dengan demikian tugas-tugas lapangan bisa berjalan sebaik mungkin.

Latihan menjadi kata kunci di organisasi pemadam kebakaran Kota Singkawang. Selain komunikasi, juga latihan mencari titik air. Sebab kerap kali di medan tugas, selang air mereka direbut oleh oknum warga yang panik. Oleh karena itu pelatihan menanamkan jiwa kesabaran, ketabahan, dan cara berkomunikasi sebaik mungkin kepada warga.

Pemadam kebakaran tidak sekedar menjalankan tugas ketika api sedang berkobar, namun juga melakukan kegiatan antisipasi. Pertama berbentuk sosialisasi bagaimana cara pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Kedua, pencegahan yang diperlukan agar tidak terjadi musibah kebakaran.

Selaku Ketua dari BPKS Dwi Tunggal, Bong Cin Nen mengatakan bahwa secara umum di Kota Singkawang warga

Tionghoa rindu akan terlibat aktif di berbagai bidang. Namun dikarenakan katup saluran di masa orde baru yang tersumbat, mereka melibatkan diri di lembaga seperti pemadam kebakaran. Setelah katub politik dan kebudayaan serta religiusitas terbuka lebar di alam reformasi, relawan sebagai pemadam kebakaran tetap tumbuh dan berkembang.

Bong Cin Nen menggarisbawahi sikap dasar warga Tionghoa adalah ulet. Mereka bisa tumbuh dan berkembang walaupun dalam tekanan yang sangat kuat di ruang yang sangat sempit. Misalnya penyaluran keuletan itu dalam bentuk lembaga sosial pemadam kebakaran. Justru di sana mereka menunjukkan empatinya kepada bangsa dan negara dengan menyelamatkan masyarakat yang perlu ditolong tanpa melihat suku, agama, apalagi partai politik. Pada sisi lain, niat baik dari lubuk hati yang terdalam itu adalah aktualisasi dari kepercayaan kepada Tuhan melalui ajaran agama yang dianut warga Tionghoa. Apakah itu Tao, Konghucu, maupun Buddha (Tri Dharma). Ajaran utama dari kesemua Tri Dharma adalah cinta kasih kepada sesama umat manusia atau makhluk yang ada di muka bumi. Penekanannya adalah budi pekerti yang mulia. Persis dengan ajaran Islam, yakni *akhlakul karimah*. Atau sama dengan ajaran Katolik/Protestan, bahwa setiap individu harus menjadi “juru selamat” bagi lingkungan.

Warga Tionghoa yang beruntung melalui aktivitas di partai politik lolos menjadi wakil rakyat di DPRD maupun DPR-RI. Bahkan sudah mulai muncul ke permukaan adanya figur Tionghoa yang menjadi kepala daerah. Sebagai contoh Yansen Akun Efendy berhasil menjadi Bupati di Kabupaten Sanggau dan Hasan Karman menjadi Walikota Singkawang. Bahkan dirinya pun bisa turut menentukan kebijakan politis melalui kedudukannya selaku anggota DPRD Kota Singkawang, asal Partai Golkar.

Sebelum era reformasi, keberuntungan hanya bisa digapai melalui Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah. Namun keterbatasan situasi politik menyebabkan banyak warga tidak tertampung untuk berkiprah di Golkar. Dengan demikian pada saat reformasi terjadi, banyak aktivis dari lembaga seperti

pemadam kebakaran menjadi agen atau pelopor bangkitnya partisipasi politik dan kebudayaan warga Tionghoa di Singkawang. Mereka sempat mengalami *euphoria* atau kegembiraan disaat mereka bisa menyalurkan segala potensinya untuk kemajuan bangsa dan negara.

Chia Miao Min, seorang warga di Kota Singkawang melihat aksi relawan di pemadam kebakaran sama dengan Bong Cin Nen. Dia mengharapkan agar semua yang dilakukan relawan dapat balasan setimpal dari Tuhan. Harapan besar semoga selalu sukses dalam mengemban tugas untuk kepentingan semua warga yang sangat memerlukan bantuan BPKS Dwi Tunggal yang ada di Kota Singkawang.

Hal senada diungkapkan Gou Go Siang. Menurutnya, dia sangat terharu kepada para relawan pemadam kebakaran BPKS Dwi Tunggal karena benar benar menggunakan hatinya untuk membantu warga. Mereka melaksanakan tugasnya pertaruhkan nyawa dan keluarga demi menolong dan berjuang memadamkan api yang dapat merenggut nyawanya.

Selain BPKS Dwi Tunggal di Kota Singkawang juga eksis BPKS Panca Bhakti, Widya Bhakti, Pasar Turi dan BKST Tuapekong. Antarsatu BPKS dengan BPKS lainnya saling bekerjasama. Begitupula para anggota maupun relawannya terdiri dari warga lintas etnis, agama, maupun golongan. Pada momentum ini kohesi sosial kewargaan semakin rapat sehingga sesama mereka tidak mudah diadu-domba karena merasa senasib-sepenanggungan. Mereka merasakan bersatu dalam sosialita kemasyarakatan yang plural, heterogen, majemuk atau beragam.

#### 4. YAYASAN KEMATIAN

Kelenteng tertua dibangun di Singkawang pada tahun 1933. Kelenteng ini dipercaya sebagai tempat berdiamnya Dewa Bumi Raya dan kini berada di Jalan Sejahtera, berdekatan dengan Masjid Raya Kota Singkawang. Sejak berdirinya yayasan kematian di Kota Singkawang yayasan yang menangani kematian warganya lebih terurus. Begitulah esensi dari sebuah organisasi, terutama fungsi organisasi yayasan kematian kepada warga

yang tidak mampu. Tidak memiliki sanak saudara. Atau secara finansial tidak sanggup, maka dikelola oleh organisasi kematian yang berpusat di kelenteng.

Pada tahun 1979 para pandita yang berasal dari Taiwan berkunjung ke Singkawang yang dibawa oleh Hi Muk Lin untuk merintis Ketuhanan Maitreya. Pada mulanya para pandita melakukan *pendiksaan* terhadap beberapa umat di rumah Djong Hon Djung alias Handoyo. Kedatangan kedua kalinya para pandita melakukan upacara *pendiksaan* kepada umat Buddha di Kantor Yayasan Bhakti Suci Singkawang. Penganut Buddha bertambah banyak sehingga perlu dibangun vihara dan sebuah yayasan.

Berdirinya Yayasan Vihara Dharma Maitreya melalui Akta No 6 tanggal 25 Maret 1980 di hadapan Notaris Morni Syahidan, SH dengan tujuan untuk kesejahteraan umat Buddha baik jasmani maupun rohani. Untuk mencapai tujuannya dibangun vihara-vihara atau kelenteng-kelenteng. Selain itu yayasan juga membangun asrama untuk anak yatim-piatu, orang-orang cacat dan lanjut usia. Ketika itu Djong Tjit Sen bertindak sebagai ketua dan Malik Belinus sebagai sekretaris.

Tim Pemakaman Warga Buddha Maitreya (PWBM) dibentuk pada 1 Juni 1981. Tim bertugas melaksanakan upacara pemakaman umat Buddha Maitreya sesuai keputusan badan pengurus. Rapat memutuskan untuk menambahkan program yayasan yaitu menyelenggarakan pemakaman atau penguburan anggota yayasan yang meninggal dunia. Selain itu memelihara dan mengurus tanah-tanah wakaf untuk pekuburan.

Pada tanggal 13 Maret 1983 nama Yayasan Vihara Dharma Buddha Maitreya disempurnakan menjadi Yayasan Dharma Buddha Maitreya. Dalam rapat tersebut sekretaris Malik Belinus juga mengusulkan agar yayasan mendirikan sekolah. Usulan ini diterima dan dilaksanakan dengan ciri khas Budhis.

Yayasan ini tumbuh secara modern dengan menetapkan masa jabatan selama lima tahun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Terhitung masa bakti sejak 17 Mei 1985-17 Mei 1990 dan seterusnya dapat dipilih kembali sesuai AD/ART. Di sini menunjukkan bahwa azas demokrasi diterapkan dari lembaga-lembaga kecil, tidak terkecuali lembaga

yang mengurus kematian.

Kemudian yayasan mendirikan taman kanak-kanak Metta, SD Karuna, SMP Barito dan SMK Mudita Singkawang. Hingga saat ini sudah banyak melahirkan alumnus untuk mengabdikan bagi Nusantara.

Seiring peran dan fungsi di tengah pembangunan bangsa dan negara, yayasan yang besar ini juga turut mengalami dinamika eksternal dan internal. Sepanjang tahun 2005-2008 terjadi konflik. Ketua Yayasan memasukkan nama Prayogo Pangestu dan Agustinus Aryawan sebagai Dewan Kehormatan Abadi dan merubah akte Yayasan Dharma Buddha Maitreya tanpa melalui rapat pengurus. Pada tanggal 13 Februari 2008 ketua yayasan menghadap Notaris Barbara Bonardi Wibowo untuk merubah akte yayasan dan menambah orang-orang Jakarta asal Singkawang, diantaranya Fuidy Luckman, Tang Dio Budiman Wibowo, Hadris Setiawan, Tjai Miao Lin. Tujuan ketua yayasan tiada lain untuk memperkuat dirinya agar terpilih kembali.

Pada tanggal 21 September 2008 yayasan mengadakan rapat luar biasa yang dihadiri seluruh pengurus Yayasan Dharma Buddha Maitreya (YDBM) dan orang-orang Jakarta yang juga anggota Parmasis (Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya) dan para kepala sekolah. Pada saat itu orang-orang Jakarta mengatakan YDBM dalam masalah besar, sebab belum menyesuaikan dengan undang-undang dan tidak membayar pajak, jika suatu hari diperiksa oleh pemerintah akan berakibat fatal. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mewajibkan sekolah harus berada di bawah naungan yayasan pendidikan, tidak boleh bercampur dengan yayasan sosial. Oleh karena itu, YDBM harus dipisahkan kepengurusannya. Kemudian muncullah Yayasan Dharma Barito Singkawang untuk mengurus sekolah TK, SD, SMP, SMK. Untuk mengurus vihara cukup lembaga keagamaan saja, sedangkan pemakaman umat Buddha didirikan Perkumpulan Pemakaman Umat Buddha Maitreya.

Yayasan kematian terikat kuat dengan ajaran menyangkut hubungan antara yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Secara tradisi warga Tionghoa Singkawang mengenal populer dengan istilah Cheng Beng—sembahyang kubur. Famili berziarah

ke makam kedua orang tua atau leluhur untuk mengenang segenap jasa dan kebaikan mereka.

Liu Jun Liong salah seorang peziarah di Kota Singkawang di kompleks pemakaman Tionghoa Pokok Manggis mengatakan ia dan keluarganya setiap tahun melakukan sembahyang kubur—Cheng Beng. Walaupun di dunia kedua orang tua atau leluhur sudah lama meninggal, namun mereka masih hidup di alam “sana”. Mereka tetap melihat anak-cucunya di dunia sehingga sebagai anak-cucu wajib memberikan rasa hormat dan bakti kepada mereka.

Ketua Majelis Tao Indonesia (MTI) Kota Singkawang Tjai Ket Kiong menyatakan sembahyang Cheng Beng merupakan sembahyang wajib bagi seluruh masyarakat Tionghoa untuk mengenang kembali kebajikan dan memberikan penghormatan, baik kepada orangtua maupun para leluhur.

Prosesi sembahyang Cheng Beng dimulai dengan menyalakan lilin dan dupa, kemudian dilanjutkan dengan berlutut dan berdoa. Pembacaan doa ditujukan kepada Dewa Bumi alias Thu Thi Pak Kung yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah datang ke makam leluhur untuk sembahyang. Setelah itu barulah sembahyang di makam leluhur atau orang tua dan memanjatkan doa. Sembahyang cheng beng disempurnakan dengan membawa aneka jenis kue, buah-buahan dan makanan vegetarian, serta tidak ketinggalan membawa kertas sembahyang berwarna emas dan perak untuk menerangi kubur ataupun ruh leluhur. Perlengkapan ibadah ini menggairahkan industri rumah tangga atau ekonomi setempat.

Umumnya doa yang dipanjatkan adalah berkah kesehatan, keselamatan keluarga agar aman sentosa. Juga doa mohon dimudahkan rejeki, dilancarkan segala usaha, maupun jodoh. Kepada orang tua dan leluhur agar bahagia di alam “sana”. Diharapkan mereka terlahir kembali di alam yang menyenangkan.

Seusai sembahyang dianjurkan memperbanyak sedekah. Terutama kepada mereka yang telah membantu membersihkan makam atau menerangkan jalannya prosesi sembahyang. Di sini terkandung nilai-nilai *interaksionis* yaitu orang kaya membantu orang yang miskin. Begitu pula lingkungan perlu dibersihkan,

sementara kegelapan dipungkasi dengan cahaya terang. Sasaran akhirnya adalah *balancing* atau keseimbangan dalam kehidupan menjamin tegaknya keadilan. Keadilan yang tegak menjadi kunci bagi tumbuh berkembangnya demokrasi yang hakiki.

Sepanjang tahun ada dua tenggat waktu sembahyang kubur. Pertama, Cheng Beng di setiap bulan penanggalan lunar. Kedua, bulan tujuh Imlek yang dikenal dengan istilah Cioko atau Chau Tu atau sembahyang yang ditujukan kepada arwah terlantar. Sembahyang kubur ini dilakukan warga etnis Tionghoa yang menganut agama Tri Dharma (Buddha, Taoisme, Khonghucu).

## 5. YAYASAN TZU CHI

Di Kota yang luasnya 504 km<sup>2</sup> sisi utara berbatasan dengan Sambas, selatan berbatasan dengan Sungai Raya Bengkayang, timur berbatasan dengan Samalantan Bengkayang, barat berbatasan dengan Laut China Selatan-Natuna, lembaga sosial Tzu Chi membuka cabangnya pada 6 Nopember 2010. Tzu Chi sendiri di Indonesia berdiri pada 28 September 1994 dan merupakan kantor cabang dari Yayasan Buddha Tzu Chi Internasional yang berpusat di Hualien, Taiwan. Sejak didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966, hingga saat ini Tzu Chi telah menyebar di sedikitnya 53 negara dari lima benua.

Tzu Chi merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang lintas suku, agama, ras, dan negara yang berdasarkan prinsip cinta kasih universal.<sup>10</sup> Aktivitas Tzu Chi dibagi menjadi 4 misi utama: Pertama, misi amal. Misi amal ini dengan membantu masyarakat tidak mampu, baik yang tertimpa bencana alam maupun yang terkena musibah.

Kedua, misi kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengadakan pengobatan gratis, mendirikan rumah sakit, sekolah kedokteran, dan poliklinik.

Ketiga, misi pendidikan yaitu membentuk manusia seutuhnya, tidak hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, namun juga budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan.

Keempat, misi budaya kemanusiaan yaitu menjernihkan batin manusia melalui media cetak, elektronik, dan internet

---

10 Bulletin Tzu Chi No 86, September 2012.



dengan berlandaskan budaya cinta kasih universal.

Tetiono adalah Ketua Tzu Chi Singkawang. Menurutnya, dengan kantor cabang Tzu Chi di Kota Seribu Kelenteng ini berarti memberi ruang gerak yang lebih leluasa untuk berbuat amal lebih banyak lagi.

Pada ulang tahun pertama Tsu Chi Singkawang di tahun 2011, Tetiono mengangkat tema *Kedamaian di Dunia Berawal dari Niat Baik Anda, sedangkan Bencana yang Terjadi di Dunia Berawal dari Sekilas Niat Jahat yang Timbul*. Tema ini dikutip dari Kata Perenungan Master Cheng Yen.

Master Cheng Yen adalah Bunda Teresa Asia. Dia lahir di Taiwan pada tanggal 11 Mei 1937 dan menjadi guru sekaligus filantropis. Yayasan Tzu Chi didirikannya pada tahun 1966.<sup>11</sup>

Menurut sumber resmi Tzu Chi, Master Cheng Yen memiliki kodrat luwes dan tulus serta berbakti. Dia adalah seorang vegetarian. Artinya tidak memakan daging melainkan hanya sayur-mayur dan buah-buahan. Dia bertanya apa hakikat kehidupan ini? Datang dari mana dan akan menuju ke mana? Pertanyaan epistemologis itu muncul deras akibat kematian mendadak yang menyebabkan ayahnya wafat. Peristiwa di usia Cheng Yen masih belia ini menjadi titik balik bagi kehidupan selanjutnya sehingga dia sering mengunjungi Vihara Ci Yun untuk mempelajari agama Buddha. Dia memberikan kepedulian kepada masyarakat karena menyayangi masyarakat serta semua makhluk untuk memberikan kebahagiaan sejati.

Cheng Yen adalah nama Budhis atas Biksuni. Nama ini dianugerahkan oleh Guru Dharma Yin Sun. Pesan Guru Dharma Yin Sun kepadanya sesudah menjadi Biksuni, Anda harus senantiasa bertindak demi Buddha dan semua makhluk. Nama kecil Cheng Yen sendiri adalah Hui Zhang. Cheng Yen hapal makna ajaran Sutra Lotus dan mengajarkannya.<sup>12</sup>

Sutra Teratai adalah catatan ceramah yang disampaikan oleh Buddha pada akhir hidupnya. Kebiasaan dalam Mahayana

---

11 [en.wikipedia.org/wiki/Cheng\\_Yen](http://en.wikipedia.org/wiki/Cheng_Yen).

12 [www.tzuchi.or.id/pendiri.php](http://www.tzuchi.or.id/pendiri.php).

menyatakan bahwa sutra ini ditulis pada masa kehidupan Buddha dan disimpan selama 500 tahun di alam naga. Setelah itu sutra ini diperkenalkan kembali kepada alam manusia bertepatan dengan Sidang Agung Buddhis keempat. Ajaran sutra ini mengaku bahwa manusia sudah dapat mengerti isi sutra pada masa kehidupan Buddha, oleh karenanya pengajaran itu harus dipertahankan.

Sebelum resmi membuka kantor cabang pada tahun 2010 Tzu Chi di Singkawang sudah melakukan derma bakti sosial sejak tahun 2007. Ketua Cabang Tzu Chi Singkawang Tetiono mengakui bahwa pada bulan Oktober dibagikan beras kepada warga miskin sebanyak 500 ton. Selanjutnya pada tahun 2008 mengadakan bakti sosial. Tidak hanya untuk wilayah Singkawang, namun juga se-Kalimantan Barat. Sentuhan bakti sosial ini pada bidang kesehatan berupa pengobatan gratis. Jenis penyakit yang diobati gratis itu adalah penyakit mata katarak dan bibir sumbing. karena kedua penyakit ini banyak ditemukan di Kalbar.

Warga miskin yang ingin kesehatannya diperiksa terlebih dahulu didaftar dengan mengisi formulir. Setelah formulir diisi baru kemudian dicek. Bantuan kesehatan gratis ini tanpa melihat suku, agama, atau golongan maupun partai politik. Bagi pasien yang akut segera dirujuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit terdekat. Rujukan ke UGD dengan tujuan penyelamatan jiwa terlebih dahulu. Setelah itu Tzu Chi melakukan pendampingan seperti membantu pengurusan jaminan sosial kesehatan (jamsoskes) atau asuransi kesehatan (askes).

Pasien atas nama Juliana dan Viona yang masing-masing berasal dari Tebas dan Semparuk telah berhasil menjalani operasi. Begitu juga empat pasien dirawat karena penyakit jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta.

Di bidang pendidikan Tzu Chi Singkawang membantu anak yang kurang mampu sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Pada umumnya bantuan itu dalam bentuk pembebasan biaya SPP.

Pengurus Tzu Chi Singkawang mencontoh keteladanan Cheng Yen sebagai master. Bahwa derma bakti mesti dilakukan tanpa melihat suku, agama, ataupun bangsa. Dampaknya Tzu Chi menyebar cepat ke lima benua, termasuk membuka cabang di

Kota Singkawang.



**Gambar 9. Bersama pengurus Tzu Chi di Sekretariat Jl. Kuala**

Bantuan berupa 500 ton beras menjadi awal kedekatan Tzu Chi kepada warga. Cara pendekatannya adalah kunjungan dari RT ke RT. Tzu Chi melakukan pendataan apakah seseorang benar-benar layak menerima bantuan. Hal ini menimbulkan hubungan psikologis yang baik, antara pemberi dan penerima berlandaskan cinta kasih tanpa *background* politik, etnis, ataupun agama.

Pengisian formulir untuk perobatan gratis terkumpul 500 lembar. Dari total jumlah tersebut berhasil dilayani sebanyak 200 pasien. Demikian Tzu Chi menghangatkan budaya kasih yang benih-benihnya telah tertanam sejak zaman dahulu kala, bangsa Indonesia hidup saling tolong-menolong dan hormat-menghormati antarsesama.

Budaya dalam pemahaman Tetiono adalah penggalangan bahwa setiap manusia adalah sama. Kesamaan itu tidak hanya fisik lahiriah, namun juga mental ruhaniah, karena setiap individu

manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu atas kontak lahiriah dan batiniah itu tidak jarang anggota Tzu Chi meneteskan air mata kebahagiaan karena telah mengulurkan bantuan menolong sesama manusia untuk warga miskin dan warga yang sakit. Kohesi sosial ini menyuburkan harmonisasi di suatu lingkungan. Persis seperti tema yang diusung Tzu Chi pada saat ulang tahunnya yang pertama: *Kedamaian di Dunia Berawal dari Niat Baik Anda, sedangkan Bencana yang Terjadi di Dunia Berawal dari Sekilas Niat Jahat yang Timbul*.

Gerakan Tzu Chi turut mewarnai dinamika Kota Singkawang termasuk Pilwako di akhir tahun 2012 karena mereka bukan merupakan “*underbow*” partai politik tertentu. Sebaliknya mereka merajut harmoni sebagai kohesi sosial yang memapankan keamanan lantaran hidup penuh toleransi serta welas asih.

Aktivist Tzu Chi lainnya, Andi Vincent mengakui bahwa lembaga sosial Tsu Chi mengajarkan 10 prinsip, salah satunya adalah tidak berpolitik dan berdemonstrasi. Selengkapnya 10 prinsip itu sebagai berikut:

1. tidak membunuh,
2. tidak mencuri/merampok,
3. tidak melakukan asusila,
4. tidak berbohong atau mengada-ada (iming-iming),
5. tidak meminum minuman keras (alkohol),
6. tidak merokok, narkoba, tidak makan buah pinang,
7. tidak berjudi,
8. mematuhi peraturan lalu lintas,
9. berbakti kepada orang tua dan berlaku lemah lembut dalam berperilaku serta berbicara, dan
10. tidak berpolitik dan berdemonstrasi.

Pada tahun 2013 Tzu Chi Kota Singkawang merencanakan bakti sosial yang melibatkan rumah sakit. Dalam hal ini Tzu Chi mencari alternatif rumah sakit mana yang terbaik dan siap pakai.



**Gambar 10.** Kantor sebagai pusat layanan masyarakat

Tzu Chi memperoleh dana dari sumbangan anggota maupun warga secara tidak mengikat. Bantuan dana pemerintah sama sekali bukan tujuan dan harapan dari Tzu Chi. Tzu Chi mandiri dan otonom memberikan bantuan atas prakarsa mandiri.

Untuk membina lingkungan hidup yang asri, Tzu Chi bekerjasama untuk gerakan penanaman sejuta pohon. Antara lain kerjasama itu bersama PKK Pemkot Singkawang dan Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) Kota Singkawang. Pihak Tzu Chi menyediakan pupuk, penyiraman, dan perawatan.

Tzu Chi terus bergerak di sektor sosial, termasuk menyalurkan tenaga kerja. Misalnya ada anggota yang membutuhkan tenaga kerja dan ada pencari kerja yang cocok maka diterima dan diperlakukan secara manusiawi. Sebagai contoh empat orang pemuda diterima bekerja di bidang pakan ternak. Dalam hal ini mereka yang mencari pekerjaan dihubungi terlebih

dahulu mau atau tidak bekerja di bidang peternakan. Adapun pencari kerja lain ada pula yang disalurkan sebagai karyawan gudang—tenaga angkut barang—dan penjaga konter *handphone* (HP) (yang diutamakan perempuan). Tzu Chi menegaskan prinsip utama dari suatu pekerjaan, yakni mendapatkan upah atau uang. Dengan uang itu, tenaga kerja bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menabung dan modal kerja. Prilaku Tzu Chi ini telah meringankan beban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Tzu Chi menjalin pula kerjasama dengan media. Selain media cetak, juga elektronik. Seperti siaran televisi lokal diharapkan tayangannya tidak mengandung unsur kekerasan. Tzu Chi mengutamakan pencerahan warga Singkawang dengan pendidikan budi pekerti melalui pribadi-pribadi maupun media massa.

Tzu Chi Singkawang tidak memiliki agenda khusus melainkan pertemuan rutin sekali seminggu. Isi pertemuan adalah pencerahan tentang pentingnya bekerja dan berbakti. Jam kerja dimulai pada pukul 04.00 WIB. Sementara Master Cheng Yen mencontohkan aktivitas dimulai pada pukul 01.00. Yayasan ini memiliki filosofi hidup “tidak kerja, tidak makan.”

Dalam pertemuan pencerahan seminggu sekali itu dijabarkan secara *global* akan fenomena kehidupan nyata. Seperti hari besar Waisak diberikan pencerahan untuk setiap pribadi tidak melakukan kejahatan dalam kehidupan.

Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2010 dilakukan Bazar Cinta Kasih Tzu Chi bertempat di Gedung Happy Building Jalan GM Situt Kota Singkawang. Bazar ini menjual bahan kebutuhan pokok sehari-hari termasuk pakaian pantas. Bazar ini dihadiri warga tidak kurang dari 1000 orang. Tidak terkecuali dihadiri relawan asal Jakarta maupun Malaysia. Setiap pengunjung mendapatkan kupon yang dapat ditukarkan dengan wahana bazar. Nilai kupon mengikuti aturan dan batas yang berlaku.

Nilai penjualan bazaar terkumpul dana Rp 204.850.000 sedangkan panitia berjumlah 100 orang. Dana tersebut dianggarkan sebagai modal kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis.

## 6. YAYASAN PERSATUAN MASYARAKAT SINGKAWANG DAN SEKITARNYA (PERMASIS)

### A. Latar Belakang Berdiri

Pada tanggal 8 April 2006 di Jakarta telah terbentuk Dewan Pengurus Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya (PERMASIS). Pendiri PERMASIS terdiri dari kurang lebih 60 pendiri kelahiran daerah eks Kabupaten Sambas sebelum pemekaran (Singkawang, Bengkayang dan Sambas). Undangan untuk pembentukan PERMASIS ini diiklankan di Pontianak Post pada tanggal 9 Januari 2006. Sebenarnya perkumpulan ini merupakan kelahiran baru dari wadah yang pernah dicetuskan tiga tahun yang lalu oleh Sugianto Gunawan (Ji Siu Liung), seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ketika itu perkumpulan tersebut belum menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kini perkumpulan tersebut telah menetapkan AD/ARTnya sebagai sebuah perkumpulan yang akan berkibrah dalam masalah sosial-budaya bagi kesejahteraan dan pembangunan di Singkawang dan sekitarnya. Enam puluh pendiri tersebut merupakan donatur dan kontributor yang telah berhasil mengumpulkan sejumlah dana sebagai dana abadi untuk melaksanakan visi dan misinya. Diharapkan donatur dan kontributor akan terus bertambah. Penggalangan dana ini perlu agar perkumpulan tersebut memiliki modal bergerak dan tidak perlu meminta sumbangan sana-sini untuk setiap kegiatannya.

Permasis merupakan organisasi Tionghoa terbesar dan terluas di Singkawang, kegiatannya terfokus pada sosial dan budaya, tidak terlibat pada politik praktis. Berawal dari seseorang bernama Fong Hi Yong mengutarakan idenya untuk mendirikan Permasis. Pada tahun 2008 Organisasi Keagamaan Islam seperti Muhammadiyah pernah menjalin kerja sama dengan Permasis dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Pengusaha dari Singkawang yang sukses di Jakarta seperti Yanto Cahadi membantu berdirinya Permasis dan membantu proses berjalannya yayasan ini dengan baik.

Augustinus Aryawan berusaha keras untuk mendirikan Permais Beliau pada waktu itu memanggil sekitar 20 pengusaha untuk mengeluarkan uang kurang lebih 50 Juta per orang, sehingga terkumpul pada saat itu kurang lebih 1 Milyar. Dana yang terkumpul itu untuk membuat rancangan (*draft*) pendirian dan kepengurusan Permais . Disamping itu dana tersebut untuk acara konggress yang dilaksanakan secara besar-besaran untuk membahas permasalahan dalam kepengurusan Permais di Jakarta.



**Gambar 11. Bersama perwakilan Permais Singkawang**

## **B. Visi Misi**

### **Visi**

1. Menggalang potensi seluruh masyarakat perantauan yang berasal dari Singkawang dan sekitarnya (eks Kabupaten Sambas sebelum pemekaran) untuk secara aktif turut serta membangun Singkawang dan sekitarnya dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, seperti di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
2. Sebagai wadah untuk menghimpun sumber daya masyarakat Singkawang dan sekitarnya di perantauan termasuk



simpatisannya, dalam menjalin dan meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang bermanfaat dan penuh pengertian bagi kebaikan dan kemajuan masyarakat Singkawang dimanapun mereka berada.

### **Misi**

1. Memberikan bantuan dan dukungan dalam arti seluas-luasnya kepada masyarakat Singkawang dan sekitarnya yang berada di dan/atau berasal dari Singkawang dan sekitarnya.
2. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, derajat, harkat dan martabat masyarakat Singkawang dan sekitarnya. Sehingga seluruh masyarakat Singkawang dan sekitarnya yang tertinggal dapat mencapai tingkat kehidupan dan penghidupan yang layak dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Susunan Pengurus**

Dalam susunan pengurus Permais melibatkan beberapa unsur jabatan, hal tersebut dapat terlihat secara jelas dari pengurusan periode 2012-2015. Adapun susunannya sebagai berikut:

#### **Dewan Kehormatan Masa Bakti 2012-2015:**

Ketua Kehormatan Abadi : Prayogo Pagestu

Ketua Kehormatan : Po Soen Kok, Augustinus Aryawan, Sugianto Gunawan, Popo Parulian, SH, Effendi Fermanto, Amin Supriadi, Lee Lei Kiew, Simon Liu, Robin, Simon Sutjipto, Teddy Sugianto, Mudji Sukardi, Ye Lian Fu, Prof. Ted Sioeng Hon, Phd, Fendy Sumatri, Adhi Hermanto, Herman Zhou.

#### **Dewan Penasehat Periode 2009-2012**

Ketua Dewan Penasehat : Amin Supriadi,

Fong Gunardi Frans, Sento Tanoro, Budeon Limarto Lim, Bong Tjhoi Luk, Sudjanto Suidiana, SH, Setien Lunardy, Euthymius Litanto, Cu Ting Liung, Pui Sin Tet, Tanny Budiwati, Alaex Em, Adi Prasetio, Lio Kurniawan, Hendro Wiyogo, Tju Thiam Loi, Hindarto Salim, Tjhai Sang Jun, Then Jovan Tirta, Andy Maratu, Bunardi, Chin Miao Fuk.

### **Dewan Pembina Masa Bakti 2012-2015**

Ketua Dewan Pembina : Augustinus Aryawan,  
Fuidy Luckman, Eutthymius Litanto, Kartono Kadir, Siang Suri  
Majaya, Ir Pui Sudarto, Popo Parulian, SH, Po Soen Kok, Robin,  
Fendy Sumantri, Eddy Tedjakusuma, Santoso Chalid, Antonius  
Lie.

### **Dewan Pengawas Masa Bakti 2012-2015**

Ketua Dewan Pengawas : Lie Fo Sen,  
Minardi Kong, Teguh Handoko Bambang, Ellen Tantra, Handris  
Setiawan.

### **Dewan Pengurus Masa Bakti 2012-2015**

Ketua Dewan Pengurus : Janto Tjahjadin  
Wakil Ketua I : Bong Hoi Siong  
Wakil Ketua II : Tonny Hendrawan  
Wakil Ketua III : Paulus Lie  
Wakil Ketua IV : Tonny Nurmala Putra, SH  
Sekretaris : Tjung Hok Sin  
Sekretaris Bahasa Indonesia : Januardi  
Sekretaris Bahasa Mandarin : Bun Sau Djung  
Ketua Bendahara : Hiasintio bidianto  
Wakil Ketua Bendahara : Siang Suri Majaya  
Anggota : Liu Djiu Buh  
Ketua Bid. Pendanaan Umum : Phiong Tjhiung Fo  
Anggota : Jo Siau Kong, Liong Bun  
Shu, Benediktus Widjaja  
  
Ketua Bidang Umum  
dan Ketua Bidang Iklan : Tangdio Budiman Wibowo  
Wakil Ketua Bidang Umum : Bong Tjin Ho  
Ketua Bidang Pendidikan : Liu Sin Fa  
wakil Ketua Bidang Pendidikan: Hie Po Ngi  
Anggota : Tjung Hok Sin, Ling Majaya,  
Hadinan Sutanto, Bun Sau  
Djung, Edi Effendi,  
Indra S. Hendrawan.

Ketua Bidang Kesenian : Farida  
 Wakil Ketua Bidang Kesenian : Bong Njiuk Moi  
 Ketua Bidang Kesejahteraan dan Sosial : Thomas Surya Kosasih  
 Anggota : Fam Sak Hin, Rudy C. (Acin)  
 Ketua Bidang Kepemudaan : Irwan Chung  
 wakil Ketua Bidang Kepemudaan : Tjhai Miao Lin  
 Anggota : Futarjo Fujiana, Jap Nam fa  
 Ketua Bidang Hukum dan Humas : Fam Joehanes SH, KN.  
 Anggota : Tjhin Jhon Sen, SH, MH.,  
 Liu Chong Loi.  
 Ketua Hubungan Singkawang : Soegianto Bonardy  
 Anggota : Phang Kenny, SE, Hieo Tjin  
 Khiong, Bong Kian Fui,  
 Erwin Supryanto, Dony  
 Harijaya, Bong Ci Khiun,  
 Lie Cok Jan, Tjong Chi Phin,  
 cristianus J., Chin Ka Khian,  
 Siauw Kin Fu (Wandy),  
 Herry Rusdi Bong.  
 Ketua hubungan Srikandi Tebas : Chin Miao Khim  
 Anggota : Lie Jung, Liong Cie Mie,  
 Then Siau Khim.

Buletin Permais (Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya: Singkawang, Bengkayang dan Sambas) edisi 24 Oktober-Desember 2010.

Permais buka kursus bahasa Mandarin tahun 2010

**Alamat Permais:**

Komplek Seasons City Blok B No.1-2-3-5

Jl. Latumenten, Jakarta 14440

Telpon +62-21 29071199 (Hunting), Fax. +62 21 29071188

Email: [info@permais.org](mailto:info@permais.org)

Website: [www.permais.org](http://www.permais.org)

**D. Program Kerja Secara Global**

Dalam melaksanakan Program Kerja (Proker) Permais

memberikan berbagai macam kegiatan yang didalamnya membantu sesama manusia. Dalam membantu sesama tidak didasari oleh satu kelompok etnis saja tetapi juga dilakukan dalam bentuk lintas etnis. dalam artian bahwa pemberian bantuan tidak pilih kasih karena didasari siapa yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan tersebut maka orang tersebut yang harus dibantu. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Permais di Kota Singkawang seperti:

1. bakti Sosial,
2. bantuan dalam bidang pendidikan, dan
3. bantuan uang duka.

### **E. Kegiatan Yang Berjalan**

Pada tanggal, 25 Juni 2010 di Gedung kantor Perkumpulan Guru Singkawang berkumpul para penyalur dana beasiswa untuk peserta didik. Mereka yang hadir pada waktu itu dari daerah-daerah seperti: Sei. Duri, Kopisan, Bengkayang, Kolor, Pemangkat, Jawai dan Barito Singkawang.<sup>13</sup> Pada tanggal 27 Juni 2010 diadakan lomba bahasa Mandarin dan pada waktu bersamaan juga dimulainya kursus bahasa Mandarin. Kegiatan tersebut diberi nama “Peduli Pendidikan”.

Dalam proses memberikan bantuan kepada masyarakat bukan cuma dalam wilayah Kota Singkawang saja tetapi sudah mencakup Indonesia secara luas dan menyeluruh. Tahun 2005 pertama kali Permais berdiri diketuai Pak Amin, setelah setahun tepatnya tahun 2006 diganti oleh Susanto Gunawan. Tahun 2012 ada kegiatan dari Permais seperti Bakti Sosial (Baksos) dengan membagikan beras pada saat lebaran dengan rincian 5 kg beras, 1 kg minyak makan dan 10 bungkus indomie per paket. Pada waktu itu paket berjumlah 6.000 paket, kegiatan ini ditangani oleh bidang kesejahteraan Permais.

Dalam bidang pendidikan banyak juga mendapatkan bantuan dari biaya sekolah sampai pada perlengkapan sekolah, tentu pada saat itu diadakan pendataan secara serius oleh pengurus setempat yang ditunjuk dari Jakarta. Setelah data diklarifikasi dengan data yang ada di lapangan, selanjutnya disalurkan bantuan.

---

13 Majalah Permais edisi Juli-September 2010. Hlm. 7.

Beberapa sekolah pernah juga dibantu tetapi tidak berjumlah besar seperti renovasi bangunan yang ringan. Bantuan pada keagamaan tidak ada melalui yayasan, walaupun ada itu dari perorangan atau individu saja tidak memakai nama Permasis dalam menyalurkan bantuannya. Bantuan bersifat dadakan seperti terjadinya musibah gempa dan banjir langsung pada masyarakat setempat.

Permasis juga menerbitkan majalah, pada awal terbit 4 kali setahun untuk disebar di Kota Singkawang dan sekitarnya dalam jumlah 5.000 buah per edisi. Saat ini majalah Permasis terbit 3 kali setahun. Kota Singkawang hanya mendapat 2.000 per edisi. Pembagian majalah untuk orang-orang yang benar-benar gemar membaca agar pembagiannya tepat sasaran. Khususnya dibuat seperti pelanggan aktif cuma mereka tidak dipungut biaya untuk mendapatkan majalahnya.

Pengurus pusat datang ke Singkawang tidurnya di Hotel yang ada di sekitarnya karena yayasan tersebut belum ada menyiapkan wisma atau penginapan khusus bagi tamu atau pengurus pusat yang datang. Dalam Majalah Kalbar Pait ada logi Permasis disebabkan adanya saham yang tertanam dalam majalah tersebut makanya logi tersebut dibuat. Sekali lagi Permasis tidak sedikitpun masuk pada politik praktis, karena anggota atau pengurusnya mau berpolitik maka mereka harus keluar dari Permasis.

Kegiatan Cap Go Meh tahun ini atau beberapa tahun yang lalu Permasis tidak ada sumbangan dari yayasan tetapi dari individu, tetapi bukan mengatas namakan Permasis, karena ditakutkan menyalahi aturan dan ada muatan lain setelah itu. Majalah Permasis adalah salah satu alat komunikasi dan promosi dikalangan masyarakat secara luas. Kantor resmi Permasis di Singkawang sampai saat ini belum ada dengan kapasitas lengkap karena semua urusan penting langsung dari pusat. Permasis Singkawang cuma menjalankan program kerja dan menjalankan apa yang menjadikan keputusan pusat.

Pada tgl 20 Juni 2012, badan pelatihan guru Singkawang mengirimkan guru-guru mereka yang masih muda belia sebanyak 45 orang, rombongan dipimpin oleh Ketua Persatuan Guru

Singkawang Bapak Huang Jin Ling dan guru pendamping Bapak Zhang Lu Chang dan pengiriman siswa Singkawang ke Zhanjiang Normal University untuk pelatihan Bahasa Mandarin. Setibanya disana mereka disambut oleh pejabat Zhanjiang Normal University, pihak sekolah telah menyediakan 33 dosen untuk perkuliahan selama 20 hari program pelatihan tersebut. Selama pelatihan para siswa mendapat pengajaran dan pelatihan intensif untuk mata kuliah berupa Bahasa Mandarin, Sejarah Tiongkok, Kebudayaan dan kesenian Tiongkok. Menurut komentar para dosen yang membimbing, artikulasi dan intonasi yang diucapkan oleh para siswa sudah cukup baik, berkat kesungguhan dan ketekunan belajar yang mereka jalankan selama ini. Para siswa juga sangat berterima kasih atas bimbingan dan petunjuk para dosen yang selama 20 hari telah mereka alami.<sup>14</sup> Pada tahun 2012 juga diadakan lomba pidato bahasa Mandarin yang diikuti oleh 27 peserta yang dibagi 2 group.<sup>15</sup>

Memasuki pertengahan bulan juli 2012 warga kota Jawai disibukkan dengan perhelatan akbar peresmian Vihara Fuk Tet Chi Sentebang, sekitar 1500 tamu undangan tampak hadir di acara tersebut, Vihara Fuk Tet Chi yang berdiri di atas lahan 34x60 meter tersebut memiliki luas bangunan 9.9 x 21meter yang dibangun tahun 2007.

Pada tanggal 23 Desember 2010 diadakan peresmian perpustakaan Sekolah Barito di jalan SM. Tsjafoeddin Kecamatan Singkawang Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Singkawang Drs. Edi Yacob, M.Si, Agustinus Ariawan (Wakil Ketua Pembina Yayasan Barito), Fuidy Luckman (Wakil Ketua Pembina Yayasan Dharma Barito), Tanny Budiwati (Ketua Dewan Pengawas Yayasan Dharma Barito), Sin Cun Bui (Wakil Ketua Ketua Yayasan Dharma Barito), Aliendy (Ketua Ketua Yayasan Dharma Barito), Chin Tung Ka/ Tangdio Budiman W, Ku Sau Bui, Bong Kok Min, Bong Kim Lim, Chai Min Kong, Jong Kian Nyian, Kon Min Fon, Jong Khiong Fui, Lim Can Lie, Sau

---

14 Majalah Permasis Edisi ke-26 tahun ke-4 Juli-September 2012, 2012. Hlm. 68.

15 Majalah Permasis Edisi ke-26 tahun ke-4 Juli-September 2012, 2012. Hlm. 81.

Thong, Cong Siu Jun Dan Kok Siu Fong beserta puluhan tamu undangan dan siswa-siswi sekolah Barito dan juga rombongan dari Jakarta.<sup>16</sup>

Pada tanggal 25 Mei 2012 badan Pengelola Sekolah Bariti Singkawang telah serah terima dari Yayasan Dharma Barito Singkawang (YDBS) kepada Yayasan Dharma Budha Maitreya Singkawang. Sekolah Barito mengalami kemajuan baik dari kualitas maupun kuantitas selama dikelola oleh YDBS, hal tersebut dapat dilihat pada bertambah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan yang lain-lain.<sup>17</sup>

## 7. MAJELIS AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MAKIN)

### A. Latar Belakang Berdiri

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, yang disingkat MATAKIN adalah sebuah kelembagaan agama Khonghucu yang berdiri tahun 1955, sebagai kelanjutan dari institusi Khong Kauw Tjong Hwee Lembaga Pusat Agama Khonghucu yang pernah dibangun di Yogyakarta tahun 1923. Agama Khonghucu diajarkan oleh nabi besar Kongzi kepada masyarakat luas dan rakyat jelata, dengan pedoman rohani beliau “*You Jiao, Wu Lei*” Ada pendidikan, tak boleh ada pembedaan. Ditegaskan kewajiban berbakti kepada orangtua dan leluhur di tempat ibadah Bio atau Miao. Hal ini berkembang dari zaman ke zaman menembus masa dinasti pertama, He atau Xia (23-18 abad SM), dinasti kedua, Yin atau Shang (18-12 abad sM) dan dinasti ketiga Ciu atau Zhou (12-3 abad SM).<sup>18</sup>

Lembaga Ibadah Khonghucu Indonesia pada akhir abad 19 sampai abad 20 dibangun Kong Miao, Lembaga Ibadah Khonghucu pertama di Asia Tenggara. Tepatnya di jalan Kapasan 131 kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang memakai nama: Boen Bio atau Wen Miao. Inilah satu-satunya Kong Miao yang

---

16 Majalah Permasis edisi Oktober-Desember 2010. Hlm. 22.

17 Majalah Permasis Edisi ke-26 tahun ke-4 Juli-September 2012, 2012. Hlm. 25.

18 Wawancara dengan Hx. Buana, 15 Nopember 2012.

berada di lengkung selatan ekuator atau katulistiwa.<sup>19</sup>

Haksu Buana menjelaskan tokoh-tokoh pendiri Perserikatan Khung Chiao Hui Indonesia. Sesebuah agama Khonghucu yang ikut berperan dalam membangun kembali intisitusi nasional agama Khonghucu, ialah :

- Auw Ing kiong dari KKH Sala.
- Thio Tjoan Tek dan Tjan Hoat Kie dari KKH Bandung.
- Oei Ping Sing, Tio Tien Hway, Tn.Ny. Ong Hong Heng dari KKH Boen Bio Surabaya. - Lie Ing Lien (Hs.G.Budiatmadjaja) dari KKH Semarang.
- Tjan Djoen Hie (Hs.S.Dh.Chandra) Tangerang.
- Yap Bo Chin, Kwee Kok Tjo, Kwee Boen Hian dari KKH Malang.
- Hs.Tan Hok Liang dari KKH Ciampea.
- Thung Tiong Wie, Tan Liong Kie dari KKH Bogor.
- The Yoe Soen dari KKH Bandung.

Perkembangan penting kelembagaan, banyak kemajuan yang dicapai umat agama Khonghucu di tanah air dengan berdirinya perserikatan Khung Chiao Hui Indonesia atau MATAKIN sejak tahun 1955. Kehidupan beragama semakin ditingkatkan, demikian pula banyak berdiri Khong Kauw Hwee (Kong Jiao Hui) sebagai lembaga keagamaan. Masyarakat beragama Khonghucu juga melakukan pengabdian sosial, berperan dalam pengembangan seni budaya nasional Indonesia, keolahragaan maupun dalam perjuangan di bidang pendidikan nasional. Khong Kauw Hwee kini disebut: Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) melayani umat agama Khonghucu di pulau Jawa maupun di Sulamesi, Kalimantan, Bali, Sumatera, bahkan di Maluku dan Irian Jaya.

Sebuah kelembagaan agama memiliki institusi pendidikan keagamaan. Dalam kelembagaan MATAKIN, bidang kerohaniwan juga memiliki kurikulum pendidikan keagamaan bagi para rohaniwan. Lazimnya pendidikan diadakan oleh sebuah institusi yang disebut : Shu Yan. Rohaniwan agama Khonghucu terdiri atas: penebar agama (Jiaosheng), guru agama (Wenshi) maupun pendeta (Xueshi), dengan tugas mengembangkan studi

---

19 Wawancara dengan Hx. Buana, 15 Nopember 2012.



dan pelayanan sosial religius masyarakat pemeluknya, termasuk melaksanakan pendidikan agama bagi para murid beragama Khonghucu. Pendidikan agama bagi segenap murid beragama Khonghucu juga sudah dilaksanakan lebih intensif semenjak 1967 diwajibkan di sekolah-sekolah seluruh tanah air Indonesia. Dengan demikian dari sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi diadakan pula kurikulum pengajaran agama. MATAKIN bidang pendidikan juga telah mempunyai kurikulum pengajaran agama Khonghucu.<sup>20</sup>

Sejarah membuktikan bahwa Khonghucu merupakan salah satu agama tertua di Indonesia. Kehadiran agama Khonghucu di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kedatangan etnis Tionghoa ke bumi nusantara ini sejak zaman akhir pra-sejarah, pada tahun 300 sm terdapat satu bangsa Melayu Purba di Indo Cina (Semenanjung Malaka) yang berkebudayaan *neolithicum* dengan mengadopsi kebudayaan Cina. Setelah kebudayaan ini dikembangkan menjadi satu kebudayaan sendiri, lalu oleh para ahli prasejarah disebut sebagai kebudayaan Dongson (Thongsan/ Tengswa). Menurut Chandra Setiawan,<sup>21</sup> bukti sejarah menunjukkan adanya benda prasejarah seperti kapak sepatu yang terdapat di Indo Cina dan Indonesia sehingga menunjukkan adanya hubungan langsung antara Tiongkok dan Indonesia baik dalam proses pertukaran nilai-nilai ekonomi, sosial budaya maupun agama yang terjadi secara wajar sehingga mencapai tingkat akulturasi yang sempurna.

Proses akulturasi ini terjadi melalui perkawinan kebudayaan Dongson dan kebudayaan asli Indonesia sehingga kemudian menjadi tuan rumah di Indonesia. Hal ini menjadikan tumbuh berkembang agama dan budaya-budaya baru lainnya seperti Khonghucu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Kehadiran orang-orang Tionghoa perantauan, berdagang dan singgah lalu menetap ke Indonesia, bagi Chandra,<sup>22</sup> bisa dipastikan membawa tradisi budaya dan agama mereka dan mengalami pembauran

---

20 Wawancara dengan Hx. Buana, 15 Nopember 2012.

21 Setiawan, Chandra. 'Kehadiran Agama Khonghucu di Indonesia dan Perannya dalam Pembangunan Bangsa', dalam *SGSK 19*, Siencia 2549, MATAKIN, 1998, hlm. 49.

22 *Ibid.*, hlm. 50.

secara alami ke tengah kehidupan masyarakat asli Indonesia. Dengan hidup rukun dan membaaur ditengah masyarakat, mereka melakukan aktivitas dan memiliki mata pencaharian yang tidak berbeda dengan masyarakat biasa. Mulai menjadi pedagang di kota-kota pantai seperti Banten, Sriwijaya, Cirebon, Demak, Tuban, Giri, Ujung Pandang dan Ternate. Sebagian yang lain ada yang menjadi petani dan tukang kayu seperti di daerah Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, dan sebagai nelayan di Bagan Siapi-api dan daerah sekitarnya.

Dalam perjalanannya, kehidupan beragama masyarakat Tionghoa pun ikut berkembang seperti berdirinya lembaga-lembaga agama Khonghucu. Dalam situs-situs sejarah, ditemukan sebuah kelenteng *Thian Ho Kiong* yang telah berdiri sejak tahun 1688 di Ujung Pandang, dan kelenteng *Ban Hing Kiong* yang didirikan pada tahun 1819 di Manado. Rumah-rumah ibadah Khonghucu ini dapat juga ditemukan di wilayah Ancol Jakarta, Tuban, Rembang, Lasem. Pada tahun 1883 di Surabaya berdiri salah satu tempat ibadah tertua Khonghucu, *Boen Tjhiang Soe* atau *Boen Bio*, dan oleh penjajah Belanda disebut *Gredja Boen Bio* atau Geredja Khonghoetjoe (de kerk van Confucius).

Begitupun lembaga pendidikan Khonghucu telah berdiri di Jakarta sejak tahun 1729 dengan nama *Bing Sing Su Wan* atau Taman Pendidikan Menggemilangkan Iman. Sementara Kitab Suci agama Khonghucu diterbitkan pertama kali dalam bahasa Melayu pada tahun 1886 di Jakarta yaitu Kitab Hikayat Khonghucu yang disusun oleh Lie Kim Hok, dan diteruskan oleh Toean Njio Tjoen Ean yang menerbitkan Kitab *Soe Sie* (Empat Kitab) pada tahun 1897 di Ambon. Selanjutnya Tan Ging Tiong menyusun Kitab *Thay Hak* (Ajaran Besar) dan *Tiong Yong* (Tengah Sempurna) pada tahun 1900 di Sukabumi.<sup>23</sup>

Seiring dengan maraknya pembaharuan agama Khonghucu di Tiongkok, sebagaimana dibawa oleh Kang Youwei yang menyebar sampai ke Asia Tenggara, memberikan dampak yang besar bagi etnis Tionghoa peranakan di Indonesia untuk melakukan gerakan pembaharuan yang sama.<sup>24</sup> Perkembangan

---

23 *Ibid.*, hlm. 51.

24 Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*. (Jakarta,

yang paling menonjol ketika pada awal abad XX, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1900 sekitar 20 pemimpin Tionghoa mendirikan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan Khonghucu yang disebut dengan *Tiong Hoa Hwee Kwan* (THHK) dengan tujuan memurnikan agama dan menghapus *sinkretisme* dalam perilaku beragama umat Khonghucu. Pembaharuan ini dilakukan karena masyarakat Tionghoa Indonesia dianggap telah banyak melenceng dari ajaran murni Nabi Khongcu seperti dalam ritus-ritus pernikahan dan kematian.<sup>25</sup>

THHK memandang bahwa salah satu jalan efektif dalam mengembangkan ajaran Khonghucu yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, disamping pentingnya mengajarkan bahasa Tionghoa agar masyarakat dapat mengenal dan memahami bahasa ibu mereka. Sampai pada tahun 1919, THHK telah mendirikan sekurang-kurangnya 250 sekolah yang tersebar hampir di seluruh Hindia Belanda.<sup>26</sup> Masyarakat Khonghucu yang melihat dinamika ini akhirnya tertarik untuk mendirikan organisasi-organisasi lainnya. Oleh karena itu pada tahun 1918 di Sala berdirilah lembaga *Khong Kauw Hwee*, yang selanjutnya berkembang luas sampai di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Bogor, Malang, Ciamis, dll.

Selanjutnya pada tahun 1923 organisasi ini melebar kepada upaya membentuk semacam badan pusat yang mereka sebut *Khong Kauw Tjong Hwee* dan memilih kota Bandung sebagai kedudukan pusatnya, dengan dukungan penuh *Khong Kauw Hwee* dari Surabaya, Sumenep, Kediri, Surakarta, Blora, Tjiteljengka, Wonogiri, Yogyakarta, Kartasura, dan Pekalongan. Kongres pertama KKJH ini diadakan pada tanggal 25 September 1924 di Bandung yang dipimpin langsung oleh ketua *Khong Kauw Hwee*, Poui Kok Gwan dan menghasilkan beberapa rekomendasi

---

LP3ES, 2002). Hlm., 159.

25 Chandra Setiawan, *Kehadiran Agama*, hlm. 51.

26 Leo Suryadinata, 'Khonghucisme dan Agama Khonghucu di Indonesia', dalam *Pergulatan Mencari Diri*, Lasiyo dkk. (Yogyakarta, Interfidei, 1995), hlm., 175.

diantaranya; pengupayaan penyeragaman tata upacara agama Khonghucu, dan menerbitkan media komunikasi dalam bentuk majalah bulanan yang bernama *Khong Kauw Gwat Po*. Aktifnya organisasi ini masih sempat dirasakan sampai tahun 1940 sebelum penjajah Jepang datang, Konferensi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan seperti; agama Khonghucu harus berdasar kitab suci (*Su Si*) dan semua sekolah *Khong Kauw Hwee* diminta mengajarkan pelajaran agama yang bersumber dari kitab suci ini, sementara kegiatan ritual seperti perkawinan dan kematian agar dijalankan dalam semangat kebudayaan Indonesia.

Ketika penjajah Jepang datang antara tahun 1942-1945 dan pecahnya Perang Dunia ke II, *Khong Kauw Hwee* mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani karena faktor keamanan dan kekacauan negeri, sehingga banyak Lithang yang dijadikan tempat penampungan para pengungsi peperangan. Perjuangan melawan penjajah Jepang ini diikuti oleh seluruh komponen bangsa termasuk umat Khonghucu, dan mereka dengan tanpa pandang bulu berupaya memberikan bantuan perlindungan dan makanan kepada warga yang mengalami dampak peperangan pada masa itu.

Pada tanggal 11-12 Desember 1954 di Solo diadakan konferensi antar tokoh-tokoh Agama Khonghucu untuk membahas kemungkinan ditegakkan kembali Lembaga Agama Khonghucu secara Nasional setelah tidak ada kegiatan semenjak pecahnya perang dunia II dan masuknya Jepang ke Indonesia. Akhirnya pada konferensi yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 16 April 1955 disepakati dibentuk kembali Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan memakai nama Perserikatan K'ung Chiao Hui Indonesia yang diketuai Dr. Sardjono. Tanggal 16 April 1955 disepakati sebagai hari jadi Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, disingkat MATAKIN.



**Gambar 13. Bersama Bong Cin Nen, Pengurus MAKIN Singkawang**

Aktivitas MAKIN di kota Singkawang tidak terlalu dominan jika dibandingkan dengan beberapa organisasi sosial yang ada di kota ini. Hal ini disebabkan karena selama beberapa tahun, aktivitas dan kegiatan organisasi MAKIN di Singkawang mengalami kekosongan. Namun dalam sesi wawancara, Sekretaris MAKIN Kota Singkawang, Bong Cin Nen mengatakan bahwa pada prinsipnya MAKIN Kota Singkawang tetap mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, termasuk di dalam pembinaan keagamaan.

Dalam hal identitas keagamaan, pemeluk agama Khonghucu diminta untuk bergabung dengan agama Budha melalui aliran Tri Dharma yang menaungi tiga aliran keagamaan mayoritas orang Tionghoa yaitu Budha, Tao dan Khonghucu. Maka sejak bergabungnya pemeluk Khonghucu di Tri Dharma, ruang lingkup aktivitas keagamaan menjadi terkooptasi dalam wilayah sempit dan sinkretis. Umat Khonghucu harus menjalankan

ibadah di sebuah vihara (Buddha) yang semestinya dilakukan di sebuah Lithang (tempat ibadah Khonghucu). Sementara dalam kebanyakan vihara di kota Singkawang tidak terdapat altar khusus yang ditujukan untuk Thian atau dewa yang diimani umat Khonghucu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MAKIN Kota Singkawang berupaya mengembalikan keyakinan dan motivasi umat Khonghucu untuk kembali kepada keyakinan asal mereka sebagai pemeluk Khonghucu melalui surat pernyataan sebagai pemeluk agama Khonghucu untuk selanjutnya dibantu dalam proses pembuatan kartu identitas atau KTP. Dengan terakomodasinya umat Khonghucu melalui pengakuan identitas yang ada di kartu tanda penduduk, MAKIN Kota Singkawang berharap agar pemerintah setempat memberikan ruang, kesempatan dan perhatian yang sama dengan umat agama yang lain dalam memberikan fasilitas dan layanan keagamaan bagi umat Khonghucu.

Bong Cin Nen menjelaskan bahwa saat ini pengurus MAKIN kota Singkawang berencana untuk mengembalikan status dan identitas keagamaan umat Khonghucu yang selama beberapa puluh tahun sempat mengalami tekanan secara politik dan berdampak pada perkembangan agama Khonghucu di Kota Singkawang. Program tersebut adalah dengan mengeluarkan surat himbaun atau semacam surat pernyataan dari warga Tionghoa Singkawang bahwa mereka benar-benar merupakan pemeluk agama Khonghucu. Seperti yang diketahui, bahwa sejak diterapkannya program asimiliasi oleh pemerintah orde baru, maka status keagamaan dan identitas orang Tionghoa banyak yang mengalami proses pembauran.



# BAB IV

## BERSEMINYA EMBRIO MULTIKULTURALISME DI SINGKAWANG

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa, ras, gender, dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi. Pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komunitas atau masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Multikulturalisme didefinisikan sebagai pengakuan dan

---

1 Parsudi Suparlan, *Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas*. Makalah Dipresentasikan dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam *Landscape* Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004.



dorongan terhadap pluralisme budaya; multi-budaya menjunjung tinggi dan berupaya melindungi keanekaragaman budaya, dan pada saat yang bersamaan memfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas dengan budaya mayoritas yang seringkali tidak seimbang.<sup>2</sup>

Definisi lain tentang Multikulturalisme dikemukakan oleh Arnold Krupat yang mencatat bahwa:

*“multiculturalism refers to an order of instruction concerned to present that which a dominant culture has defined as “other” and “different”—usually, of course, minor and inferior as well—in such a way that it may interrogate and challenge that which the dominant culture has defined as familiar and its own—and so, to be sure, major and superior.”*<sup>3</sup>

Multikulturalisme, sebuah kebijakan yang pertamakali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1960-an, merupakan pergeseran yang signifikan dengan cara bahwa identitas dikonstruksi di dalam modernitas barat. Multikulturalisme juga ditandai oleh pengabaian universalisme barat dan ideology asimilasi monokultural.<sup>4</sup> Kebijakan multikultural mengarah kepada akar-akar dan mengarah kepada pemuatan identitas etnik.<sup>5</sup> Agger menggambarkan multikulturalisme sebagai “versi

---

2 D. Jary dan J. Jary (Peny.), *Unwin Hyman Dictionary of Sociology*. Edisi ke-2. Leicester: Bookmart Ltd, 1999, hlm. 429. Peter Caws menyebut Multikultural sebagai “the enrichment of the self through acquaintance with and cultivation of what is found to be the most rewarding in all the human products and practices with which one comes in contact”. Lihat, Peter Caws, “Identity: Cultural, transcultural, and Multicultural”, dalam David Theo Goldberg (ed.), *Multiculturalism: A Critical Reader* (USA and UK: Blackwell Publishers Inc. 1995), hlm. 372.

3 Hans Bak (ed), *Multiculturalism and the Canon of American Culture* (Amsterdam: VU University Press, 1993), hlm. 107.

4 B. Agger, *Critical Social Theories: an Introduction* (Oxford, Westview Press, 1998).

5 J. Friedman, “Global Crises, the Struggle for Cultural Identity and Intellectual Porkbarreling: Cosmopolitans Versus Locals, Ethnic and Nationals in an Era of De-hegemonisation”, dalam P. Werbner and T. Modood (eds.),

yang secara politik terlibat di dalam posmodernisme Amerika'. Dia berpendapat bahwa teori multikulturalisme mendukung teori-teori postmodern yang menekankan gagasan bahwa perbedaan orang adalah lebih penting daripada kesamaan mereka. Penekanan pada pengakuan minoritas, hak budaya dan identitas—seperti yang dirujuk oleh Charles Taylor (1994) sebagai politik sebuah 'pengakuan'—merupakan inti dari wacana multikulturalisme. Multikulturalisme berupaya untuk menumbangkan homogenisasi budaya dengan mengakui koeksistensi dan perwakilan yang sama dari budaya yang berbeda dan masyarakat dalam negara-bangsa.

Para multikulturalis sering merepresentasikan budaya minoritas secara tidak kritis dan secara simplisistis sebagai entitas homogeni yang utopis. Bahkan seringkali multikulturalisme diakui sebagai sukses hanya dengan menyajikan beberapa aspek yang dangkal dan dekoratif bentuk-bentuk budaya tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Yiyan Wang,

*In a society where certain cultures dominate, multiculturalism can be highly deceptive, for it is often the case that the minority cultures become decorative of the mainstream's tolerance and generosity.<sup>6</sup>*

Apabila multikulturalisme diterapkan pada kebijakan, multikulturalisme mencakup serangkaian kebijakan negara formal dengan dua tujuan utama, yaitu: untuk memelihara keselarasan antara kelompok-kelompok etnis yang beraneka ragam dan untuk menstrukturkan hubungan antara negara dan minoritas etnik.<sup>7</sup> Meskipun demikian, beberapa kritik terhadap multikulturalisme mengajukan dalih bahwa multikulturalisme memisahkan masyarakat dan cenderung membawa ancaman

---

*Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities And the Politics of Anti-Racism* (London, Zed Books, 1997), hlm. 72.

6 Yiyan Wang, "Settlers and Sojourners: Multicultural Subjectivity of Chinese-Australian Artists", dalam I. Ang, S. Chalmers, L. Law and M. Thomas (eds.), *Alter/Asians: Asian-Australian Identities in Art, Media and Popular Culture* (Sydney: Pluto Press, 2000), hlm. 122.

7 E. Cashmore, *Dictionary of Race and Ethnic Relations*. Edisi ke-2 (London: Routledge, 1996), hlm. 244.

terhadap kesatuan negara dan kebangsaan. Hal ini bertentangan dengan pembangunan bangsa.<sup>8</sup>

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.<sup>9</sup>

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, paham multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri yang terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan untuk memahaminya

---

8 Lihat, Leo Suryadinata, "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: dari Similasi ke Multukulturalisme?" dalam *Antropologi Indonesia*, Th XXVII, No. 71 Mei-Agustus 2003, hlm. 5. Multikulturalisme berbeda dengan konsep kebangsaan Indonesia yang berdasarkan model penduduk asli (*indigenosity*). Secara konseptual, bangsa merupakan konsep yang relatif baru dan berbeda dengan Negara. Bangsa bersifat sosial-budaya-politik, sementara Negara pada umumnya bersifat hukum. Menurut Will Kymlicka, bangsa adalah komunitas sejarah, yang kurang lebih lengkap secara kelembagaan, yang menduduki wilayah tertentu atau tanah air, yang berbagi bahasa dan budaya yang spesifik. Lebih lanjut, lihat Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 11.

9 Hidayat Nur Wahid, "Membangun Masa Depan Bangsa di Atas Pondasi Multikulturalisme", <http://www.setneg.go.id>. Diakses pada 17 Oktober 2011.

dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.<sup>11</sup>

Menurut Raymond Williams amat sulit menemukan definisi multikulturalisme. Selain menunjuk kepada kemajemukan budaya, multikulturalisme juga mengacu kepada sikap khas terhadap kemajemukan budaya tersebut yang dirangkai dalam lima tipe multikulturalisme.

Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda menjalani hidup mandiri dan terlibat dalam interaksi sebagai syarat hidup bersama. Multikulturalisme akomodatif, mengacu kepada visi masyarakat yang bertumpu pada satu budaya dominan dengan penyesuaian dan pengaturan untuk kebutuhan budaya minoritas. Multikulturalisme mandiri, mengacu kepada kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam kerangka politik kolektif yang dapat diterima. Multikulturalisme kritis atau interaktif, mengacu kepada masyarakat tempat kelompok kultural kurang peduli untuk menempuh hidup mandiri dan peduli dalam menciptakan suatu budaya kolektif yang mencerminkan dan mengakui perspektif mereka yang berbeda beda.

---

10 *Ibid.*,

11 *Ibid.*,

Multikulturalisme kosmopolitan, mengacu kepada visi masyarakat yang berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi individu yang tidak terikat dengan budaya khusus secara bebas bergiat dalam eksperimen antarkultur dan mengembangkan satu budaya milik mereka sendiri.

Gagasan Abdurrahman Wahid tentang multikulturalisme adalah keinginannya agar kemajemukan yang terdapat dalam berbagai kelompok sosial dipahami sebagai khazanah kekayaan bangsa.<sup>12</sup> Setiap pribadi berhak melakukan pilihan terhadap agama dan tradisi budayanya oleh karena itu baik negara maupun masyarakat harus menghargai serta menghormatinya. Lebih dari itu, negara hendaklah memberikan pelayanan yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Demikian juga tradisi budaya yang ada dalam setiap kelompok sosial hendaklah dipahami sebagai nilai-nilai kehidupan dunia (*world life*). Negara memiliki jarak yang sama terhadap setiap warganya.

Oleh karena itu, multikulturalisme dalam pandangan Abdurrahman Wahid adalah bahwa keragaman bukan saja diakui akan tetapi harus diberikan kebebasan karena dengan keragaman maka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekarang, keragaman identitas menjadi persoalan yang serius dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Berbagai unjuk rasa yang marak belakangan ini terutama setelah reformasi menjadi indikator betapa setiap orang ingin menunjukkan identitasnya. Padahal kemajemukan adalah kondisi hidup bangsa Indonesia yang tidak bisa disangkal, dan persis pada titik itulah kita menemukan kesamaan *platform* bangsa di tengah simpang siurnya aneka macam politik identitas.

Menurut Parekh, terdapat tiga macam bentuk keragaman budaya yang umum dijumpai pada masyarakat modern. Pertama, keanekaragaman sub budaya (*subcultural diversity*) yaitu meskipun warga masyarakat menganut dan meyakini sebuah kultur yang kurang lebih sama tetapi tidak menjalankan keyakinan dan praktiknya secara sama.

Kedua, keanekaragaman perspektif (*perspectival diversity*), yaitu warga yang amat kritis menyikapi dan menanggapi

---

<sup>12</sup> *Jawa Pos*, 8 Juli 1991.

budaya yang dominan dan berusaha menyusun kembali nilai budaya agar lebih seimbang. Ketiga, keaneragaman komunal (*communal diversity*), kelompok masyarakat tertata dalam organisasi yang rapi, sadar diri dan percaya sekaligus menghidupi kepercayaan itu dalam praktik tertentu secara berbeda-beda. Islam telah lebih dahulu memberi alas pijak kepada multikulturalisme yaitu keragaman suku, bangsa, budaya adalah sesuatu pilihan setiap orang.<sup>13</sup>

Multikulturalisme sebagai imperatif peradaban adalah isu yang terus “memprovokasi” keingintahuan sekaligus juga mengandung ketidakpastian mengenai keberhasilan harapan-harapan yang disandarkan kepadanya. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan setiap kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya.<sup>14</sup> Isu multikulturalisme sesungguhnya telah muncul pada empat dekade yang lalu, termasuk dengan gagasan pentingnya pendidikan multikultural. Gagasan ini dapat ditelusuri secara historis dari Gerakan Hak-hak Sipil (*Civil Right Movements*).

Dalam konteks penelitian ini, multikulturalisme yang ingin disoroti adalah relasi warga Tionghoa yang terhimpun dalam organisasi sosial keagamaan Majelis Tri Dharma dan Majelis Tao resort Singkawang dengan masyarakat lokal, khususnya warga Dayak dan Melayu di kota Singkawang. Dalam skala nasional, hampir sepanjang masa warga Tionghoa selalu diposisikan sebagai “mereka” (nonpri) yang bukan “kita” (pribumi). Walaupun patut dibedakan dengan kelompok minoritas lain, suku Tionghoa di Indonesia bukanlah kelas dua. Terutama karena kepiawaian mereka dalam sektor ekonomi sehingga membuat masyarakat Tionghoa menjadi istimewa.<sup>15</sup> Sejak abad 7, penduduk Tionghoa

---

13 Ridwan Lubis, “Multikulturalisme”, <http://www.waspada.co.id/> diakses pada 17 Oktober 2011.

14 Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan multikultural* (Jakarta, Erlangga., 2005), hlm. 70.

15 Adhie M Massardi, ‘Reformasi Politik SARA’, dalam *Kapok Jadi Nonpri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan*, Alfian Hamzah (ed.), (Bandung: Za-

Indonesia telah menjadi tulang punggung perdagangan antara Tiongkok-Indonesia dan India-Indonesia dan wilayah lain, termasuk dalam mendistribusikan hasil bumi rakyat di pedalaman sehingga dapat masuk ke kota, dan sebaliknya.<sup>16</sup> Puncaknya pada masa orde baru yang menekankan pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka dengan sangat beruntung mendapatkan berkah hidup berkesejahteraan di Indonesia. Perkembangan sejarah telah memberikan kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan etnik Tionghoa dalam pembangunan ekonomi.<sup>17</sup>

Keberhasilan mereka dalam menguasai sektor ekonomi ini oleh banyak pakar ilmu sosial selalu disebut sebagai “faktor pencetus kecemburuan sosial”, penyebab utama terjadinya amuk massa. Konflik yang menjadikan Tionghoa menjadi korban sebenarnya telah terjadi sejak zaman penjajah. (1740, 1916, 1935)<sup>18</sup> Beberapa tragedi memilukan kembali terulang pada saat Indonesia telah merdeka seperti pada kasus Kalimantan 1967, Malari 1974, menjelang pemilu tahun 1997 di Pekalongan dan Banjarmasin, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo. Menurut Massardi,<sup>19</sup> panasnya hubungan Cina dengan masyarakat kerap bias dengan isu Muslim-non-Muslim yang melahirkan konsep “politik tabu SARA” (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pada mulanya, politik keamanan dan ketertiban yang menggunakan istilah SARA ini sempat efektif meredam gejolak. Terbukti hampir dua dasawarsa kekuasaan Orde Baru tidak ditemukan bentrokan serius seperti yang sering terjadi pada masa Orde Lama (1960).

Pengakuan terhadap keberagaman di masyarakat, menjadi semacam ideologi dominan Orde Baru, namun secara implisit mengatakan pula bahwa perbedaan itu hanya dapat diterima

---

man Wacana Mulia, 1998), hlm. 37

16 Siauw Tiong Djin *Reformasi Penyelesaian Masalah Minoritas*. 22 Juni 1998. [http://arus.kerjabudaya.org/hlm/tionghoa\\_PAT\\_1998.htm](http://arus.kerjabudaya.org/hlm/tionghoa_PAT_1998.htm).

17 Z. M. Hidajat. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1993), hlm. 124.

18 lihat Pramoedya Ananta Toer, *Rasialisme Anti Tionghoa dan Percobaan Menjawabnya*, makalah, Jakarta, 6 Oktober 1998 [http://arus.kerjabudaya.org/hlm/tionghoa\\_PAT\\_1998.htm](http://arus.kerjabudaya.org/hlm/tionghoa_PAT_1998.htm).

19 Adhi M. Massardi, ‘Reformasi Politik SARA’, hlm. 37.

dalam konteks pemahaman dan kebijakan negara.<sup>20</sup> Perbedaan yang tidak sesuai dengan keinginan negara dianggap sebagai "milik orang lain," dan oleh karena itu harus ditolak. Dalam masalah SARA, keragaman suku, agama, ras dan golongan dipahami sebagai upaya pemersatu bangsa untuk menghindari terjadinya guncangan politis yang berakibat munculnya disintegrasi dan kekacauan nasional. Sebagai contoh dalam hal keragaman suku. Pemerintah membolehkan adanya perbedaan suku, rumah adat, pakaian adat, tari-tarian dan lain-lain, tapi tidak banyak memberikan porsi bagi pembicaraan tentang perkembangan suatu suku yang kompleks dan bernuansa konflik, seperti dominasi suku dalam sebuah daerah.

Konsepsi ras dipahami dengan sangat sempit (celaknya hanya berlaku bagi orang Tionghoa), seolah-olah masyarakat Tionghoa tidak pernah bercampur dengan 'ras' lain yang ada di Indonesia. Padahal baik secara budaya maupun biologis, mungkin tidak ada lagi satu komunitas yang terhindar dari percampuran etnik. Dalam kaitannya dengan antargolongan, pemerintah berasumsi tidak adanya perbedaan kelas di masyarakat, lalu kemudian membungkam segala perbincangan yang dapat mengancam kekuasaan rezim, sebab bagi yang merasa berada pada kelas bawah (tertindas) maka dikhawatirkan mereka akan melakukan tuntutan hak dan perlawanan kepada penguasa saat itu.

Konsep SARA belakangan akhirnya menjadi bumerang, karena kekuasaan negara dijalankan dengan melakukan "penyekatan unsur-unsur suku-agama-ras-antargolongan." Akibatnya, saat gerakan demokrasi dan keterbukaan dibuka, unsur-unsur SARA tidak segera menyatu sehingga melahirkan gesekan-gesekan yang berakhir kerusuhan. Dengan kata lain, dimensi SARA dalam masalah "kesenjangan ekonomi" mengandung benih-benih yang demikian berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta pertumbuhan ekonomi nasional.

---

20 Dede Oetomo, 'Bersentuhan dengan Prasangka dan Diskriminasi Kita,' dalam *Antara Prasangka dan Realita (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia)* Andreas Pardede tim, (Jakarta: Pustaka Inspirasi, 2002), hlm. 16.



Abdurrahman Wahid dalam satu seminar,<sup>21</sup> menyatakan penyebutan kata “ras” dalam SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) sudah waktunya dihilangkan. Pengertian etnis bisa diartikan sebagai suku, bukan bangsa. Karena itu, pengertian ras dalam SARA tidak cocok lagi diterapkan. Logikanya kalau masih diterapkan, orang Ambon harus disebut sebagai orang Ambon ras Astromelanesia yang tidak jauh berbeda dengan orang Jawa yang berasal dari Ras Melayu. Jadi kita tidak bisa menyebut orang Tionghoa sebagai ras tersendiri. Sebab kalau demikian kita juga harus bisa menerima kalau Jawa dan Ambon bukan ras Indonesia.

Sementara, pakar ilmu hukum tata negara dari UI, Prof. Padmo Wahjono menguraikan bahwa kata-kata dalam SARA itu sebenarnya masih cukup fleksibel. Pada istilah SARA, yang di dalamnya ada kata ras yang bisa berarti suku, sebenarnya terdapat aksi yang jika membangkitkan rasialisme, bisa berkepanjangan menjadi pertentangan antarsuku bangsa. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menciptakan pengaturan SARA itu, sehingga bisa selaras dengan pasal 29 UUD 45.

Ketika reformasi bergulir, masyarakat Tionghoa berharap terjadi perubahan yang lebih signifikan dari sebelumnya. Memang beberapa kebijakan negara, seperti Instruksi Presiden BJ Habibie, Nomor 26 Tahun 1998 agar menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dirasakan telah membuka peluang baru bagi masa depan Tionghoa yang bebas dari diskriminasi rasial. Berlanjut dengan Inpres nomor 4 tahun 1999 tentang pelaksanaan SBKRI. Pada masa Gus Dur terjadi pencabutan Inpres nomor 14/67 diganti dengan Kepres nomor 6 /2000, dan terakhir, Megawati mengeluarkan Kepres nomor 19/2002 yang menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Walaupun kebijakan baru ini tampak lebih baik dari sebelumnya (proyek Orde Baru), tapi apakah kebijakan itu betul-betul didasarkan pada ketulusan atau hanya untuk kepentingan politik semata?

Karakter negara (termasuk kebijakannya) pada masa

---

21 *Jawa Pos*, 8 Juli 1991.

reformasi memang memperlihatkan perbedaan signifikan dari masa sebelumnya. Sebelum masa transisi karakter negara cenderung monolitik dan tunggal. Karakter ini merupakan salah satu entitas yang ada dalam bentuk negara-bangsa modern, baik yang terjadi di tingkat negara (*state*) atau masyarakat (*society*).<sup>22</sup> Dalam level negara, karakter negara yang monolitik dan homogen nampak dari relatif solidnya unsur-unsur yang ada dalam entitas negara. Sementara, dalam masyarakat kondisi ini berdampak pada besarnya kekuasaan entitas negara melakukan pengendalian dan penundukan. Akhirnya, di lingkungan masyarakat telah terjadi proses penunggalan dan monolitik yang sangat kuat baik dalam kerangka hubungan masyarakat-masyarakat (*society-society*) maupun dalam pola hubungan negara-masyarakat (*state-society*).

Negara dengan soliditas unsur-unsur di dalamnya baik secara vertikal (dukungan militer, birokrasi dan parpol) maupun horizontal (sentralisasi pusat ke daerah) akhirnya berhasil membangun kekuasaan dalam dominasi tunggal. Penguasa negeri ini nampak berupaya mendominasi masyarakatnya dengan cara yang kompleks. Mekanisme pengendalian dan penundukan negara kepada masyarakat setidaknya diwujudkan baik pada tingkatan institusi (*corporatism*), wacana (*discourse*), maupun represif (*terrorism*). Pada tataran institusi, mekanisme pengendalian dan penundukan masyarakat diwujudkan dengan mekanisme korporatisme.<sup>23</sup> Hal ini senada dengan salah satu bentuk dominasi negara menurut Weber yaitu legal rasional, seperti melalui pemekaran birokrasi dan organisasi yang akhirnya berhasil mempengaruhi ketaatan masyarakat pada pemerintah.

Dalam terma wacana, banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan penundukan seperti SARA, harmoni sosial, integrasi bangsa, bahkan budaya.<sup>24</sup>

---

22 Alfred Stephan, (ed.), *Authoritarianism Brazil: Origin Politic and Future* (Yale University Press, New Haven, 1973), hlm. 13-14.

23 Moechtar Masoed, *The Indonesian Economy and Political Structure During the Early New Order: 1966-1971*, disertasi doktor, The Ohio State University. 1983, hlm. 13.

24 Benedict R.O'G Anderson, *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 10.

Pemerintah berlindung di bawah nama konstitusi,<sup>25</sup> sehingga ‘intervensi’ menjadi dapat dibenarkan dalam kerangka pembinaan dan pelayanan pada kebutuhan umat beragama. Dominasi juga ditunjukkan dalam bentuk ancaman maupun kekuatan. Untuk menjalankan dominasi kekerasan, dalam konsep Althusser,<sup>26</sup> penguasa menggunakan *repressif state apparatus*. Dominasi ini bisa terjadi ketika penguasa ‘memaksakan’ kehendaknya dengan sebuah pembelaan bahwa hal itu memang sudah selayaknya dilakukan. Di samping itu negara juga menggunakan *ideological state apparatus* untuk membangun sebuah pola otoritas formal, dalam hal ini pemerintah melihat dirinya memiliki hak untuk memerintah dan subyek yang diperintah berkewajiban mematuhi.

Strategi seperti ini nampak berhasil menciptakan kerukunan, dan ketertiban, namun bersifat semu karena terjadi proses pembungkaman yang justru menyimpan bahaya laten. Kekuatan dominasi negara terhadap masyarakat nampak dari relatif otonomnya negara dalam proses pembuatan kebijakannya dari tuntutan dan partisipasi masyarakat.<sup>27</sup> Tidak heran kalau Ben Anderson menyatakan secara tegas bahwa Orde Baru merupakan representasi dari kebangkitan kembali negara dan kemenangan *vis-à-vis* masyarakat dan bangsa.<sup>28</sup>

Pada masa B.J. Habibie, Instruksi tentang pencabutan istilah pri-nonpri yang dianggap sebagai perubahan signifikan terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya tampaknya belum seluruhnya benar. Pada masa Soeharto, walaupun dengan rumusan yang agak berbeda dan tidak memperoleh bentuk

---

25 Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama* (Yogyakarta, UII Press, 2001), hlm. 8.

26 Louis Althusser, *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation)*, in Slavojzizek, *Mapping Ideology* (London, New York, Verso, 1994), hlm. 114.

27 Michael Hill, (ed.), *The Policy Process: A Reader* (Harvester Wheatsheaf, Campus 400, Maylands Avenue, 1993), hlm. 86-100.

28 Benedict R.O’G Anderson, ‘Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective’, *Journal of Asian Studies*, vol. VLII. No. 3, 1983, hlm. 477-496.

formil hukum, instruksi tentang peniadaan istilah pribumi/non-pri sebenarnya telah sering dikemukakan oleh Presiden.<sup>29</sup> Jadi apa yang di instruksikan B.J Habibie tidak punya nilai kebaruan, bahkan banyak yang menganggap hal ini sebagai siasat Habibie untuk meredam isu bahwa Habibie adalah seorang “anti Cina”. Sedangkan instruksi Habibie nomor 4 tahun 1999 tentang SBKRI sebenarnya hanyalah kelanjutan dari Kepres nomor 56 tahun 1996 tentang pelaksanaan ketentuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia,<sup>30</sup> dan meninjau kembali segala peraturan yang melarang atau membatasi kursus bahasa Mandarin.<sup>31</sup>

Dalam bagian pertimbangan dari kedua instruksinya, dinyatakan, “untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum...dan perlindungan hak azazi manusia,” maka Habibie oleh beberapa pihak seperti Benny G. Setiono<sup>32</sup> dan Junus Jahja<sup>33</sup> dinyatakan telah mengikuti arus reformasi yang bergulir saat itu, sehingga keinginan warga Tionghoa telah terkabul. Tapi Habibie tidak bisa diandaikan begitu saja telah menyadari tugasnya dan begitu dipenuhi semangat reformasi ketika menyusun kedua instruksinya. Dalam teori-teori hukum, pengandaian bahwa pembuat aturan hukum bersikap

---

29 (*Kompas*, 3 September 1991). Persoalan Pri-nonpri mendominasi topik perbincangan di media massa saat itu. Berbagai pakar turut pula bicara di dalamnya. Sampai akhirnya pada tanggal 2 September 1991, Presiden “mengingatkan agar masalah pribumi dan nonpribumi jangan terlalu dibesar-besarkan, karena kalau masalah itu terus diperbincangkan dikhawatirkan masyarakat akan terpancing untuk mempermasalahkan perbedaan-perbedaan lainnya.” Sehingga kemudian “persoalan” ini lenyap secara tiba-tiba dari liputan media massa.

30 Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1999, instruksi pertama huruf a.

31 Inpres nomor 4 tahun 1999, instruksi pertama huruf b.

32 Benny G. Setiono, ‘Etnis Tionghoa adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia,’ dalam Benny G. Setiono (ed.), *Tugas dan Kewajiban etnis Tionghoa dalam membangun Bangsa dan Negara*. Jakarta, Perhimpunan INTI, 2002. Hlm. 130. Lihat juga, Benny G. Setiono, ‘Kehancuran dan Kebangkitan Martabat/Jati Diri Etnis Tionghoa di Indonesia.’ Sebuah makalah dalam seminar *Peran Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Sejarah Indonesia*. Jakarta, 09 Nopember 2002.

33 *Suara Pembaruan*, 04 Juli 1999

netral dan tulus dari kepentingan-kepentingan pribadinya dan semata melayani kepentingan masyarakat saja adalah terlalu naif dan juga berbahaya.<sup>34</sup> Tidak adanya perubahan substansi dari kebijakan Habibie, apalagi instruksi yang dibuat hanyalah menegaskan instruksi sebelumnya, yang dari sudut pandang doktrin hukum menandakan lemahnya penegakan hukum, menyimpulkan bahwa si pembuat hukum menyadari kekurangan para aparat dibawahnya dalam melaksanakan peraturan yang telah ada sebelumnya.<sup>35</sup>

Ketika Abdurrahman Wahid menggantikan Habibie, kebijakan baru terhadap etnis Tionghoa yang dimulai dari pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967, dan dilanjutkan dengan kebijakan Megawati melalui surat keputusan Menteri Agama perihal penetapan Tahun Baru Imlek sebagai libur nasional juga menyisakan keraguan; apakah kebijakan ini telah betul-betul didasarkan pada penjabaran nilai-nilai demokrasi, atau sebatas alat untuk mencari dukungan publik sehingga dapat memperkuat pemerintahan mereka? Yang jelas, secara praktis, apa pun motif pembentukannya, pembebasan ekspresi budaya Tionghoa telah menjadi suatu komoditas ekonomi yang bernilai jual tinggi sehingga dirasakan sebagai keuntungan bersama.<sup>36</sup>

Eksistensi warga Tionghoa dalam Negara Indonesia kontemporer nampaknya telah membaik. Sejak pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada warga Tionghoa untuk mengekspresikan kegiatan budaya dan agama mereka. Di Kota Singkawang, etnis Tionghoa saat ini lebih leluasa melakukan aktivitas, termasuk aktivitas budaya dan agama.

Dalam hal ini, penjabaran konsep multikulturalisme dapat dilihat dari tradisi ritual tatung di Singkawang yang dikelola oleh organisasi sosial keagamaan Tionghoa seperti Yayasan Majelis Tri

---

34 Roger Cotterrell, *The Sociology of Law, an Introduction*, 1<sup>st</sup> edn (London: Butterworths, 1984), hlm. 104-8.

35 Jafar Suryomenggolo, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: Politik Asimilasi Orde Baru* (Kerjasama Galang Press dengan Elkasa, 2003), hlm. 224.

36 Benny Subianto, 'Tahun Baru Imlek', dalam *Koran Tempo*, 04 Februari 2003, dan liputan *KONTAN*, no. 28, tahun VI, 15 April 2002.

Dharma dan Majelis Tao resort Indonesia Singkawang. Sebagai salah satu ekspresi budaya dan agama yang dilaksanakan pada setiap perayaan Cap Goh Meh, ritual tatung telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat atau etnis non-Tionghoa di Kota Singkawang. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa dalam prosesi ritual Tatung itu juga dihadiri dan dilakoni oleh etnis Melayu dan Dayak. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa menjadi tatung bukan lagi hak milik etnis Tionghoa semata, tetapi juga menjadi milik bersama baik oleh etnis Dayak, Melayu dan etnis lainnya.

Sebenarnya Majelis Tri Dharma maupun Majelis Tao resort Indonesia Singkawang tidak pernah mengajak atau meminta masyarakat selain orang Tionghoa untuk terlibat dalam perayaan orang Tionghoa tersebut. Keikutsertaan masyarakat baik yang beretnis Melayu maupun Dayak pada perayaan tersebut terjadi begitu saja tanpa ada suatu komando atau permintaan, dan mereka melibatkan diri dalam perayaan tersebut secara sukarela. Bagi masyarakat Melayu hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan mereka tidak mempersoalkan membaaur dalam kegiatan tersebut karena dianggap sebagai partisipasi sosial kebudayaan dalam sebuah wilayah yang multietnik.

Meskipun sempat menuai pro dan kontra, beberapa kalangan dari masyarakat non-Tionghoa terutama dari kalangan *grass root* tidak memperlakukan eksistensi tatung berikut perayaannya. Hal ini terbukti walaupun FPI dan MUI kota Singkawang melarang umat Islam menonton dan berpartisipasi pada perayaan Cap Go Meh, kehadiran warga selain orang Tionghoa seperti etnik Melayu (Muslim) pada perayaan Cap Go Meh baik sebagai tatung, pembawa tandu, pengiring musik, penonton sampai pada penjual asesori etnik Tionghoa telah menjadi bukti penerimaan sebagian masyarakat non-Tionghoa pada tradisi tersebut.

Begitupun pada festival Cap Go Meh yang melibatkan sekian banyak unsur kebudayaan dan organisasi di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir panitia Cap Go Meh mengundang beberapa organisasi budaya dari beberapa daerah di Indonesia seperti Madura, Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menampilkan

kebudayaan daerah mereka seperti reog Ponorogo, kuda lumping, padepokan budaya dan lain-lain yang semakin menambah semangat multikulturalisme festival tersebut.

Unsur-unsur multikulturalisme dari perayaan budaya ini dapat dilihat di berbagai aspek seperti; aspek keyakinan, aspek sikap terhadap yang ghaib dan aspek upacara. Pada sistem keyakinan, masyarakat tiga etnik utama, Tionghoa; Dayak dan Melayu memiliki sistem keyakinan yang berbeda terhadap sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang sakral. Perbedaan tersebut berasal dari sumber keyakinan agama formal yang dianut oleh ketiga etnik yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai etnik Tionghoa penganut Tri Dharma, etnik Dayak penganut Kristiani dan Melayu sebagai Muslim. Namun, dalam sebuah ritual sakral tatung, identitas agama formal para tatung tertutup oleh semacam identitas “agama budaya” yang memiliki sistem keyakinan tertentu dan dipercaya serta dijalankan secara kolektif oleh para tatung. Pada sistem keyakinan tatung, mereka memiliki keyakinan yang sama dengan adanya kekuatan dewa atau roh sebagai kekuatan penggerak dan pengatur alam kehidupan, sementara tatung diyakini sebagai medium yang tepat bagi para dewa dan roh untuk menjalankan fungsinya kepada masyarakat. Dalam hal ini tatung telah keluar dari batas-batas agama dan budaya mereka dan menyatu dalam sebuah komunitas dan kebudayaan yang baru.

Pada aspek sikap terhadap yang ghaib, tradisi agama formal yang dianut oleh para tatung memiliki konsep yang sama dalam menghadapi yang ghaib. Ketiga tradisi agama menganggap yang ghaib sebagai sesuatu yang maha dahsyat dan keramat. Sementara, sifat dari yang maha dahsyat dan keramat adalah maha abadi, maha bijaksana, maha berkuasa dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut berada diluar jangkauan akal pikiran manusia, namun sifat tersebut menimbulkan rasa kagum, hormat, sehingga memunculkan hasrat untuk dirasakan dan dihayati. Aspek sikap terhadap yang ghaib ini mendapat tempat dan kedudukan yang sama bagi para tatung dalam memandang satu dengan yang lainnya. Meskipun bentuk dan simbol-simbol yang ghaib berbeda pada tiap tradisi agama, namun penghormatan para tatung

terhadap perbedaan tradisi tersebut terbentuk dalam sebuah keyakinan kolektif bahwa kekuatan yang ghaib, apa pun nama dan asal usulnya adalah sesuatu yang harus dihormati dan pada tiap tatung, setiap mereka memiliki “pegangan” dan sumber kekuatan ghaib masing-masing.

Pada aspek upacara, semangat multikulturalisme dalam masyarakat tatung yang diayomi dan dibina dalam keluarga besar Majelis Tri Dharma dan Majelis resort Tao Indonesia Singkawang ini dapat dilihat dari kesadaran kolektif mereka yang menghargai upacara atau ritual masing-masing agama. Misalnya pada memasuki waktu sholat, seluruh aktifitas ritual tatung dihentikan guna menghormati umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Pada tatung yang memiliki pasien muslim, meskipun tatung menggunakan peran dewa atau roh, mereka tetap menganjurkan agar pasien tersebut selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan tidak lupa melaksanakan ibadah agar diberi kemudahan. Mereka juga tidak mensyaratkan menggunakan, meminum atau memakan benda-benda atau sesuatu yang dinilai tidak diperbolehkan oleh agama-agama tertentu.

Lebih jauh, meskipun keyakinan dan norma-norma yang berlaku ditiap agama bisa berbeda-beda, namun kepercayaan terhadap pentingnya sebuah upacara adalah sesuatu yang mutlak harus ada. Upacara ritual kolektif dalam perayaan Cap Go Meh diyakini memiliki fungsi sosial yang dapat meningkatkan solidaritas masyarakat. Para tatung yang berada dibawah pembinaan Majelis Tri Dharma dan Majelis Tao Indonesia resort Singkawang menjadikan momen Cap Go Meh sebagai pembuktian fungsi mereka sebagai medium bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan para dewa dan roh untuk membersihkan wilayah mereka dari gangguan roh-roh jahat.





Gambar 79  
Tatung Tionghoa berpakaian Dayak (koleksi pribadi)



Gambar 80  
Atraksi Tatung Dayak dengan Datok Kurata (koleksi pribadi)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa beberapa etnik telah menjadi bagian dari upacara budaya dan agama orang Tionghoa di Kota Singkawang. Dapat dipahami bahwa etnis lain, selain etnis Tionghoa, di Kota Singkawang, sangat apresiatif dengan kebudayaan dan agama orang Tionghoa, walaupun tentu saja tidak semua masyarakat menyetujuinya. Kondisi seperti ini patut menjadi contoh bagaimana kerjasama antaretnis dan antarkultur terjadi dan dapat menjadi modal dasar dalam membangun kota Singkawang yang damai dan harmonis dengan semangat multikulturalisme.

Pro dan kontra terhadap kegiatan kebudayaan etnik dan agama tertentu dalam hal ini etnik dan agama lain terlibat di dalamnya menjadi hal yang lumrah di setiap wilayah. Penolakan juga bisa datang dari penilaian etnik dan agama tertentu terhadap budaya etnik dan agama yang lain. Seperti yang diakui oleh salah seorang guru SMA Negeri 1 Kota Singkawang yang beragama Kristen. Dalam diskusi peneliti saat berkunjung ke rumah salah seorang teman beretnik Tionghoa yang sedang merayakan Imlek dirumahnya, guru tersebut mengatakan bahwa tradisi kerasukan, melukai diri dan memakan hewan hidup-hidup tidak dibenarkan dalam agamanya, sehingga guru tersebut tidak mau menyaksikan festival Cap Go Meh di Singkawang. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga di Jl. Manggis Roban Singkawang, H. Rasmad yang menyebut bahwa tradisi Cap Go Meh adalah budaya syirik dan umat Islam yang mengikuti ritual tersebut telah masuk dalam perbuatan dosa besar. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh seorang Guru Buddha di Singkawang, bapak Slamet, S.Ag yang sehari-harinya menjadi pemimpin umat Buddha di Vihara Jl. Antasari Singkawang, bahwa dalam pandangan agama Buddha perilaku ritual tatung adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan dharma.

Dalam kajian agama formal, pandangan-pandangan normatif terhadap perilaku keagamaan tercantum dalam aturan-aturan yang telah tertulis dan disepakati sebagai ajaran agama baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Hal-hal yang diperintahkan adalah untuk ditaati dan dilaksanakan, sebaliknya

sesuatu yang dilarang sudah seharusnya ditinggalkan. Ketaatan atau pengabaian terhadap perintah dan larangan akan berakibat pada hukuman atau ganjaran terhadap seseorang dan yang bersangkutan menerima hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada sesuatu yang disakralkan.

Dalam konteks agama budaya, keyakinan kepada “Yang Sakra”<sup>1</sup> mengandaikan suatu perasaan religius yang sangat personal, tidak rasional dan selanjutnya diyakini secara bersama-sama sebagai sebuah bentuk solidaritas kelompok dalam ritual kolektif yang disucikan. Dalam pengertian tersebut, maka menilai tatung dari kacamata agama formal dalam konteks multikulturalisme menjadi tidak tepat karena kacamata yang digunakan adalah antara putih dan hitam atau yang benar dan salah. Penjabaran nilai-nilai multikulturalisme menuntut adanya keterbukaan dan penerimaan diri terhadap berbagai perbedaan kebudayaan dengan mengambil dan menyepakati norma-norma universal tanpa harus menyinggung atau mengganggu keberadaan agama satu dengan yang lain. Apresiasi terhadap keyakinan seseorang adalah bentuk tertinggi dari nilai-nilai multikultural dan dalam konteks individual, setiap warga berhak dan dengan sadar menentukan pilihan budaya atau agama yang dianutnya sebagai bentuk ekspresi keyakinannya.

Untuk itu simbol-simbol keyakinan keagamaan ditampilkan sedemikian rupa agar masyarakat dapat belajar dan semakin arif di dalam menerima perbedaan. Selama puluhan tahun festival Cap Go Meh selalu menyertakan emblem atau simbol persaudaraan seperti *banner* yang diusung oleh salah satu peserta Cap Go Meh dari warga Tionghoa. Mereka berharap agar kerukunan tetap akan terjalin ditengah beragamnya kultur dan agama di kota Singkawang. Pada kalangan masyarakat akar rumput di Kota Singkawang, apresiasi terhadap keragaman budaya dan agama tampak dengan sangat jelas terlihat dari bentuk partisipasi mereka pada perayaan budaya dan agama seperti Cap Go Meh di Singkawang.



Gambar 81  
Salah satu spanduk yang dibawa oleh  
Kelompok Tatung di Jl. Yos Sudarso Singkawang  
(koleksi pribadi)



Gambar 82  
Warga Melayu yang menjadi pengangkut Tandu  
(koleksi pribadi)

Dalam konteks seperti ini, relasi-relasi sosial, kultural, dan agama di Kota Singkawang sangat cair. Hal ini tentu saja dikondisikan oleh perilaku masyarakat Kota Singkawang yang sangat inklusif dan menerima perbedaan. Karena itu, multikulturalisme yang telah terbangun dan tercipta di Kota Singkawang bisa menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi beberapa wilayah lain yang kerap kali mengalami konflik berbaur SARA. *Bhineka Tunggal Ika*, nampaknya sudah lama dipraktekkan di daerah ini.<sup>37</sup>

---

37 Kalaupun di kota Singkawang pernah mengalami tensi dan polemik di tengah masyarakat seperti pada kasus pendirian Patung Naga beberapa tahun lalu, namun peristiwa yang kental dengan muatan politik tersebut sangat jarang terjadi di Singkawang dan hanya melibatkan sekelompok organisasi tertentu. Kasus tersebut akhirnya dapat teratasi dengan baik melalui pendekatan musyawarah dan dialog yang intensif oleh berbagai kalangan guna menghindari terulangnya kembali kejadian-kejadian yang tidak produktif bagi masyarakat kota Singkawang.

# BAB V

## PENUTUP

### 1. SIMPULAN

Melalui peran dan fungsi organisasi yang ditunjukkan Majelis Tri Dharma, Foket, Yayasan Pemadam Kebakaran, Yayasan Kematian dan Tzu Chi, Permasis, dan MAKIN yang lintas etnis, agama dan partai politik secara *bottom up* (dari bawah ke atas) telah terjadi gerakan restorasi sosial. Kohesi sosial masyarakat menjadi rapat. Hasilnya antara warga yang satu dengan warga lainnya saling kenal, toleransi, dan bekerjasama. Hal ini merupakan aktualisasi nilai-nilai luhur peradaban Bangsa Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, begitu juga bias menghapus stigma negatif atas ideologi komunisme yang kencang menerpa warga Tionghoa pascagerakan 30 September (G30S PKI) maupun PGRS Paraku.

Kohesi sosial yang diperankan oleh organisasi Tionghoa di Kota Singkawang telah teruji dengan pesta demokrasi terbesar pemilihan walikota (Pilwako) sehingga terpilih pemimpin baru

pada September 2012. Walaupun konflik Pilwako mencapai meja Mahkamah Konstitusi (MK) namun warga tetap aman, damai, dan rukun sebagaimana yang diharapkan bersama. Secara keseluruhan pesta demokrasi pun berjalan lancar. Berbarengan dengan itu, dinamika politik nasional juga telah membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada setiap warga Tionghoa untuk berkiprah sesuai dengan minat bakatnya dalam koridor kebangsaan.. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya UU Anti Diskriminasi, pengakuan Agama Konghucu sebagai agama resmi dan penetapan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, Cap Go Meh Singkawang menjadi kegiatan rutin nasional untuk mendongkrak wisatawan, dan rekrutmen partai politik tanpa melihat etnis, suku, ataupun agama. Pada saat ini mudah dijumpai politisi Tionghoa yang berkiprah di lembaga legislatif. Tidak hanya Ketua Foket, Kenny Kumala mengecap kursi di DPRD Kalbar dan Bong Cin Nen di kursi Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, namun juga Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas dan masih banyak lagi. Bahkan warga Tionghoa telah merasakan sebagai top eksekutif seperti Bupati Kabupaten Sanggau (Yansen Akun Effendy) dan Walikota Singkawang (Hasan Karman).

Peran dan fungsi organisasi Tionghoa seperti Tri Dharma, Permasis, Foket, Yayasan Pemadam Kebakaran, Yayasan Kematian, Tzu Chi dan MAKIN tetap dibutuhkan sebagai lem perekat sosial bermasyarakat di luar penegakan hukum maupun menguatnya pilar-pilar demokrasi (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Hal ini dikarenakan eksistensinya dapat menampung dan menyalurkan segenap potensi warga untuk berpartisipasi di dalam lingkungan maupun kehidupan di sekitarnya. Dengan demikian terjawab sudah bahwa selama ini warga Tionghoa merindukan suasana yang kondusif untuk berkiprah di segala lini kehidupan, karena warga Tionghoa juga adalah warga negara Indonesia.

## 2. SARAN

Peran organisasi Tionghoa Kota Singkawang masih minim dari aspek kegiatannya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa Kota Singkawang memiliki struktur

masyarakat heterogen, multikultural dengan berbagai kelompok etnis, budaya dan agama. Sehingga peneliti berharap kepada para peneliti-peneliti berikutnya dapat melakukan riset lebih dalam serta melakukan evaluasi dari kegiatan serta peran dan kiprah sosial organisasi yang ada di Kota Singkawang. Kedepannya diharapkan Kota Singkawang dapat menjadikan tolak ukur dari kota-kota yang ada pada skala kecil dalam kawasan Kalimantan Barat maupun untuk Indonesia secara global.





# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2002., Metode Penelitian Kualitatif, Hand out. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM.
- \_\_\_\_\_, 2010., Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agger, B. 1998., Critical Social Theories: an Introduction. Oxford, Westview Press.
- Anderson, Benedict R.O.G, 1983., Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
- Anonim, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Singkawang Tahun 2010. BPS Kota Singkawang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Singkawang.
- Arikunto, Suharsimi. 2005., Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baidhawiy, Zakiyuddin 2005., Pendidikan Agama Berwawasan multicultural. Jakarta, Erlangga., 2005.
- Badan Pusat Statistik, 2009., Kota Singkawang dalam Angka 2008. BPS: Singkawang.
- Bak, Hans 1993., (ed), Multiculturalism and the Canon of american Culture. Amsterdam: VU University Press.

- Barth, Fredrik, 1969., "Introduction" dalam *Ethnic Groups and Boundaries*, disunting oleh Fredrik Barth. London: Allen and Unwin.
- \_\_\_\_\_, 1988., *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI-Press.
- Bingling, Yuan, 2000., *Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo (1776-1884)*. Leiden: Research School of Asian, African and Amerindian Studies CNWS, Universiteit Leiden.
- Bloomfield, Frena. 1986. *Di Balik Sukses Bisnis Orang-orang Cina, Sang Saka Gotra*, Jakarta.
- Blusse, Leonard, 2004., *Persekutuan Aneh, pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. Yogyakarta: LKiS.
- Brown, A. R. Radcliffe, 1965., *Structure and Function in Primitive Culture, Essays and Addresses*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Caws, Peter, 1995., "Identity: Cultural, transcultural, and Multicultural", dalam David Theo Goldberg (ed.), *Multiculturalism: A Critical Reader*. USA and UK: Blackwell Publishers Inc.
- Chan, Margaret, 2009., "Chinese New Year in West Kalimantan: Ritual Theatre and Political Circus", dalam *Chinese Southern Diaspora Studies*, Volume 3.
- Davidson, Jamie S., 2000., "Ethnic Violence and Electoral Politics on the Periphery: The Case of West Kalimantan" paper presented at the PERCIK International Conference, Yogyakarta, 3-7 July.
- Djin, Siauw Tiong Reformasi Penyelesaian Masalah Minoritas. 22 Juni 1998. [http://arus.kerjabudaya.org/htm/tionghoa\\_PAT\\_1998.htm](http://arus.kerjabudaya.org/htm/tionghoa_PAT_1998.htm).
- Endraswara, Suwardi, 2003., *Metodologi Penelitian Kebudayaan*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Erniwati, 2007., *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Ombak dan Yayasan Nabil.

Fadli dalam Koziar Barbara, 2008. *Praktek Keperawatan Profesional*. Jakarta: EGC, 2008.

Fernandez, Stephanus Ozias, 1990. *Citra Mabusia Budaya Timur dan Barat, Nusa Indah, Flores NTT*.

Geertz, Clifford, 1973., *Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

Graaf, H.J. De, 1997., *Cina Muslim, Di Jawa Abad XV dan XVI antara Historis dan Mitos*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Ham, Ong Hok, 1999., 'Tionghoa Rasisme di Indonesia', dalam *Diskriminasi Racial Ethnis Tionghoa di Indonesia Babari J. dan Albertus Sugeng, (eds.)*. Jakarta: Gandi.

Heidhues, Mary Somers, 2003., *Golddiggers, Farmers, and Traders in the "Chinese Districts" of West Kalimantan, Indonesia*. New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Hidajat, Z. M. 1993., *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Hidayat, Samsul, 'Diskriminasi Khonghucu dalam RUU Kerukunan,' dalam *Koran Tempo*, 31 Oktober 2003.

Hudayana, Bambang, 1992., "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Etnografi", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 2 September-Desember.

Idi, Abdullah, 2009., *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*. Yogyakarta: Tiara wacana.

J. Friedman, 1997., "Global Crises, the Struggle for Cultural Identity and Intellectual Porkbarreling: Cosmopolitans Versus Locals, Ethnics and Nationals in an Era of De-hegemonisation", dalam P. Werbner and T. Modood (eds.), *Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities And the*

- Politics of Anti-Racism. London, Zed Books.
- Jahja, Junus (ed.), 1999., *Masalah Tionghoa di Indonesia*. Jakarta, Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran.
- Jary, D. J. Jary (Peny.), 1999., *Unwin Hyman Dictionary of Sociology*. Edisi ke-2. Leicester: Bookmart Ltd.
- \_\_\_\_\_, 1998., 'Masalah Orang Tionghoa di Indonesia', dalam *Kapok Jadi Nonpri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan*. Alfian Hamzah (ed.). Bandung, Zaman Wacana Mulia.
- \_\_\_\_\_, 1999., 'Warga Keturunan: Asimilasi dan Integrasi,' dalam *Suara Pembaruan*, 04 Juli 1999.
- Kaplan, David, 2002., *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- King, Victor T. 1979., *Ethnic Classification and Ethnic Relations: A Borneo Case Study*. Hull: University of Hull Center for South-East Asian Studies.
- Koentjaraningrat, 2007., "Pendahuluan" dalam *Koentjaraningrat (ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Lontaan, J.U. 1975., *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Edisi I. Jakarta: Pemda Tingkat I Kalimantan Barat dan Bumi Restu.
- Lubis, Ridwan 2011, "Multikulturalisme", <http://www.waspada.co.id/> diakses pada 17 Oktober.
- Massardi, Adhie M 1998., 'Reformasi Politik SARA', dalam *Kapok Jadi Nonpri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan*, Alfian Hamzah (ed.). Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Moleong, Lexy J. 2002., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1991., *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.

- Noordjanah, Andjarwati, 2010., Komunitas Tionghoa di Surabaya. Yogyakarta: Ombak.
- Oetomo, Dede, 2002., 'Bersentuhan dengan Prasangka dan Diskriminasi Kita,' dalam Antara Prasangka dan Realita (Tealah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia) Andreas Pardede tim. Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Poerwanto, Hari, 2005., Orang Tionghoa Khek dari Singkawang. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Parsons, Talcolt, 1973., "A Functional Theory of Change" dalam Amitai Etzoini and Eva Etzoini Haley (eds.), *Social Change: Sources, Patterns and Consequence*. New York: Basic Book Inc.
- Rahoyo, Stefanus., 2010., Dilema Tionghoa Miskin. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2004., *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Mulia.
- Soekanto, Soejono. 2002., "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Smith, Anthony D. 1986., *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.
- Suparyogo, Bambang dkk, 2001., *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: Grafika.
- Spradley, James P. 1997., *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Fox, James, 1982., "Dimensi Waktu dalam Penelitian Sosial: Suatu Studi Kasus di Pulau Roti" dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson (eds.) *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, Chandra. 1998. 'Kehadiran Agama Khonghucu di Indonesia dan Perannya dalam Pembangunan Bangsa', dalam SGSK 19, Siencia 2549, MATAKIN.

- Setiono, Benny G., Kehancuran dan Kebangkitan Martabat/ Jati Diri Etnis Tionghoa Di Indonesia (Bagian 3 dari 5), Indonesia Media Online, <http://www.indonesiamedia.com/lipsus/lipsus-2003-martabatTionghoa3.htm>.
- Saad, Munawar M. Saad, 2008., Sejarah Berdirinya Pemerintahan Kota Singkawang, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- \_\_\_\_\_, 2002., "Singkawang Kota Amoy." Artikel, Pontianak Post.
- \_\_\_\_\_, 2007., Geliat Pembangunan Kota Singkawang. Pontianak: Yayasan Insañ Kampus.
- Stephan, Alfred, (ed.) 1973., Authoritarianism Brazil: Origin Politic and Future. Yale University Press, New Haven.
- Suparlan, Parsudi, 2003., "Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", Antropologi Indonesia, Th. XXVII, No. 71, Mei-Agustus.
- \_\_\_\_\_, "Kerusuhan Sambas", Jurnal Polisi Indonesia (2).
- \_\_\_\_\_, 1999., "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar Sukubangsa", dalam I. Wibowo (peny.), Retrospeksi dan Rekontekstyalisasi Masalah Cina. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 2004., Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas. Makalah Dipresentasikan dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus.
- Suryadinata, Leo, 2002., Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia. Jakarta, LP3ES.
- \_\_\_\_\_, 1999., Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa. Jakarta, LP3ES, 1999.
- \_\_\_\_\_, 2003., "Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: dari Similasi ke Multukulturalisme?"

dalam *Antropologi Indonesia*, Th XXVII, No. 71 Mei-Agustus.

\_\_\_\_\_, 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia*. Jakarta, LP3ES.

\_\_\_\_\_. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta, LP3ES.

\_\_\_\_\_. 1995. 'Khonghucuisme dan Agama Khonghucu di Indonesia', dalam *Pergulatan Mencari Diri, Lasiyo dkk.* Yogyakarta, Interfidei.

Taylor, C, 1994., "The Politics of Recognition", dalam D.T. Goldberg (Ed.), *Multiculturalism: a Critical Reader*. Oxford: Blackwell.

Tirtosudarmo, Riwanto, 2002., "Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah" dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.3.

Toer, Pramoedya Ananta, *Rasialisme Anti Tionghoa dan Percobaan Menjawabnya*, makalah, Jakarta, 6 Oktober 1998  
[http://arus.kerjabudaya.org/ htm/tionghoa\\_PAT\\_1998.htm](http://arus.kerjabudaya.org/htm/tionghoa_PAT_1998.htm)

Usman, A. Rani, 2009., *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

V.J.Veth, 2012. *Borneo Bagian Barat, Geografis, Statistis, Historis*, jilid 1, Institut Dayakologi, Pontianak.

\_\_\_\_\_. 2012. *Borneo Bagian Barat, Geografis, Statistis, Historis*, Jilid 2, Institut Dayakologi, Pontianak.

Wahid, Abdul, 2009., *Bertahan di tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Ombak.

Wahid, Hidayat Nur, 2011., "Membangun Masa Depan Bangsa di Atas Pondasi Multikulturalisme", <http://www.setneg.go.id>. Diakses pada 17 Oktober.

Wang, Yivan, 2000., "Settlers and Sojourners: Multicultural Subjectivity of Chinese-Australian Artists", dalam I. Ang, S. Chalmers, L. Law and M. Thomas (eds.), *Alter/Asians: Asian-Australian Identities in Art, Media and Popular Cul-*



ture. Sydney: Pluto Press.

Majalah Permasis edisi Oktober-Desember 2010

Majalah Permasis edisi Juli-September 2010

Majalah Permasis Edisi ke-26 tahun ke-4 Juli-September 2012

# **LAMPIRAN**

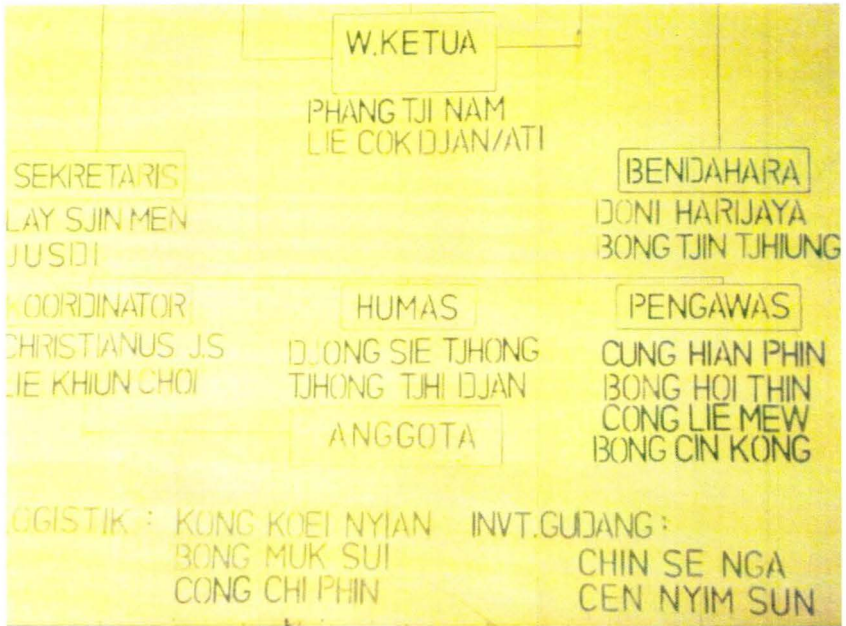




**Mobil Operasional Organisasi Kebakaran**



**Foto Bersama Pengurus Organisasi Kebakaran Kota Singkawang**



**Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran Dwi Tunggal Kota Singkawang**



**Foto Bersama Pengurus Organisasi Kematian Kota Singkawang**



**Kegiatan Keagamaan Organisasi Tzu Chi**



**Kegiatan Pendidikan Organisasi Tzu Chi**



**Kegiatan Pendidikan Organisasi Tzu Chi**



**Kegiatan Kesehatan Oleh Organisasi Tzu Chi**



**Kegiatan Kemanusiaan Oleh Organisasi Tzu Chi**

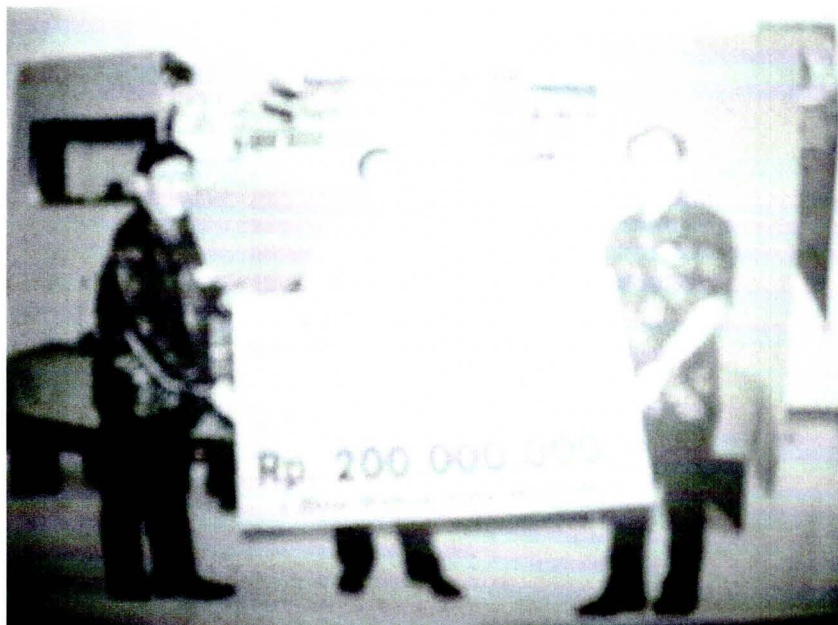


**Kegiatan Keagamaan Oleh Organisasi Tzu Chi**





**Kegiatan Permasis: HUT RI ke-65**



**Kegiatan Permasis:  
Penyerahan Bantuan Dana Untuk Sekolah Barito**



**Kegiatan Permasis: Berbagi Kasih Dalam Suasana Natal 2011**



**Kegiatan Permasis: Pelantikan Pengurus Permasis Masa Bhakti 2012-2015**



**Kegiatan Permasis: Penerimaan SK dan Buku Panduan  
Masa Kerja 2012-2015**



**Kegiatan Permasis: Penyerahan Kembali  
Badan Pengelola Sekolah Barito Singkawang**



**Kegiatan Permais: Upacara Pemberian Surat Pengangkatan Bapak Fam Johannes, SH Sebagai Ketua Bidang Hukumdan Humas Permais**



**Kegiatan Permais:  
Kunjungan Atase Budaya China ke Sekolah Swasta di Singkawang**



# Biodata



SAMSUL HIDAYAT lahir di Singkawang, 15 Nopember 1973. Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (1997) Jurusan Perbandingan Agama, dan S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2004 program Studi Perbandingan Agama. Saat ini sedang menunggu ujian promosi program doktor (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

karta prodi Islamic Studies dengan konsentrasi disertasi Ilmu Perbandingan Agama.

Adapun karya Ilmiah penulis baik dalam bentuk penelitian atau jurnal dan buku diantaranya; Pengaruh Mitos Ratu Adil Dalam Perang Diponegoro (Skripsi, 1997). Konsep Visi dan Misi STAIN Pontianak tahun 2000 (Asisten Peneliti, 2000). Marginalisasi Sistem Keyakinan di Indonesia, Kasus Hegemoni Negara Terhadap Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Tesis, 2004). Mengembangkan Model Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (STAIN, 2005). Religi Orang Tionghoa Singkawang; Studi Tentang Sinkretisasi dalam Kontak Religi dan Budaya (STAIN, 2012). Dari Bakal Menjadi Batal Keluar dari Agama Khonghucu;

Biography Ir. Sakandi Talok (Ketua Komda MATAKIN Kalbar) (Penelitian Individu, 2012). Profile Vihara, Kelenteng dan Lithang di Kota Singkawang (Penelitian Individu, 2012). Muhammad Bin Ja'ie; Ulama Pesisir Kota Singkawang, Berdakwah dengan Uswah Hasanah (Kemenag, 2012), dan Peran Organisasi Tionghoa di Singkawang (Balai Kajian Sejarah Prov. Kalbar, 2012).

Karya tulis dalam bentuk Jurnal dan Buku diantaranya; Menjadi Manusia Arif (Jurnal Shabran, 1997). Potensi Konflik Bernuansa Agama di Pontianak Kalimantan Barat (Jurnal Khatulistiwa, 2000). Kodrat Ganda Yesus dalam Pandangan Muslim (Studi Komparatif), (Relief Journal, 2003). The Way Muslims Understand Phusis of Jesus, (Jurnal Al-Albab, 2004). Kolaborasi Genuine Peradaban Islam dan Konfusian, (Jurnal Relief, 2007). The Secret of Spiritual Body, Rahasia Rukun Islam dan Gerbang Kesadaran Spiritual (Penerbit Erlangga, 2010). Agama Khonghucu (Seri Komunikasi Lintas Agama) (STAIN, 2012). Sementara terdapat puluhan karya tulis dalam bentuk Koran dan bulletin yang diterbitkan diantaranya oleh Buletin Al-Ribath, Koran Jawa Pos Radar Jogja, Koran Bernas Jogja, Koran TEMPO, Koran Equator dan Koran Pontianak Post. Kontak Penulis di [samsul.stain@yahoo.com](mailto:samsul.stain@yahoo.com) telp. 085245264444

NUR ISKANDAR kelahiran Pontianak, 13 Februari 1974 ini sependapat dengan guru yang tidak pernah marah adalah buku. Buku gudang ilmu. Menulis dan membaca adalah kunci-kuncinya. Untuk itu-lah Nur Iskandar yang juga putra seorang guru bernama H Hasan Har memulai karir kepenulisannya di Tabloid Mahasiswa Mimbar Untan (1992-1997), Volare Group (1997-1999), Harian Equator-Jawa



Pos Media Network (1999-2006) dan Harian Borneo Tribune (2007-2012) dan kini menjadi Direktur Pusdiklat TOP Indonesia.

Pendidikan kepenulisan ditempuhnya dalam organisasi pers kampus, pendidikan internal Jawa Pos News Network (JPNN), maupun *shortcourse* di Negeri Paman Sam, AS, dan Negeri Kangguru—Australia. Nuris—sapaannya—belajar menulis narasi di Pantau Foundation yang diampu Prof Dr Janet Steele dan Andreas Harsono.

Di AS melalui Institute for Training and Development (ITD) yang bermarkas di Amherst-Massachussets, Nur Iskandar mendalami *Journalism in Ethics and Investigative Reporting* (2001) dan berlanjut pada pendalaman *Pluralism and Democration* (2004) yang disponsori Kedubes AS dengan *Comparative Study* di Washington DC, Chicago dan Memphis-Tennessee.

Di Australia fellowship diperolehnya dari Asia Pasific Journalism Centre (APJC) yang berpusat di Melbourne (2010) dengan *Comparative Study* di empat negara: Australia, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Buku-buku yang pernah ditulisnya antara lain Biografi Mawardi Dja'far (bersama tim, 1992), Kepemimpinan Gubernur Kalbar HA Aswin (bersama tim, 2003), Bunga Rampai DPRD Kalbar (bersama tim, 2004), Setengah Abad Pembangunan Pertanian di Kalimantan Barat (2008), 40 Tahun Fanshurullah Asa Menggapai Asa (bersama tim, 2009) Jusuf Manggabarani Cahaya Bhayangkara (2011), Anugerah MURI “Rekor Tercepat 1 Bulan 4 Hari dan Tebal 444 Halaman” (2011), Pak Guru Abang Maspura (2011), Genocide (bersama tim, 2011), Jejak Langka Sang Orator (2012), Hadari Nawawi Pemikir dan Pejuang Pendidikan (2012).

Mahasiswa pascasarjana Sosiologi Fisip Universitas Tanjungpura ini juga mengoleksi prestasi sebagai penulis terbaik nasional untuk program pengentasan kemiskinan versi media cetak PNPM Mandiri (2010), juara dua nasional lomba fotografi dalam rangka



kampanye penggunaan air bersih terkait *climate change* yang diselenggarakan oleh Comprehensive Knowledge Networking (CK-Net) Indonesia (2010), sejumlah kejuaraan lomba karya tulis ilmiah semasa SMA dan kuliah (1989-1997).

CP penulis 08125710225. Email nuris\_kand@yahoo.com dan atau iskandar.nur@gmail.com.

FITRI KUSUMAYANTI,

S.Sos, M.Si lahir pada tanggal 03 Oktober 1975 di Pontianak, Kalimantan Barat. Menempuh pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (1999), Fakultas Sosial Politik, Universitas Tanjungpura (2008). Sejak tahun 2000 hingga saat ini menjadi dosen jurusan Dakwah STAIN Pontianak. Pernah menjadi



dosen tidak tetap pada Universitas Muhammadiyah Pontianak (2006-2008) dan pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Kalimantan Barat (2011). Mata kuliah yang diampu adalah Public Relations, Fotografi, Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Ilmu Pengetahuan Dasar.

Pengalaman Kerja yang pernah ditekuni adalah : Magang di harian Pikirin Rakyat Bandung (1997); Sekretaris Jurusan Dakwah STAIN Pontianak (2004), Ketua Pusat Studi Wanita STAIN Pontianak (2012-2014). Adapun beberapa penelitian yang pernah diikuti adalah : Pendekatan Dakwah dengan menggunakan metode individual dan group converence (2000), Tradisi siri pada masyarakat Wajo' Kalimantan Barat (2009), Model materi bahan ajar bahasa Inggris menyimak dan berbicara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Berbasis Cerita Rakyat Kalimantan Barat (2010), Pengembangan hubungan masyarakat (humas) diperguruan tinggi menghadapi era globalisasi dan otonomi perguruan tinggi (Studi di Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Pontianak) (2011), dan saat ini bergabung dengan tim peneliti “peran organisasi sosial pada masyarakat Tionghoa di Singkawang (2012). Beberapa karya ilmiah penulis baik yang ditulis dalam bentuk buku, jurnal maupun penelitian diantaranya adalah; Hubungan komunikasi antar budaya dengan minat mahasiswa pendatang untuk belajar bahasa Sunda (skripsi;1999), Penggunaan bahasa Ugi’ sebagai media komunikasi dan interaksi pada masyarakat Bugis di desa Punggur kecamatan sungai Kakap (tesis;2008), modul Fotografi (2010) modul Public Relation (2011),Peta dakwah; Profil Masjid di Kalimantan Barat (buku; 2011), Peta dakwah; Profil Majelis Taklim (buku; 2011), Jejak Bugis di tanah Borneo (buku;2011)Dasar-dasar Humas (buku;2012), Email: bundaiphiet@yahoo.com, telp ; 082153686322



MERY LESTARI, S.Sos, M.Si,  
lahir Pontianak 29 April 1978.

Pendidikan: S1. Ilmu Sosial konsentrasi Ilmu Administrasi Negara lulusan th 2002, S2 Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik lulusan th 2007

Pengalaman Penelitian: Tim Monitoring PKPS BBM di Kabupaten Sintang tahun 2003, Tim Surveyor P2KP bersama Institut Kajian Kebijakan Publik (IK2P) Kalbar tahun 2004 dan saat ini bergabung bersama tim Peneliti ttg Peran organisasi Sosial pada masyarakat Tionghoa di kota Singkawang tahun 2012. Pekerjaan: Pernah mengabdikan sebagai dosen di STKIP PGRI Ptk mulai tahun 2007 s/d 2010. Sebagai Asisten Dosen di D3 Fisip jurusan Administrasi Perkantoran Untan tahun 2009. Dan saat ini mengabdikan sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Pontianak mulai tahun 2009 s/d sekarang. (Email : merylestari3@gmail.com)



BAHARUDDIN, Lahir, Selimbau, 16 Maret 1982, NIDN STKIP-PGRI Pontianak, 0931126516 NPP STKIP - PGRI Pontianak 308 23007, beragama Islam, Alamat: Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Koperasi Jalur 2 RT.02/RW.10 No. 246 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Hp.

081522521687 / 085246768880. Riwayat Pendidikan: SD Negeri 5 Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 1989 – 1995, SLTP Negeri I Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 1995 – 1998, SMK Negeri 4 Pontianak, tahun 1998 – 2001, Strata I (S1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Jurusan Dakwah – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak; tahun 2001, Strata 2 (S2) Program Magister Ilmu Sosial dan Politik Konsentrasi Studi Etnis Universitas Tanjung Pura (UNTAN) Pontianak, tahun 2010. Keluarga: Istri: Ita Wati, Anak: Barita Laila Nuzula (Zula) Orang Tua: Ayah H. Idi (Alm) dan Ibu: Hj. Syariah. Pekerjaan: Dosen Mata Kuliah: Antropologi, Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup (PKLH) dan Perkembangan Peserta Didik (PPD), Strategi Pembelajaran, Interksi Belajar Mengajar, Profesi Keguruan, Mikro Teaching PPL, Pendidikan Kemasyarakatan, Perubahan Sosial Budaya, dan Penelitian Kualitatif STKIP PGRI Pontianak serta Dosen Mata Kuliah Antropologi, Ilmu Kalam dan Islam Budaya Lokal STAIN Pontianak.

Menulis Buku:

1. Komunikasi Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Remaja, April 2009 diterbitkan STAIN Press Pontianak.
2. Makalah Komunikasi Dalam Keluarga. diterbitkan

- di Jurnal Al-Hikmah Jurusan Dakwah STAIN Pontianak Volume III Edisi I, Juni 2009
3. Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup (PKLH) Juni 2009 diterbitkan STAIN Press Pontianak.
  4. Serba Serbi Kehidupan ditserbitkan Pustaka Abuya Pontianak Agustus 2009.
  5. Ilmu Sosial Budaya Dasar diterbitkan Pustaka Abuya Pontianak Agustus 2009.
  6. Selimbau Perspektif Sosial Kemasyarakatan diterbitkan Pustaka Abuya Pontianak Oktober 2009.
  7. Antropologi diterbitkan Pustaka Abuya Pontianak Oktober 2009.
  8. Modul Kuliah Antropologi, tahun 2008. STKIP PGRI Pontianak.
  9. Modul Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar tahun 2008. STKIP PGRI Pontianak.
  10. Modul Kuliah Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup tahun 2009. STKIP PGRI Pontianak
  11. Modul Kuliah Strategi Belajar dan Mengajar, tahun 2009. STKIP PGRI Pontianak
  12. Modul Kuliah Interaksi Belajar dan mengajar, 2010. STKIP PGRI Pontianak.
  13. Modul Kuliah Profesi Keguruan tahun 2010. STKIP PGRI Pontianak.
  14. Peta Dakwah Seri Profil Majelis Taklim Oktober 2011. STAIN Pontianak Press.
  15. Opportunities And Challenges Of Relegious in the Global Era Solution and Action. Maret 2012. STAIN Pontianak Press.
  16. Modul Pendidikan Kemasyarakatan. 2012. STKIP PGRI Pontianak.
  17. Modul Perubahan Sosial Budaya. 2012. STKIP PGRI Pontianak.
  18. Jurnal Al-Hikmah tahun 2011 edisi 1.
  19. Jurnal Al-Hikmah tahun 2011 edisi 2.
  20. Jurnal Al- Hikmah tahun 2012 edisi 1.
  21. Jurnal Al-Hikmah tahun 2012 edisi 2.

# PERAN ORGANISASI SOSIAL TIONGHOA

PADA MASYARAKAT  
KOTA SINGKAWANG



SAISU, HEDIKAT, M.A. NOR, ISKANDAR, SP.  
ETI, KUSUMAWATI, M.M. AMBY, ESTARI, M.SI, BAHARUDDIN, M.M.

## PERAN ORGANISASI SOSIAL TIONGHOA

PADA MASYARAKAT  
KOTA SINGKAWANG



Diterbitkan Atas Kerjasama:



STAIN Pontianak Press  
(Anggota IKAPI)  
Alamat: Jl. Letjend Soeprapto No. 19  
Pontianak Telp: Fax: 05611734170



ISBN 978-602-7942-11-0



9 786027 942110

Perpustakaan  
Jenderal

3  
F